

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)**

IAIN PURWOKERTO

**SITI SAMROH
NIM: 1423402123**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

PENGESAHAN

Nomor. 1364 /In.17/D.PPs/PP.009/XII/2017

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa.

Nama : Siti Samroh

NIM : 1423402123

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul : "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas"

yang telah disidangkan pada tanggal 22 November 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 19 Desember 2017

Direktur



Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. ✎
NIP. 19691219 199803 1 001


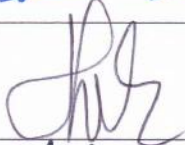





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Siti Samroh
NIM : 1423402123
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

No	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		18/12-2017
2	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. NIP. 19640916 199803 2 001 Sekretaris Sidang Merangkap Penguji		18/12 2017
3	Dr. Ifada Novikasari, S.Si., M.Pd. NIP. 19831110 200604 2 003 Pembimbing Merangkap Penguji		18/12' 2017
4	Dr. Maria Ulpah, M.Si. NIP. 19801115 200501 2 004 Penguji Utama		18/12 17
5	Dr. H. Rohmad, M.Pd. NIP. 19661222 199103 1 002 Penguji Utama		18/12 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Mengetahui,
Ketua Program Studi MPI,



Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Siti Samroh
NIM : 1423402123
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan
Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Purwojati
Kabupaten Banyumas

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 20 Oktober 2017

Pembimbing,



Dr. Ifada Novikasari, S.Si., M.Pd.

NIP. 19831110 200604 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis sayayng berjudul: “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS”, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penelitian tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 18 Oktober 2017

Hormat saya,



Siti Samroh

NIM. 1423402123

IAIN PUR

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS**
Siti Samroh
NIM: 1423402123
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang mempunyai perbedaan dalam pengelolaan pendidikan, keberadaannya menjadi semakin dibutuhkan. Karenanya kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga harus dikembangkan secara sinergis, mengingat adanya kepentingan dan cita-cita yang sama yakni menyelamatkan dan mencerahkan masa depan generasi bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian di madrasah ibtidaiyah se-Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis data situs tunggal dan analisis lintas situs. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia madrasah ibtidaiyah dengan menumbuhkan kondisi keterbukaan dan sikap saling percaya, dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan program serta evaluasi program madrasah difasilitasi dan dijemputi oleh madrasah yang berfungsi mewadahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggalang dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran dengan merencanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan madrasah, dan mengusulkan untuk pertimbangan pengelolaan rencana anggaran belanja madrasah (RABM). Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan memberikan sarana penunjang pendidikan berupa masjid, lapangan sepakbola dan rumah warga.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

**PARTICIPATION OF COMMUNITY
TO DEVELOP ISLAMIC SCHOOL
IN PURWOJATI SUBDISTRICT BANYUMAS REGENCY**

Siti Samroh

NIM: 1423402123

**Study Program of Management of Islamic Education Postgraduate
State Institute on Islamic Studies Purwokerto**

ABSTRACT

Islamic school as formal educational institutions that have differences in the management of education, its existence becomes increasingly needed. Therefore, the collaboration between the society and the institution must be developed synergistically, considering the same interests and ideals of saving and enlightening the future of the nation's generation.

This study aims to describe and analyze community participation in human resource development (HR) and development of facilities and infrastructure of madrasah ibtidaiyah in Purwojati District Banyumas Regency.

This research is a qualitative descriptive research, by taking the location of research in madrasah ibtidaiyah of Purwojati District Banyumas Regency. Techniques of data collection used observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study used a single site data analysis and cross-site analysis. Verification of data validity used data triangulation technique.

The results showed that: First, community participation in the development of human resources of madrasah ibtidaiyah is by fostering conditions of openness and attitudes of trust, and establishing good communication with the community. Community participation is carried out in the form of decision making, program implementation, program utilization and evaluation of madrasah program facilitated and bridged by madrasah that serves to accommodate the aspirations and needs of the community and to mobilize and channel the community's participation in the field of education. Secondly, community participation in the development of madrasah ibtidaiyah facilities and infrastructure is evident from the participation of the community in contributing to the thinking by planning the infrastructure needed for the madrasah and applying for the consideration of the management of the madrasah budget plan. Participation is realized by providing educational support facilities in the form of mosques, football fields and houses.

Keywords: Participation of Community, Human Resources, Facilities and Infrastructure

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 No. 0543 b/u/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha		ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad		es (dengan titik dibawah)
ض	dad		de (dengan titik dibawah)
ط	ta		te (dengan titik dibawah)
ظ	za'		zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

3. *Ta'Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>ikmah</i>
جُزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fat ah* atau *kasrah* atau *ammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-fi r</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	<i>fat ah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ِ	<i>ammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fat ah</i> + alif	ditulis	
----	----------------------	---------	--

	جاهلية	ditulis	<i>j hiliyah</i>
2.	<i>Fat ah + ya' mati</i>	ditulis	
	تنسى	ditulis	<i>tans</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	
	كريم	ditulis	<i>kar m</i>
4.	<i>ammah + wawu mati</i>	ditulis	
	فروض	ditulis	<i>fur d'</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fat ah + Ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fat ah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As-Sam`</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	aw al-fur
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".

(QS. Al-Baqarah [2]: 201)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Al- amdulill h, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- Bapak Ngaliraji dan Ibu Disem Tercinta, yang selalu merestui dan mendo'akan setiap langkah dalam kehidupanku.
- Suamiku Tercinta Abdul Jamil, yang selalu setia mendampingi dan memotivasi penuh daam kehidupanku.
- Anak-Anakku, Bintang Sanyya Dzati Nuhyah dan Rafifa Aisyah Mahera, yang selalu menjadi penyemangat hidupku.
- Sahabat-sahabatku, yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyusunan tesis ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Al- amdulillâh, segala puji syukur ke-Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Mu ammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

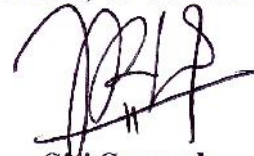
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Rohmad, M.Pd., Penasehat Akademik Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Ifada Novikasari, S.Si., M.Pd., Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
5. Muhemin, S.Pd.I, Kepala MI Ma’arif NU 1 Kaliwangi, beserta Dewan Guru dan Karyawan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
6. Indah Zubaidah, S.Pd.I., Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen, beserta Dewan Guru dan Karyawan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

7. Syahidan, S.Pd.I., Kepala MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul, beserta Dewan Guru dan Karyawan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
8. Segenap dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan tesis ini di masa mendatang.

Purwokerto, 18 Oktober 2017



Siti Samroh
NIM. 1423402123



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah Penelitian	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH	12
A. Deskripsi Konseptual	12
1. Partisipasi Masyarakat	12
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat	12
b. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pendidikan	16
c. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan ..	23
d. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	26
e. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	33
2. Pengembangan Madrasah	39

a.	Pengertian Pengembangan Madrasah	39
b.	Kebijakan Pengembangan Madrasah	42
c.	Arah dan Kerangka Pengembangan Madrasah	44
d.	Strategi Pengembangan Madrasah	46
e.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	49
f.	Pengembangan Sarana dan Prasarana	56
B.	Penelitian Terkait	57
C.	Kerangka Berpikir	60
BAB III	METODE PENELITIAN	63
A.	Tempat dan Waktu Penelitian	63
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
C.	Sumber Data	65
D.	Teknik Pengumpulan Data	65
E.	Teknik Analisis Data	70
F.	Pemeriksaan Keabsahan Data	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	77
1.	MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi	77
2.	MI Ma'arif NU 1 Kalitapen	83
3.	MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul	90
B.	Sajian Data Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	95
1.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi	95
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen	108
3.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul	128
C.	Analisis Data	140

1. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah	142
2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Madrasah	147
3. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	150
BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI	156
A. Simpulan	156
B. Rekomendasi	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi

Lampiran 4 Dokumen Pendukung

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini persaingan pendidikan semakin meningkat dan berbagai carapun dilakukan dalam merebut perhatian pasar atau konsumen dalam hal ini *stakeholder* eksternal agar berminat terhadap lembaga pendidikan. Untuk dapat menarik perhatian masyarakat lembaga selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan atau masyarakat. Persaingan peningkatan mutu menjadi konsep yang menarik dewasa ini karena makin banyaknya minat terhadap dunia pendidikan.

Dengan adanya persaingan dalam dunia pendidikan yang semakin tinggi, maka perlu adanya hubungan dengan masyarakat yang baik, karena bagaimanapun adanya dukungan dan minat masyarakat terhadap pendidikan sangat penting dalam hal ini peran hubungan masyarakat sangatlah urgen sekali. Sebagaimana inti dari hubungan masyarakat dimana seorang manajer atau kepala sekolah dengan keterampilan manajerialnya harus mengkomunikasikan seluruh informasi terkait dengan lembaganya kepada masyarakat dan bagaimana cara memperoleh dukungan masyarakat dalam pelaksanaan proses pendidikan di lembaganya. Akan tetapi fenomena yang terjadi bahwa banyak lembaga pendidikan yang memiliki keadaan yang kurang stabil yang sering diistilahkan dengan *laa yamuutu wa laa yahya* atau hidup-segan-mati-tak-mau, ini dikarenakan kurangnya hubungan sosial dengan masyarakat yang menjadi sumber dukungan lembaga tersebut, seringkali suatu lembaga pendidikan masih mengabaikan untuk kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan dan proses pendidikan sehingga muncul persepsi masyarakat yang tidak mempunyai rasa memiliki, bagaimana tidak! lembaga pendidikan tidak menyadari pentingnya kehadiran mereka.

Kehadiran madrasah di Indonesia merupakan simbiosis mutualistis antara masyarakat dan madrasah itu sendiri. Madrasah merupakan salah satu organisasi

yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berkembang dan mencapai kemajuan tanpa keterlibatan dari lingkungan masyarakatnya. Secara historis kelahiran madrasah tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu, kepala madrasah perlu membina hubungan yang baik antara madrasah dan masyarakat. Madrasah perlu memberi informasi kepada masyarakat tentang program-program dan masalah yang dihadapi sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Sehingga nanti diharapkan adanya umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan program madrasah lebih lanjut dan diharapkan pula tumbuhnya rasa simpati masyarakat terhadap program-program madrasah, yang dapat mengundang partisipasi yang aktif masyarakat. Dalam perjalanan menuju madrasah yang unggul baik pihak madrasah maupun masyarakat harus saling bekerja sama. Salah satu upaya agar kinerja madrasah dapat berjalan dengan efektif adalah dengan menggandeng masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan perkembangan madrasah.

Secara historis kehadiran dan perkembangan madrasah, merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari, oleh dan untuk masyarakat.¹ Ini berarti bahwa lembaga pendidikan yang berasal dari masyarakat seharusnya memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraannya, sehingga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan dalam setiap tahapan program pendidikan yang diselenggarakan. Bukan sekedar mengharapakan uluran tangan dari pemerintah, oleh karena itu sistem penyelenggaraan harus percaya pada kemampuan masyarakat untuk bertanggung jawab kepada pendidikan generasi mudanya.² Adanya kecenderungan untuk melakukan transformasi budaya dan nilai agama Islam kepada generasi berikutnya, merupakan konsep pemikiran masyarakat muslim untuk membenahi lembaga pendidikannya. Pendidikan yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh masyarakat, bukan berarti melepaskan tanggung jawab pemerintah. Tugas pemerintah di dalam pendidikan nasional adalah memelihara

¹ Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 169.

² Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 169.

dan mengarahkan agar supaya tanggung jawab masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan masyarakat diartikan bahwa masyarakat diikutsertakan dalam program-program kependidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tentu hal ini searah dengan kecenderungan masyarakat karena madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang telah berkembang adalah lahir dari kebutuhan nyata masyarakat itu sendiri.³ Oleh karena itu, madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki visi, misi dan karakteristik yang khas dilihat dari segi sosial budaya, politik, bahkan ekonomi.

Era globalisasi sekarang yang bercirikan ketatnya persaingan merupakan tantangan besar bagi dunia pendidikan karena terjadinya perubahan pembaharuan yang pesat terhadap berbagai aspek kehidupan yang menuntut kualitas SDM yang bermutu melalui proses pendidikan, oleh karena itu tuntutan dunia pendidikan semakin berat untuk terus meningkat dan dapat memuaskan masyarakat. Di samping itu, munculnya kebijakan tentang otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan untuk mengelola lembaganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya, sehingga muncul wawasan yang lengkap tentang teori dan aplikasi manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan adanya kebijakan tersebut salah satu konsekuensi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah menanti keterlibatan masyarakat secara keseluruhan, yaitu orang tua siswa, masyarakat sekitar sekolah, pengusaha, organisasi sosial kemasyarakatan dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah/madrasah sebagai salah satu unit pelaksana pendidikan harus dapat menjalin kerjasama yang baik dari segi pemikiran, tenaga, pembiayaan, serta pemecahan masalah yang dihadapi madrasah dengan masyarakat.⁴

Komitmen untuk menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan sudah cukup jelas

³ Tilaar, *Pendidikan...*

⁴ Depdiknas RI., *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: Program Guru Bantu - Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), hlm. 4.

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab XV Pasal 54 ayat (1) bahwa “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.”⁵

Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih bersifat pada dana sedangkan dalam hal pengambilan keputusan, gagasan maupun tenaga masih terbatas. Masyarakat diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan yang membangun dalam pendidikan di madrasah demi majunya sebuah pendidikan. Peningkatan partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bersangkutan akan mempunyai rasa memiliki terhadap madrasah sehingga akan bertanggung jawab dan dedikasi mereka untuk madrasah. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah akan menciptakan keterbukaan dan kerjasama yang kuat.

Ngalim Purwanto sebagaimana dikutip Sri Minarti, mengatakan hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Hubungan Edukatif, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam hal mendidik siswa, antara guru di sekolah dan orangtua dalam keluarga. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dan orangtua peserta didik sebagai anggota komite sekolah, di samping itu juga dapat dilakukan dengan anjang sana oleh guru-guru ke rumah orangtua peserta didik di luar waktu sekolah, (2) Hubungan Kultural, yaitu kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat di tempat sekolah itu berada. Untuk mewujudkan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

hubungan kerjasama ini yaitu dengan sekolah harus mengarahkan peserta didik untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat dengan bergotong-royong dalam memperbaiki fasilitas umum seperti memperbaiki jalan, membersihkan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dan juga bersama-sama menyelenggarakan perayaan yang bersifat keagamaan ataupun nasional dengan mementaskan berbagai kesenian dan pertunjukkan. (3) Hubungan Institusional, yaitu hubungan kerja sama antara sekolah dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Misalnya hubungan sekolah dengan Puskesmas, pemerintah setempat, dinas pertanian, pasar dan sebagainya.⁶

Hubungan masyarakat sebagai mediator komunikasi dua arah antara madrasah dan masyarakat yaitu sekolah menyampaikan informasi-informasi secara terbuka tentang suasana atau kondisi madrasahnyanya dan masyarakat harus memberikan tanggapan, kritikan, masukan serta menyumbangkan ide-ide untuk mendukung kemajuan lembaga tersebut. Oleh karena itu, hubungan masyarakat harus bisa menjalankan fungsinya untuk mengembangkan program lembaganya.

Dengan demikian madrasah harus bisa menjadi mercusuar penerang bagi masyarakat. Sebagai mercusuar penerang, madrasah harus mampu memberikan tauladan tentang cara hidup yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berdaya. Pada saat yang sama madrasah harus menampung semua aspirasi dan kondisi masyarakat lokal dengan membuat program pendidikan yang sesuai dengan masyarakat.⁷

Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 3 (tiga) madrasah, yaitu MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul. Ketiga madrasah tersebut, memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan dan melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tiap tahun peminatnya melebihi peminat sekolah dasar di sekitar madrasah masing-masing, dan sering melebihi daya tampung. Jumlah pendaftar

⁶ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 278-280.

⁷ Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 192-193.

pada ketiga MI tersebut, tiap tahunnya selalu meningkat. Banyak masyarakat sekitar Kecamatan Purwojati yang memilih MI sebagai tempat menimba ilmu karena masyarakat sudah mempercayai bahwa citra dan reputasi MI di Kecamatan Purwojati baik dengan menawarkan pelayanan (*service*) berupa program dan fasilitas unggulan yang dibutuhkan pelanggan (siswa dan masyarakat luas), dan memiliki kelebihan dibanding sekolah dasar yang sangat sedikit mengajarkan ilmu agama. Kondisi tersebut tercapai, antara lain karena adanya jalinan komunikasi yang efektif antara madrasah dan masyarakat. Ketiga Madrasah Ibtidaiyah tersebut cukup terbuka terhadap segala bentuk kritik dan aspirasi dari masyarakat, sehingga program pendidikan yang ditawarkan madrasah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sebagai contoh aspirasi didapat dari komite sebagai fasilitator masyarakat, yang sering menjalin kontak dengan madrasah melalui pertemuan bulanan. Pertemuan komite madrasah dengan orang tua siswa sering diadakan sebagai sarana silaturahmi dan melihat kondisi madrasah, yang didalamnya saling bertukar informasi dan setiap ada ide baru, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan madrasah selalu diinformasikan kepada madrasah begitu pula sebaliknya. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada kepala madrasah untuk ditindak lanjuti, kepala madrasah memanggil wakil kepala madrasah untuk merancang program yang akan dilaksanakan, setelah itu kepala madrasah menginformasikan hasil rapatnya dengan wakil kepala madrasah kepada semua guru dan karyawan, siswa (orang tua siswa) dan komite madrasah. Barulah dialokasikan tugas dan tanggung jawabnya pada masing-masing yang bersangkutan. Begitupun dengan kegiatan humas yang dibantu oleh alumni, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, komite madrasah dan siswa madrasah dalam bentuk kegiatan seminar, bazar, penyuluhan masyarakat, pengajian dan bakti sosial, ini merupakan bentuk komunikasi langsung yang dilakukan humas kepada masyarakat untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan layanan yang baik, juga melalui surat, telepon dan tatap muka langsung. Setiap tahun juga diadakan rapat pleno untuk membahas kegiatan dan pertanggung jawaban kepala madrasah, kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat di sekitar MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi telah terwujud, baik dalam bentuk materiil maupun dukungan moril. Misal, pada saat MI Ma'arif NU Kaliwangi mengalami kekurangan lokal, masyarakat dengan bergotong royong membantu penuh mulai dari anggaran pembangunan sampai membantu tenaga bekerja bakti membangun gedung sekolah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diwujudkan dengan ikut membantu proses pembelajaran agama (madrasah diniyah) pagi sebelum pembelajaran di mulai.⁸

Di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen, partisipasi masyarakat sekitar madrasah juga telah terwujud, baik dalam bentuk materiil maupun dukungan moril. Sebagaimana dengan MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, pada saat MI Ma'arif NU 1 Kalitapen mengalami kekurangan lokal, masyarakat dengan bergotong royong membantu penuh mulai dari anggaran pembangunan sampai membantu tenaga bekerja bakti membangun gedung sekolah. Partisipasi masyarakat juga diwujudkan dengan ikut membantu pembelajaran madin pagi yang merupakan program tambahan yang diberikan sebelum pembelajaran di mulai.⁹

Begitu halnya dengan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul, partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar madrasah sangat terasa, baik dalam bentuk materiil maupun dukungan moril. Karena madrasah sangat menyadari bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan madrasah. Oleh karena itu, MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul mengagendakan secara rutin pertemuan-pertemuan dengan masyarakat untuk menyampaikan program kerja dalam pengembangan madrasah dan juga menjabarkan hambatan yang dialami, sehingga menemukan solusi bersama masyarakat sekitar.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ketiga madrasah ibtdaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas senantiasa melakukan perbaikan dalam pengelolaan madrasahnyanya dalam menarik partisipasi masyarakat agar lebih berkontribusi dalam memberikan dukungannya baik berupa material maupun non material, dalam upaya pengembangan madrasah. Ada beberapa alasan yang

⁸ *Wawancara* dengan Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 23 September 2016.

⁹ *Wawancara* dengan Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 27 September 2016.

¹⁰ *Wawancara* dengan Kepala MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul pada tanggal 30 September 2016.

menjadi alasan penulis untuk memilih penelitian ini, karena melihat realita yang ada bahwa masyarakat kurang berminat dan kurang mendukung terhadap perkembangan lembaga pendidikan swasta. Padahal kemajuan suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari peran serta masyarakat, baik orang tua peserta didik, penduduk yang ada di sekitar madrasah dan para pengusaha yang tinggal di sekitar lembaga pendidikan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dipaparkan cukup luas, mengingat keterbatasan yang peneliti miliki, baik keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya, dan agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.
2. Masyarakat dalam penelitian ini adalah wali siswa, warga yang ada di sekitar madrasah, dan donatur madrasah, yang tergabung ke dalam komite madrasah.
3. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dijelaskan sebagai keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat, dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, membangun diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Wujud partisipasi masyarakat berupa dana, barang, tenaga, dan pemikiran.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas sebanyak tiga madrasah, yaitu MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul.
5. Pengembangan madrasah pada penelitian ini, hanya pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.
6. Subyek penelitian ini adalah semua pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan sekolah, yaitu: Kepala madrasah, wakil kepala madrasah, komite madrasah yang terdiri dari wali siswa, masyarakat sekitar madrasah dan donatur madrasah, yang berhubungan langsung dengan partisipasi masyarakat

dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teori
 - 1) Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu manajemen dalam pendidikan Islam, sehingga dapat diapresiasi dan dijadikan masukan bagi umat Islam.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan objek kajian ilmiah lebih lanjut, sehingga nanti hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan

bagi lembaga pendidikan atau madrasah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk pengembangan bagi lembaga atau institusi terkait, dalam hal ini madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.
- 2) Untuk bahan informasi bagi madrasah, guru, orang tua dan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan swasta, khususnya madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan pemikiran bagi peningkatan mutu madrasah dan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan upaya madrasah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

E. Sistematika Pembahasan

Agar tesis ini mudah dipahami, maka penulis merasa perlu untuk membatasi penulisannya dengan sistematika pembahasan yang disusun ke dalam lima bab, dan disajikan secara terpisah dengan sub-sub bahasan didalamnya sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang memuat latar belakang masalah yang berisi landasan-landasan yang memunculkan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang kemudian dibatasi agar penelitian lebih terfokus, yang diuraikan dalam fokus penelitian. Fokus penelitian ini menjadi acuan dalam perumusan masalah penelitian, yang dijelaskan pada tujuan penelitian sebagai arah dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian merupakan kontribusi hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Terakhir adalah sistematika pembahasan merupakan penjelasan yang berupa urutan-urutan yang akan dibahas di tesis ini.

Pada bab II kajian teoritik, menjelaskan tentang informasi yang dapat mendukung terkait dengan permasalahan penelitian ini dan menjadi landasan penelitian, meliputi deskripsi konseptual tentang partisipasi masyarakat dan pengembangan madrasah. Kemudian pada sub bab selanjutnya membahas tentang hasil penelitian yang relevan, yang bisa dijadikan pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pada akhir bab dua disajikan kerangka berpikir untuk memudahkan memahami alur penelitian ini secara teoritis.

Sementara, metode penelitian disajikan pada bab III. Bab ini terdiri atas, tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka hasil penelitian dideskripsikan secara naratif.

Bab IV berisi paparan data hasil penelitian dan analisis. *Pertama*, profil setting penelitian yang menggambarkan situasi dan lokasi penelitian berlangsung. *Kedua*, temuan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu bentuk-bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana. *Ketiga*, analisis data yang berisi gagasan peneliti, penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkap dari lapangan tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.

Bab terakhir atau bab V yaitu penutup, didalamnya memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan dijadikan dasar untuk memberikan saran bagi lokasi penelitian, sekaligus kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan.

Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Daftar rujukan memuat referensi-referensi yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Lampiran-lampiran memuat dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Biodata peneliti berupa biografi peneliti secara lengkap.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH

A. Deskripsi Konseptual

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

H.A.R.Tilaar, mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.¹¹ Menurut Yusufhadi Miarso istilah “Partisipasi adalah keterlibatan secara spontan baik berupa pikiran, tenaga, barang ataupun uang yang disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan”.¹² Pengertian tersebut mengandung tiga gagasan yaitu keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab. Keterlibatan adalah keikutsertaan mental dan emosional yang tidak saja menunjukkan keterlibatan fisik tetapi juga keterlibatan secara mental. Kontribusi merupakan pemberian kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tanggung jawab merupakan keharusan seseorang untuk melaksanakan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut Soegarda Puerbakawtja, partisipasi adalah suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Orang-orang juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban mereka. Partisipasi dilakukan dalam bidang fisik maupun bidang material serta dalam bidang penentuan

¹¹ HAR. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 287)

¹² Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 706.

kebijaksanaan. Sejalan dengan pendapat Soegarda Poerbakawtja, Rogers memberikan pengertian partisipasi sebagai tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu rencana. Sementara itu, Keith Davis sebagaimana dikutip oleh Suryosubroto mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut.¹³

Dari beberapa pendapat di atas, bisa dikatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan.¹⁴ Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena sekolah merupakan partner orang tua dalam mengantarkan cita-cita dan membentuk pribadi peserta didik sebagai agen perubahan.

Partisipasi masyarakat¹⁵ sering diartikan sebagai sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan. Dengan perkataan lain, partisipasi diartikan seberapa besar tenaga, dana, atau barang yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.¹⁶

Penggabungan kedua istilah “partisipasi” dan “masyarakat” mengandung sejumlah gagasan dan rujukan, baik yang terkandung dalam masing-masing istilah, maupun gagasan dan rujukan khusus penggabungannya. Gagasan yang terkandung adalah peran serta semua anggota atau unsur yang terkait dalam melaksanakan suatu kepentingan

¹³ B. Suryasubroto, *Humas Dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), Cet. II, hlm. 75

¹⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rodakarya, 2006), Cet. VIII, hlm. 167.

¹⁵ Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu identitas bersama. Dalam masyarakat terdapat golongan sosial atau lapisan seperti: penasihat, buruh, pegawai negeri, cendekiawan, dan sebagainya. Baca: Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), hlm. 174.

¹⁶ B. Suryasubroto, *Humas Dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), Cet. II, hlm. 74.

bersama atau pekerjaan, yang dimaksudkan untuk mempermudah tercapainya tujuan yang diharapkan. Sedangkan rujukan yang terkandung adalah wadah atau forum sedang ajang pertemuan; adanya keterbukaan dalam membahas persoalan, adanya keterbukaan dalam membahas persoalan, adanya interaksi dalam merumuskan tujuan dan cara menentukan yang terbaik, adanya keputusan yang diambil bersama, dan adanya pemantauan atau pelaksanaan keputusan.¹⁷ Sedangkan menurut Sihombing dan Indardjo, masyarakat adalah “produk lingkungan, lingkungan akan membentuk karakter masyarakatnya”. Karena pendidikan ada kaitannya dengan lingkungan tersebut, maka pendidikan selalu berkaitan dengan masyarakat sehingga sesungguhnya masyarakat berada di tengah-tengah masyarakat.¹⁸

Siti Irene Astuti mengartikan partisipasi sebagai bentuk keterlibatan orang dalam suatu kegiatan dan keterlibatan yang dimaksud ini bisa berupa keterlibatan mental, emosi maupun fisik. Apabila pengertian tersebut kemudian ditarik dalam konteks partisipasi terhadap pendidikan dapat dipahami bahwa partisipasi itu merupakan keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah, pembangunan, mengkritisi dan lain sebagainya yang berorientasi pada pendidikan. Ia menjabarkan bahwa partisipasi masyarakat perlu dilihat dari aspek yang luas. *Pertama*, adalah bahwa partisipasi itu adalah hak masyarakat sebagai warga negara yang hidup dalam sistem demokratis dan kita harus menyadari bahwa partisipasi itu merupakan hak setiap warga masyarakat. *Kedua*, adalah dimensi partisipasi. Kata dimensi itu sendiri jika kita lihat artinya adalah ukuran (panjang, lebar, tinggi).¹⁹ Jika dikaitkan dengan partisipasi maksudnya adalah ruang lingkup yang mencakup partisipasi masyarakat terhadap pendidikan antara lain

¹⁷ Yusufhadi Miarso, *Menyemai...*, hlm. 706.

¹⁸ Zainuddin, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 40.

¹⁹ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 50-59.

bagaimana hubungan individu dengan keluarga, keluarga dengan sekolah dan masyarakat dengan pendidikan. Karena partisipasi masyarakat tidak terlepas dari beberapa elemen tersebut.

Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²⁰ Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang pendidikan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan di tempat mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan program-program pendidikan masyarakatnya.²¹

Menurut penulis berdasarkan beberapa pengertian di atas, partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan, keterampilan dan jasa. Adapun “masyarakat” dalam penelitian ini adalah orang tua atau wali siswa, warga, tokoh masyarakat sekitar lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, dan pengusaha yang menjadi donatur di lembaga pendidikan tersebut. Keterlibatan mereka diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini diharapkan akan dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah diperlukan agar sekolah dapat berfungsi dengan baik.

²⁰ Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi Implementasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 74.

²¹ Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 148.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pendidikan

Berawal dari penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu: pemerintah, orang tua dan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa orang tua murid dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, partisipasi yang tinggi dari orang tua murid dan masyarakat dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauh mana masyarakat dapat diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah adalah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini nampaknya memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Husen dalam penelitiannya bahwa siswa dapat belajar banyak karena dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan akan berhasil dengan baik berkat usaha orang tua mereka dalam memberikan dukungan.²²

Masyarakat memandang sekolah sebagai cara yang meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa. Oleh karena itu, masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya. Dan untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, sudah sepatutnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh ini untuk membahas bentuk-bentuk kerja sama dalam meningkatkan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk:

²² <http://www.bpgdisdik-jabar.com/materi/KS-1203-29.pdf> Online pada tanggal 08 April 2017.

- 1) Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan;
- 2) Terselenggaranya kerjasama yang menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan;
- 3) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan) dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas dan peraturan-peraturan;
- 4) Meningkatkan kinerja sekolah, yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.²³

Keterlibatan masyarakat diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini diharapkan akan dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan. Jadi, dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah diperlukan agar madrasah dapat berfungsi dengan baik.

Sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat, bahkan sekolah tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.²⁴ Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak melaksanakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dan pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lainnya. Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan

²³ Yusufhadi Miarso, *Menyemai...*, hlm. 709

²⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 234.

sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumberdaya berkualitas. Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, sedangkan komite sekolah adalah lembaga yang terdiri dari unsur orang tua, komunitas, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dalam tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten yang hirarkis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi dalam menyumbangkan dana, gagasan, membantu tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan.

Berikut adalah beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

- 1) Mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putra-putrinya di rumah dan bila perlu memberi laporan atau berkonsultasi ke lembaga pendidikan.
- 2) Menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putranya agar giat belajar.
- 3) Menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga pendidikan.
- 4) Berusaha melunasi SPP dan dana bantuan pendidikan lainnya.

- 5) Memberikan umpan balik kepada lembaga pendidikan tentang pendidikan, tentunya yang menyangkut keadaan putra-putrinya.
- 6) Bersedia datang ke lembaga pendidikan bila diundang.
- 7) Ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti keuangan, sarana, kegiatan, dan sebagainya.
- 8) Membentuk fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan lembaga pendidikan dalam memajukan proses belajar mengajar.²⁵
- 9) Meminjami perlengkapan pertukangan, perkebunan, Kesenian, dan sebagainya yang dibutuhkan lembaga.
- 10) Bersedia menjadi tenaga pelatih dan nara sumber bila dibutuhkan.
- 11) Menerima para siswa dengan senang hati bila mereka belajar di masyarakat.
- 12) Memberi layanan atau penjelasan kepada para pelajar (siswa) yang belajar di masyarakat.
- 13) Menjadi responden yang baik terhadap penelitian-penelitian siswa dan lembaga.
- 14) Memberi bantuan penginapan bagi para siswa atau mahasiswa yang praktek di masyarakat.
- 15) Bagi ahli pendidikan, bersedia menjadi ekspert dalam membina lembaga pendidikan.
- 16) Bagi hartawan bersedia memberikan bantuan dana secara cuma-cuma.
- 17) Ikut memperlancar komunikasi pendidikan di masyarakat dalam bentuk penerbitan-penerbitan, siaran-siaran radio, televisi, pertunjukan dan sebagainya.
- 18) Mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan.
- 19) Ikut mengontrol jalannya pendidikan.
- 20) Bagi tokoh-tokoh masyarakat bersedia menjadi partner manajer pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan lembaga.

²⁵ Keterlibatan kewibawaan orang tua di dalam sekolah dapat menaikkan produktivitas pendidikan secara dramatis. Lihat: Wahjosumijdo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. II, hlm. 335.

21) Ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan.²⁶

Bertolak dari beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan tersebut di atas, banyak kalangan masyarakat khususnya orang tua siswa, yang masih berpandangan bahwa urusan pendidikan anak-anaknya sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, utamanya kepala sekolah dan para guru. Hasil pendidikan anaknya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kebanyakan orang tua bertanggung jawab hanya sebatas pada menyediakan biaya sekolah dan memenuhi keperluan sarana pendidikan bagi anaknya. Selain itu, kebanyakan keluarga merasa tidak mengetahui soal-soal pendidikan bagi anak-anaknya, apalagi tentang penguasaan mata pelajaran yang tertuang dalam buku pelajaran anaknya.²⁷

Dalam hal ini, orang tua sudah merasa berat untuk bekerja dengan “membanting tulang memeras keringat” mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarga. Oleh karena itulah maka mereka tidak mungkin untuk terlibat dalam urusan pendidikan. Hal ini bila dilihat dari aspek pendidikan hanya dari proses belajar-mengajar memang ada benarnya. Padahal sebenarnya pendidikan lebih dari itu. Suyanto selalu menyebutkan bahwa pendidikan meliputi pembiasaan (*habit formation*), proses belajar mengajar (*teaching and learning*), dan keteladanan (*role model*).²⁸ Jadi, pengertian pendidikan jauh lebih luas dari sekedar proses belajar mengajar.

Keterlibatan orang tua siswa sering kali menghadapi kondisi atau faktor yang menyebabkan keterlibatan orang tua siswa tidak sepenuhnya berjalan optimal, hal ini menurut Sam Redding, di dalam buku “Membangun Sekolah Efektif” disebabkan beberapa faktor, faktor

²⁶ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), Cet. I, hlm. 199-200.

²⁷ Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), Cet. I, hlm. 218.

²⁸ Sri Renani Panjastuti, dkk., *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm. 4.

tersebut adalah: *pertama*, banyak kalangan yang memberikan pemahaman tentang keterlibatan orang dengan sempit, seperti hanya sebatas kehadiran orang tua siswa secara formal ke sekolah untuk menghadiri pertemuan, mengambil rapor anaknya, dan sebagainya. *Kedua*, banyak kalangan khususnya dari pihak sekolah, yang menganggap orang tua siswa yang berpenghasilan rendah tidak akan mampu memberikan dukungan dan bimbingan bagi pendidikan anak-anaknya. *Ketiga*, kurangnya kesiapan para guru untuk dapat memberikan kesempatan kepada orang tua siswa dapat terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. *Keempat*, kesibukan kerja orang tua siswa sehingga tidak memiliki waktu untuk dapat membantu sekolah. *Kelima*, sikap orang tua siswa yang mungkin pernah memiliki pengalaman pahit dengan sekolah sehingga menolak untuk dapat berhubungan dengan sekolah.²⁹

Sebagai pengguna jasa layanan umum pendidikan, orang tua dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam memajukan lembaga pendidikan dan tanggung jawab itu harus direalisasikan dengan terlibat secara aktif dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan ini harus bersifat porposional dalam rangka menjamin proses akuntabilitas sekolah sebagai lembaga publik yang wajib memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan berorientasi kepada perilaku manajemen yang transparan.

Lembaga-lembaga pendidikan seharusnya memanfaatkan keberadaan komite sekolah sebagai wadah masyarakat yang peduli sekolah. Masyarakat diharapkan sungguh-sungguh memberikan masukan sesuai dengan kemampuannya. Tugas dan fungsi komite sekolah adalah memberikan bantuan kepada sekolah, bantuan itu merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah.³⁰

Pelibatan masyarakat melalui komite sekolah merupakan salah satu aspek yang harus dipelihara oleh sekolah. Dengan adanya

²⁹ Suparlan, *Membangun...*, hlm. 220.

³⁰ Amiruddin Siahaan, dkk., *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (Ciputat: Quantum Teaching, 2006), Cet. I, hlm. 130.

keterlibatan ini, beban sekolah diharapkan akan semakin ringan sehingga memungkinkan sekolah lebih konsentrasi dalam melaksanakan manajemen sekolah terutama dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini memberikan gambaran bahwa kedudukan masyarakat dalam manajemen sekolah amat penting untuk memajukan kualitas sekolah. Keterlibatan masyarakat membantu memajukan kualitas sekolah semakin terbuka dengan kebijakan sistem otonomi pendidikan khususnya di sekolah.

Partisipasi masyarakat lewat komite sekolah membawa dampak yang positif, dan kontribusinya terhadap sekolah bisa berupa penyusunan perencanaan strategik sekolah, yaitu strategi pembangunan sekolah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan; penyusunan perencanaan tahunan sekolah; mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah; memikirkan upaya-upaya yang memungkinkan dilakukan untuk memajukan sekolah; mendorong sekolah melakukan internal *monitoring*, evaluasi diri sendiri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah; membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga atau institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu; membahas laporan tahunan sekolah, sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah.³¹

Dapat ditegaskan bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta atau partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Peran serta masyarakat melalui komite sekolah memiliki posisi yang strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan.

Menurut Mulyasa, tujuan sekolah memiliki hubungan dengan masyarakat antara lain:

³¹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik...*, hlm. 241.

- 1) Demi kepentingan sekolah. Berdasarkan dimensi kepentingan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar kegiatan belajar mengajar, dan memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah.
- 2) Kebutuhan Masyarakat. Berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkat kemampuannya.³²

Hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan program bersama bagi pembinaan peserta didik, dapat mengurangi dan mencegah kemungkinan anak berbuat nakal karena program yang padat dan menarik tidak member kesempatan atau kemungkinan kepada peserta didik untuk berbuat yang kurang baik.

c. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya berkualitas. Tumbuhnya partisipasi aktif untuk membangun pendidikan yang bermutu dan mandiri merupakan pengimplementasian otonomi pendidikan sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Salah satu wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan dibentuknya komite sekolah.

³² Mulyasa. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 148.

Dasar pembentukan organisasi orang tua tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan Nasional yang mengharuskan setiap sekolah memiliki wadah atau organisasi yang beranggotakan orang tua siswa, guru, kepala sekolah sebagai pelaksana teknis. Pada awalnya organisasi tersebut dikenal dengan nama Badan Pembina Pembangunan Pelajar (BP3) atau sebagian sekolah lainnya menyebut BMOG (Badan Musyawarah Orang Tua dan Guru). Kemudian sejak era reformasi, organisasi tersebut mengalami perubahan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/U/2002, tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan/Komite Sekolah merupakan lembaga independen yang mempunyai visi dan misi terciptanya masyarakat masa depan yang berkualitas, melalui kerja sama yang erat dengan sekolah yang tumbuh dari akar budaya, sosial, ekonomi, geografis, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekolah.³³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan kembali ditegaskan pada pasal 56 ayat 1-4. Pasal 56 ayat (1): “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”. Pasal 56 ayat (2): “Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis”. Pasal 56 ayat (3): “Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

³³ Zainuddin, *Reformasi...*, hlm. 46.

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. Pasal 56 ayat (4): “Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.³⁴ Untuk memenuhi amanat UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat (4) tersebut, pada 28 Januari 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan pasal ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dari membuat perencanaan sampai melakukan evaluasi program kegiatan pendidikan di madrasah melalui organisasi atau wadah seperti komite madrasah dan dewan pendidikan.

Pada tanggal 25 November 2013, Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013, pada pasal 46, disebutkan bahwa: “(1) Komite Madrasah terdiri dari wakil orang tua peserta didik, tokoh agama/masyarakat dan tokoh pendidikan; dan (2) Komite Madrasah memberi pertimbangan dan masukan kepada pimpinan madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah.”³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, di antaranya adalah:

- 1) Pada pasal 6 disebutkan bahwa “setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”
- 2) Pada pasal 8 disebutkan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁵ Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

3) Pada pasal 9 disebutkan bahwa “masyarakat wajib memberi dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.”³⁶

Pada pasal 6, 8 dan 9 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Hak masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara lain ikut berpartisipasi dalam program pendidikan di sekolah mulai dari membuat visi, misi madrasah sampai ikut menentukan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat. Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah berupa ikut berpartisipasi memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh sekolah yaitu dapat berupa ide (pemikiran), tenaga, pemberian bantuan buku, alat pendidikan dan dana. Dengan demikian sumber pendanaan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melainkan pula ditanggung oleh masyarakat.

Jadi, masyarakat di samping mempunyai kewajiban membiayai pendidikan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Kewajiban ini sangat perlu dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat dipahami bersama, sehingga partisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi semakin besar.

d. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Untuk mengikutsertakan warga masyarakat dalam pembangunan pendidikan, sudah sewajarnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan. Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk menurut Effendi dalam Siti Irene A.D., terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil

³⁶ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.³⁷

Sementara itu, bidang kerja sama antara sekolah dengan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu: bidang kerja sama dengan orang tua siswa dan bidang kerja sama sekolah dengan masyarakat luas.

1) Bidang kerja sama sekolah dengan orang tua siswa

a) Bidang pengajaran

Kerja sama dalam bidang ini, dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan kemudahan belajar kepada peserta didik, misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, orang tua harus membantu menjelaskan hal-hal yang belum diketahui peserta didik. Jika saja belum mengerti tugas yang dibebankan kepada anaknya orang tua harus bertanya kepada guru sehingga orang tua dapat membantu kelancaran belajar anaknya.³⁸

b) Bidang pengembangan bakat

Peserta didik mungkin mempunyai bakat tertentu, semisal bakat seni, musik, teknik, dan sastra. Bakat tersebut perlu segera diketahui sehingga melalui bidang studi yang sesuai dengan bakat peserta didik, guru dan orang tua siswa dapat bersama-sama membina dan mengembangkan bakat peserta didik tersebut.³⁹

c) Bidang pendidikan mental

Peserta didik sering mengalami kesulitan belajar, penyebabnya bermacam-macam, misalnya kedua orang tua *broken home*, situasi yang kurang kondusif tersebut sangat mempengaruhi

³⁷ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi...*, hlm. 58.

³⁸ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Bandung: Departemen Pendidikan Agama RI, 2003), hlm. 101.

³⁹ E. Mulyasa, *Pedoman...*, hlm. 101.

mental peserta didik di sekolah, menjadi pemurung, atau frustrasi.⁴⁰ Oleh karena itu, kondisi seperti itu harus dihilangkan dan diusahakan agar tidak mengganggu perkembangan kepribadian peserta didik.

d) Bidang kebudayaan

Bidang ini adalah sejauh mana anak menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam sekolah peserta didik diberikan pelajaran bahasa Indonesia yang baik, tetapi kalau di rumah iklimnya tidak mendukung, perkembangan bahasanya akan jelek. Oleh sebab itu, orang tua harus berusaha berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar situasi rumah dan sekolah serasi. Begitu juga dalam pembinaan kebersihan dan keindahan, hendaknya diusahakan agar siswa tampil serasi, berpakaian tidak harus mahal, tetapi yang penting bersih. Kerja sama dalam bidang kebudayaan ini perlu lebih ditekankan pada penanaman rasa cinta terhadap budaya bangsanya.⁴¹

2) Bidang kerja sama sekolah dengan masyarakat luas

a) Bidang pendidikan olah raga

Kerja sama dalam bidang pendidikan olah raga juga merupakan hal yang sangat baik, karena manusia yang berkualitas yang di cita-citakan adalah sehat jasmani dan rohani. Pembinaan olah raga di sekolah setiap minggu hanya berlangsung beberapa jam saja sehingga waktu latihan sangat terbatas. Karena itu, hal tersebut harus dilengkapi oleh masyarakat.⁴²

b) Bidang pendidikan kesenian

Pengembangan bakat seni peserta didik di sekolah waktunya sangat terbatas, oleh karena itu, adanya perkumpulan kesenian di masyarakat sangat membantu proses pembinaan bakat

⁴⁰ E. Mulyasa, *Pedoman...*, hlm. 102.

⁴¹ E. Mulyasa, *Pedoman...*, hlm. 102-103.

⁴² B. Suryasubroto, *Humas...*, hlm. 63.

dan jiwa seni peserta didik, misalnya perkumpulan seni musik, tari, drama, lukis, dan pahat.⁴³

c) Bidang pendidikan keterampilan

Di sekolah peserta didik dituntut untuk memperoleh ketrampilan, misalnya komputer, bahasa Arab, bahasa Inggris, pertanian dan sebagainya. Pendidikan keterampilan membutuhkan waktu yang lama sehingga jumlah jam di sekolah tidak mampu membuat terampil peserta didik. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kerja sama yang erat dengan berbagai lembaga yang ada di masyarakat.⁴⁴

Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, serta menyalurkan kebutuhan partisipasi dalam pendidikan.

Adapun menurut Mukhtar dan Iskandar, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Finansial. Mengenai keuangan, dalam bentuk ini masyarakat di samping sumber keuangannya berasal dari pemerintah namun yang lebih diharapkan adalah swadaya masyarakat itu sendiri untuk memajukan proses belajar yang dikelola, dari masyarakat untuk masyarakat sehingga tujuan masyarakat belajar dapat dilaksanakan sesuai yang diinginkan. Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pandangan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bunyi pasal 46 ayat 1. Sebagaimana yang diatur pula dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pada pasal 31 ayat 4 bahwa pemerintah

⁴³ B. Suryasubroto, *Humas...*, hlm. 64.

⁴⁴ B. Suryasubroto, *Humas...*, hlm. 64-65

pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan.

- 2) Proteksi. Perlunya masyarakat belajar tidak bisa terlepas dari adanya perlindungan baik hukum maupun proses pelaksanaannya, hasil produk juga harus bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan.
- 3) Moral, yaitu masyarakat yang mampu membedakan tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban.
- 4) Akademis. Bentuk partisipasi ini bersifat ilmu pengetahuan yang dapat disumbangkan oleh masyarakat untuk pelaksanaan dari proses belajar dan tujuan yang diinginkan, sehingga sekolah yang diharapkan oleh masyarakat dapat bermutu.
- 5) Kurikulum. Kurikulum merupakan susunan rencana pelajaran atau perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dari kurikulum disusun dan dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat dan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dengan kata lain kurikulum didesain untuk kepentingan masyarakat.
- 6) Sumber belajar, adalah orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan, dalam hal ini bersumber dari masyarakat setempat di mana sekolah atau pendidikan dilaksanakan.
- 7) IT (Ilmu Teknologi). Untuk memenuhi tuntutan zaman IT harus dapat menjadi partisipasi dalam membentuk masyarakat belajar, karena dengan IT akan terlihat kemampuan pelaksanaan kegiatan sekolah masyarakat, meskipun kemampuan di bidang IT belum dapat sepenuhnya dilaksanakan namun IT dapat membantu melancarkan program kerja yang direncanakan masyarakat belajar. Kemajuan teknologi sebagai penyebab pengembangan pendidikan yang menghendaki masyarakat ikut terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri.

IAIN PURWOKERTO

- 8) Kelembagaan, Manajerial, Kepemimpinan yaitu bersifat lembaga yang dipimpin seorang manajer dengan tugas untuk membentuk program kerja masyarakat belajar yang diinginkan.⁴⁵

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, sebagaimana dikutip Suryosubroto, partisipasi masyarakat dapat berbentuk:

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah di semua jenjang pendidikan kecuali pendidikan kedinasan.
- 2) Pengadaan dan pemberian tenaga kependidikan.
- 3) Pemberian bantuan tenaga ahli d. Pengadaan dana dan pemberian bantuan berupa wakaf, hibah, pinjaman, beasiswa dan bentuk-bentuk lain yang sejenis;
- 4) Pengadaan dan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan pemerintah.
- 5) Pengadaan dan pemberian buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- 6) Pemberian kesempatan untuk magang atau latihan bekerja kepada anak didik.
- 7) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung dan tanah untuk kegiatan belajar mengajar.
- 8) Pemberian pelatihan manajemen bagi penyelenggara pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional.
- 9) Pemberian bantuan berupa pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan.
- 10) Pemberian bantuan dan pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan.
- 11) Pemberian kesempatan untuk berperan dalam program pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah di dalam atau di luar negeri.⁴⁶

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela. Peran serta yang bersifat wajib, antara lain membantu biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua atau wali murid untuk

⁴⁵ Mukhtar dan Iskandar. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 204-206

⁴⁶ B. Suryasubroto, *Humas...*, hlm. 84-85.

menyekolahkan anak-anak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁷

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan atau proses pembangunan dalam hal ini pendidikan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata, misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna

⁴⁷ B. Suryasubroto, *Humas...*, hlm. 85.

mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban, misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi semakin penting, terutama masyarakat yang terkait langsung dengan sekolah yang bersangkutan. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, dan memperoleh simpati dari masyarakat, jika dapat menjalin hubungan akrab dan serasi dengan segenap masyarakat dan lingkungan, melalui manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat.

e. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat harus menjadi partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, kerjasama keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalam suasana yang demikian, sekolah memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja terdidik. Sebagai partner masyarakat, sekolah akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di dalam lingkungan masyarakat, bahan bacaan, tontonan, dan kondisi sosial ekonomi. Sekolah juga harus bertanggungjawab terhadap perubahan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, dan forum komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Di sisi lain, kesadaran peserta didik untuk

mendayagunakan masyarakat sebagai sumber belajar dipengaruhi oleh kegiatan dan pengalaman belajar yang diikutinya di sekolah.

Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah, kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan, yang harus menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik disekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk: (1) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja; (2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing; (3) kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.⁴⁸

Dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah, terdapat berbagai cara melibatkan masyarakat baik secara aktif maupun pro aktif. Cara-cara yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat antara lain melalui:

- 1) Menghimpun masyarakat yang peduli dengan pendidikan melalui komite sekolah.
- 2) Memilih dan menentukan anggota komite sekolah yang memiliki pandangan yang luas tentang pendidikan.
- 3) Menjadikan komite sekolah sebagai tempat masyarakat berhimpun, memberikan masukan dan bantuan baik yang bersifat material atau apa saja yang memungkinkan semakin efektifnya manajemen sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.

⁴⁸ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala...*, hlm. 165-166.

- 4) Setiap keputusan yang diambil manajemen sekolah dalam konteks pelibatan masyarakat, dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus komite sekolah.
- 5) Memberikan kesempatan kepada komite sekolah untuk mencari dana, mitra dan berbagai kepentingan sekolah.⁴⁹

Dengan demikian, posisi masyarakat harus dilibatkan secara aktif sehingga masyarakat memiliki kepedulian dengan dunia pendidikan khususnya sekolah di mana masyarakat itu sebagai pengguna jasanya. Hal ini perlu dipelihara agar kepedulian itu dapat dimanfaatkan sekolah dalam memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah.

Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan dapat berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat *top-down*, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang *bottom-up*, tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Thoha, sebagaimana dikutip Mulyasa, menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga kelompok, yaitu partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, partisipasi mobilisasi, dan partisipasi seremoni.⁵⁰ Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari cakupannya. Partisipasi secara sempit dan partisipasi secara luas. Secara luas, partisipasi dapat diartikan sebagai demokratisasi politik. Di dalamnya masyarakat menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan. Secara sempit partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri.

⁴⁹ Amiruddin Siahaan, dkk., *Manajemen...*, hlm. 128-129.

⁵⁰ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala...*, hlm. 170-171.

Menurut E. Mulyasa, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menggalang partisipasi masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Misalnya, bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar nasional dan keagamaan, serta pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan Sekolah.
- 2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figur masyarakat (Kyai), olahragawan, seniman, informal *leader*, psikolog dan lain sebagainya.
- 3) Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minat mereka.
- 4) Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.⁵¹

Pendekatan tersebut merupakan aplikasi riil dari manajemen masyarakat, manajemen lingkungan, atau manajemen hubungan lembaga dengan masyarakat. Intinya, bagaimana masyarakat di sekitar lembaga pendidikan dan masyarakat yang lebih luas lagi dapat percaya sehingga mereka mendukung dan membantu pelaksanaan pendidikan.⁵² Atau dapat diartikan bahwa pendekatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kebutuhan sekolah atau melibatkan tokoh masyarakat dalam program pembangunan sekolah.

⁵¹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala...*, hlm. 173-174.

⁵² Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Malang: Erlangga, 2007), hlm.188.

Kementerian Pendidikan Nasional memberikan acuan pada lembaga pendidikan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat, sekolah dapat:

- 1) Melaksanakan program-program kemasyarakatan misalnya kebersihan lingkungan.
- 2) Mengadakan *open house* yang memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah perlu menonjolkan program-program yang menarik minat masyarakat.
- 3) Mengadakan buletin sekolah, majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- 4) Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang tinggal di sekitar sekolah atau orang tua murid untuk menjadi pembicara atau pembina program kesehatan sekolah.
- 5) Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat misalnya dalam perayaan hari nasional dan keagamaan.⁵³

Secara lebih operasional, kepala sekolah dapat menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah, rapat bersama, konsultasi, radio dan televisi, surat dan telepon, pameran sekolah, serta ceramah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi, prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif.

⁵³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala...*, hlm. 174-175.

Menurut Schreens bahwa keterlibatan orang tua merupakan stimulus eksternal yang memainkan peranan penting bagi peningkatan pembelajaran di sekolah. orang tua dapat dianggap sebagai perwakilan para pemakai jasa pendidikan yang dapat mempengaruhi sekolah menjadi efektif. Keterlibatan orang tua dan masyarakat memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Sekolah senantiasa menjalin komunikasi yang harmonis dengan orang tua dan berusaha melibatkan mereka dalam pelaksanaan program-program sekolah;
- 2) Prosedur-prosedur pelibatan orang tua peserta didik dalam kegiatan sekolah disampaikan secara jelas dan dilaksanakan secara konsisten;
- 3) Orang tua peserta didik memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah guna mengobservasi program pendidikan dan pembelajaran;
- 4) Pada pertemuan antara orang tua dengan sekolah, tingkat kehadiran orang tua peserta didik sangat tinggi;
- 5) Ada kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua peserta didik yang berkaitan dengan pemantauan pekerjaan rumah;
- 6) Orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan-keputusan sekolah;
- 7) Para guru sering berkomunikasi dengan orang tua peserta didik mengenai kemajuan peserta didik dan menunjukkan bidang-bidang keunggulan dan kelemahannya;
- 8) Sebagian besar orang tua peserta didik memahami dan ikut mempromosikan program pembelajaran sekolah;
- 9) Masyarakat melalui komite sekolah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan aturan.⁵⁴

Jadi, pelibatan orang tua dan masyarakat perlu diperdayakan secara optimal untuk memberikan dukungan terhadap program sekolah sebagaimana yang dijelaskan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, pemberdayaan masyarakat dalam rangka

⁵⁴ Mulyasa. *Manajemen...*, hlm. 76-77.

meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah diwadahi oleh komite sekolah yang sifatnya mandiri dan tidak mempunyai hubungan dengan lembaga pemerintahan.

2. Pengembangan Madrasah

a. Pengertian Pengembangan Madrasah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan islam yang berkembang subur di kalangan umat Islam termasuk di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia memerlukan manajemen mutu. Selama masa orde baru banyak pakar menilai bahwa kelemahan dalam penyelenggara pendidikan nasional, antara lain: pertama, kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik, mengabaikan keragaman realitas kondisi social, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kedua, penyelenggara pendidikan nasional lebih berorientasi kepada pencapaian target-target tertentu, seperti target kurikulum, mengabaikan proses mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh tanah dan potensi peserta didik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Dalam Bab III Pasal 4 Ayat 6 UUSPN, mengamanatkan agar pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Undang-Undang tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan kebutuhan untuk mengatur model sistem pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan lebih lanjut diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Pasal 3 PP tersebut dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang

bermutu. Para ahli telah memberikan kontribusi pemikiran terhadap regulasi pendidikan desentralistik dan otonomi. Kajian tentang otonomi daerah, manajemen berbasis madrasah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan mestinya melahirkan lembaga pendidikan yang maju dan mandiri. Investasi jangka panjang yang paling potensial untuk mendapat perhatian yaitu sektor pendidikan. Madrasah secara teoretis dikaji melalui pengembangan teori pendidikan Islam. Mutu madrasah di Indonesia diukur dengan standar nasional yang menggunakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) madrasah. Madrasah agar dapat berkembang dalam era persaingan global, perlu dikelola dengan baik melalui penerapan teori-teori manajemen mutu. Kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mendorong masyarakat Muslim untuk mewujudkan cita-citanya melalui proses pendidikan Islam yang bermutu.

Pendidikan Islam sebagai sebuah proses yang berlangsung cepat dan dinamis termasuk yang paling banyak menghadapi problematika. Masalah pokok yang dihadapi oleh madrasah adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kemampuan manajerial kepala madrasah, mencakup: kurang mampu mengembangkan inovasi pendidikan, kurang menguasai prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis madrasah, kurang mampu mendayagunakan sumber daya, lemahnya sistem administrasi dan keuangan, serta kurangnya monitoring dan evaluasi capaian hasil pendidikan.
- 2) Rendahnya kualitas tenaga pengajar mencakup: guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (*75% mismatch*), guru kurang menguasai materi, guru kurang menguasai metodologi pengajaran yang efektif, kurang menguasai media dan alat pembelajaran, guru kurang mengakses buku-buku dan pengetahuan baru, guru kurang mampu mengoperasikan computer sebagai alat pendukung tugas pokok dan fungsi guru, dan rendahnya insentif.
- 3) Rendahnya dukungan masyarakat, mencakup: kurang partisipasi masyarakat dalam program peningkatan mutu pendidikan madrasah,

belum fungsionalnya komite madrasah, lemahnya tingkat ekonomi masyarakat pengguna madrasah.⁵⁵

Permasalahan lain yang timbul dalam sistem pendidikan Islam berupa madrasah, yaitu :

- 1) Aspek komponen madrasah, meliputi: visi, misi, dan tujuan yang tidak memiliki fokus, kualifikasi dan kompetensi guru yang belum standar, tenaga kependidikan kurang memiliki *skill* dalam tugas pokok dan fungsinya, input siswa yang heterogen, kurikulum yang tumpang tindih dan mengulang-ulang, metode dan strategi pembelajaran yang monoton sehingga membosankan guru dan siswa, sarana dan prasarana belajar yang tidak mencukupi kebutuhan, lingkungan belajar kurang kondusif, evaluasi hasil pembelajaran yang masih kognitif *oriented*, lulusan yang tidak siap pakai.
- 2) Aspek politik pendidikan, meliputi: kebijakan yang tidak adil, anggaran pendidikan belum menjadi prioritas, daya saing bangsa masih lemah, serta menjamurnya lembaga pendidikan yang tidak memerhatikan standar mutu.
- 3) Aspek manajemen pendidikan, meliputi: perencanaan tidak berbasis data dan standar mutu, pengorganisasian sumber daya yang tidak optimal, pelaksanaan program tidak berdasarkan rencana strategis, dan pengawasa mutu tidak berkelanjutan.
- 4) Aspek IPTEKS, meliputi: pemanfaatan jaringan teknologi informasi sangat sederhana, hasil-hasil penelitian kurang di publikasikan dengan baik.⁵⁶

Permasalahan di atas merupakan kegagalan sistem yang memerlukan perubahan kebijakan dengan implikasi manajemennya adalah hal tersebut harus dihilangkan dan sistem serta prosedurnya harus disusun, ditetapkan dan dikembangkan kembali. Selain kegagalan sistem, sebab-sebab kegagalan yang lainnya adalah prosedur dan aturan yang

⁵⁵ Kementerian Agama RI., *Desain Pengembangan Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 18.

⁵⁶ Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 52-53.

tidak diikuti dan ditaati serta adanya kegagalan komunikasi dan kesalahpahaman di dalam interen madrasah. Kepala madrasah sebagai pimpinan tertinggi di madrasah harus dapat mengatasi berbagai persoalan di atas dengan menciptakan budaya mutu di lingkungan sekolahnya. Budaya mutu ini merupakan pondasi yang sangat mendasar dalam upaya menjalankan roda sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sedangkan pada sebagian madrasah swasta masih sangat tergantung pada uluran dana dari Kementerian Agama, tapi secara keseluruhan madrasah swasta telah mandiri dan tidak bergantung pada dana kemenag. Justru dengan adanya program sekolah gratis, keberadaan madrasah swasta semakin tergantung dengan dana BOS dari pemerintah. Program sekolah gratis telah menghipnotis masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa semua sekolah harus gratis. Sementara dana BOS yang ada kurang bisa memenuhi dana penyelenggaraan pendidikan. Inilah program yang dianggap telah menurunkan tingkat kemandirian madrasah maupun sekolah swasta.

b. Kebijakan Pengembangan Madrasah

Dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tertuang pada RPJMN disebutkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan beragama khususnya dalam pendidikan Islam, yaitu: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, antara lain melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan yang bermutu, perintisan pendidikan berbasis keagamaan bertaraf internasional, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama, peningkatan Ma'had Aly pada pondok pesantren, peningkatan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren, peningkatan layanan pendidikan nonformal dan vokasional pada pondok pesantren, peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah, peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam RPJMN tersebut didukung melalui kebijakan dengan fokus prioritas yakni peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui: (a) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b) pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (d) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) konsolidasi sistem informasi dan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat *monitoring*, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.

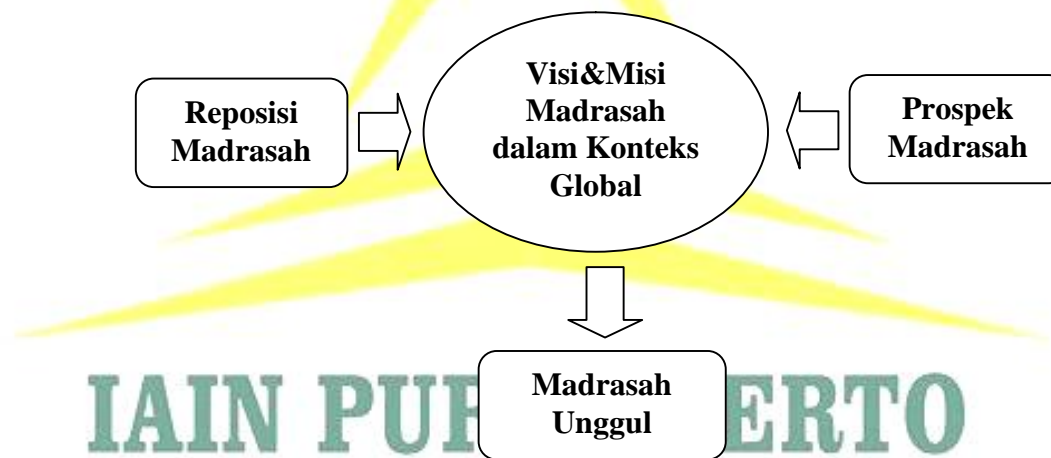
Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014. Khususnya peningkatan akses dan mutu Madrasah yakni Keluaran (*outputs*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan Madrasah.
- 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan Madrasah.
- 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Madrasah.
- 4) Meningkatnya mutu tata kelola Madrasah.

Keluaran (*outputs*) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana Madrasah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

c. Arah dan Kerangka Pengembangan Madrasah

Pendidikan Madrasah dikembangkan dengan mengacu pada visi dan misi yang berlandaskan pada prinsip, yakni: (1) nilai-nilai normatif, religius, filosofis yang diyakini kebenarannya; (2) lingkungan strategis; (3) sejumlah isu strategis bangsa. Menurut Tilaar konseptual dan prospek dalam pengembangan madrasah memasuki era global sebagai berikut.⁵⁷



Gambar 1. Kerangka Konseptual Reposisi dan Reaktualisasi Madrasah

Sedangkan untuk landasan dalam mengembangkan visi dan misi madrasah, sebagai berikut:

- 1) Visi makro Madrasah, yakni “terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-

⁵⁷ Konsep dari Tilaar tersebut telah dimodifikasi oleh penulis. Lihat lebih jelas pada buku HAR. Tilaar, *Paradigma...*, hlm. 166.

amaliah, terampil dan profesional”. Sedangkan visi mikro, yakni “terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-diniyah, terampil, dan profesional sesuai tatanan kehidupan.

- 2) Misi Madrasah, yakni; (1) menciptakan calon agamawan yang berilmu, (2) menciptakan calon ilmuwan yang beragama, (3) menciptakan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis.

Selain itu, bahwa prinsip fleksibilitas harus diterapkan pada madrasah dengan prinsip komprehensif, yakni dapat memberikan kemampuan akademik untuk studi lanjutan dan sekaligus layanan ketrampilan untuk memasuki dunia kerja, sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Dalam model ini, dapat diterapkan dengan adanya kelompok mata pelajaran pokok yang wajib ditempuh oleh peserta didik, dan ada kelompok mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dengan cara seperti ini, maka peserta didik dapat mengemas mata pelajaran pilihan yang akan ditempuhnya sesuai dengan antisipasi peran dan studi lanjutan setelah mereka lulus.

Dalam tataran praksis pada pendidikan madrasah, ada beberapa prinsip dasar yang akan menjadi acuan dalam pengembangan madrasah, antara lain:

- 1) Membangun prinsip kesetaraan, yakni antara sektor pendidikan Madrasah dengan sektor pendidikan di luar Madrasah, dan dengan sektor-sektor lainnya.
- 2) Prinsip perencanaan pendidikan, yakni dituntut cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakatnya.
- 3) Prinsip rekonstruksionis, yakni bahwa pendidikan madrasah mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan lebih berorientasi masa depan dengan berpijak pada kondisi sekarang.
- 4) Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik, yakni dalam pelayanan pendidikan mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik baik secara umum maupun spesifik.

- 5) Prinsip pendidikan multibudaya, yakni sistem pendidikan harus mampu memahami masyarakat yang bersifat plural.
- 6) Prinsip pendidikan global, yakni mampu berperan dalam menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global.

Sedangkan konsep perkembangan Madrasah dikembangkan memakai teori *social-reconstructivism*⁵⁸ dengan filosofi kebijakan sosial (*social-policy*) untuk menggantikan filosofi kebijakan publik (*public policy*). Landasan filosofis kebijakan sosial berangkat dari pengakuan bahwa siapa pun memiliki hak dalam bidang dan tingkat kewenangan masing-masing untuk menentukan arah dan mutu yang dikehendaki.

d. Strategi Pengembangan Madrasah

Mengingat banyaknya jumlah persoalan yang dihadapi dalam pengembangan madrasah secara nasional yang jelas dan memiliki komitmen tinggi terhadap aspirasi yang terus berkembang dan berubah secara sangat cepat. Karena itu di samping kejelasan rancangan, rencana pengembangan juga harus lentur terhadap kemungkinan perubahan situasi dan kondisi. Dalam kaitan ini, kearifan rekayasa bagi kegiatan yang tepat sasaran, merupakan persyaratan personil yang terlibat dalam manajemen baik pada tingkat nasional maupun regional. Untuk itu, ada beberapa hal yang menjadi dasar strategi pengembangan madrasah, sebagai berikut:

- 1) Menjadikan ajaran agama Islam sebagai *basic references* seluruh kegiatan pengembangan pendidikan di madrasah.

Ajaran Islam merupakan fondasi dari seluruh aktivitas kehidupan manusia muslim, karena itu proporsional manakala setiap kegiatan pendidikan di madrasah memakai rujukan utama Al-Qur'an, baik pada tingkat literal maupun konseptual. Hal ini penting lantaran

⁵⁸ Teori rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berfikir kritis dan sejenisnya. Tujuannya untuk peradaban manusia masa depan. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Count dan Harold Rugg pada tahun 1930, ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Pola berfikir yang ditawarkan yakni pemakaian *problem solving* dengan penyelesaian problema sosial yang signifikan. berfikir tentang tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang, penciptaan agen perubahan melalui partisipasi langsung dalam unsur-unsur kehidupan, pendidikan berdasar fakta, *learn by doing* (belajar sambil bertindak). Lihat Zuhairi, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 29-30.

hasil pengembangan kehidupan masyarakat yang Islami. Dalam tataran yang lebih makro, pendidikan di madrasah harus menghasilkan lulusan yang memiliki kedudukan sentral dalam memberi warna kehidupan masyarakat sekitarnya. Bertolak dari cara pandang ini maka pembangunan madrasah di Indonesia harus mengacu kepada ajaran Islam dalam berbagai segi dan kegiatannya. Pada dataran manajemen madrasah tingkat nasional hal ini bermula dari perencanaan pengembangan sejalan sejalan penyusunan falsafah dasar sampai terakhir dalam bentuk rencana detail pengembangan tiap komponen pembangunan madrasah. Sementara pada dataran tingkat lokal, warna seluruh implementasinya terletak sejak perencanaan kurikulum, rekrutmen murid dan guru, proses belajar mengajar dan penarikan sumber daya pendidik dari aktivitas pendidikan.⁵⁹

- 2) Madrasah sebagai lembaga pendidikan umum yang berciri khas agama Islam, berfungsi sebagai pengembang dasar-dasar keterampilan multidimensi.

Hal ini lantaran pendidikan pada madrasah pada dasarnya merupakan subsistem dari pendidikan umum yang sederajat. Pendidikan pada madrasah memiliki fungsi yang sama dengan pendidikan umum lainnya yakni untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Demikian juga halnya dengan tujuan pada pendidikan madrasah. Ia terikat pada tujuan pendidikan nasional, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” Sejalan dengan

⁵⁹ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan* (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa 2000), hlm. 128-129.

semakin terverisifikasi jenis-jenis keterampilan pembangunan yang diperlukan, maka pengembangan dasar keilmuan dan penguasaan keterampilan profesional tingkat menengah pun (dalam hal ini pendidikan di madrasah) perlu pengembangan ke segala sektor kehidupan. Sudah barang tentu hal ini dengan memperhitungkan kondisi daerah, kecenderungan penyediaan sumber daya alam, keterbukaan peluang sektor-sektor profesi kehidupan serta ketersediaan sumber daya manusianya.⁶⁰

3) Pengembangan secara bertahap.

Pengembangan madrasah baik negeri maupun swasta ke arah yang menjadi visi rencana pengembangan harus dilakukan secara bertahap. Pentahapan dalam pengembangan dimaksudkan supaya dalam kegiatan yang sifatnya *ad-hock* terhindari, sebab kegiatan demikian akan mengakibatkan program antar periode jabatan pejabat jadi tidak dalam satu kesatuan yang menyeluruh, sehingga pengembangan tidak pernah selesai dan diketahui hasilnya secara jelas. Melalui pengembangan secara bertahap, diharapkan kompleksitas permasalahan dapat dikurangi serta berbagai intervensi atas kegiatan pembinaan, lantaran aspirasi yang berubah terlalu cepat dan meloncat-loncat.

Dengan melihat permasalahan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam pengembangan madrasah secara nasional sangat diperlukan antara lain adanya peningkatan keterampilan manajemen dan kesadaran fungsi masing-masing bagian pengelola madrasah secara keseluruhan, diperlukan pengadaan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan baik fasilitas fisik maupun fasilitas non fisik (seperti perangkat supervisi guru), pengadaan dan peningkatan mutu staf pengajar, pengadaan dan peningkatan mutu staf tata usaha, rangsangan kegiatan siswa serta pembinaan lulusan-lulusan.⁶¹

⁶⁰ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan...*, hlm. 129.

⁶¹ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan...*

Dengan melihat permasalahan di atas, maka tahapan-tahapan pengembangan madrasah setidaknya memerlukan empat tahapan yaitu:

- 1) Pemerataan kesadaran dan keterampilan manajemen pada tingkat pengelola dan pelaksanaan madrasah.
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan madrasah.
- 3) Pengadaan dan peningkatan mutu staf pengajar.
- 4) Pengadaan dan peningkatan mutu staf tata usaha.⁶²

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan dan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konstelasi tulisan ini, pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pengembangan. Untuk itu, maka pendidikan memerlukan SDM yang kompeten sebagai aset bagi proses pengembangan dan SDM yang kompeten tersebut dicapai melalui proses pengembangan. Dengan demikian, SDM menjadi bagian penting dalam pengembangan dan pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen saling yang saling terkait secara fungsional bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Setidaknya terdapat empat komponen utama dalam pendidikan, yaitu: SDM, dana, sarana, perasarana, dan kebijakan. Komponen SDM dapat dikatakan menjadi komponen strategis, karena dengan SDM berkualitas dapat mendayagunakan komponen lainnya, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pendidikan. Di mana SDM berkualitas dapat dicapai dengan pengembangan SDM.

Pengembangan adalah upaya meningkatkan sesuatu agar lebih bertambah baik. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan. Seperti dikemukakan Sikula:

Development in reference to staffing and personnel matters, is a long term educational process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personel learn conceptual and theoetical knowledge for general purposes. Training is a short

⁶² Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan...*, hlm. 130.

term educational process utilizing a systematic and organized procedure by which nonmanagerial personnel learn technical knowledge and skill for a definite purpose.⁶³

Hasibuan mengemukakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Menurut Bella, pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja, baik secara teknis maupun manajerial. Dimana, pendidikan berorientasi pada teori dan berlangsung lama, sedangkan latihan berorientasi pada praktek dengan waktu relatif singkat.⁶⁴

Dalam upaya pengembangan SDM hendaknya berdasarkan kepada prinsip peningkatan kualitas dan kemampuan kerja. Terdapat beberapa tujuan pengembangan SDM, di antaranya adalah: (1) meningkatkan kompetensi secara konseptual dan tehnikal; (2) meningkatkan produktivitas kerja; (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas; (4) meningkatkan status dan karier kerja; (5) meningkatkan pelayanan terhadap klient; (6) meningkatkan moral-etis; dan (7) meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan penuturan Hasibuan, terdapat dua jenis pengembangan SDM, yaitu: pengembangan SDM secara formal dan secara informal. *Pertama*, pengembangan SDM secara formal yaitu SDM yang ditugaskan oleh lembaga untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut maupun lembaga diklat. Pengembangan SDM secara formal dilakukan karena tuntutan tugas saat ini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, jenis pengembangan ini dapat memenuhi kebutuhan kompetensi SDM yang bersifat *empirical needs* dan *predictive needs* bagi eksistensi dan keberlanjutan lembaga. *Kedua*, pengembangan SDM secara informal,

⁶³ Andrew F. Sikula, *Personnel Administration and Human Resources Management* (New York: A. Wiley Trans Ed. By John Wiley & Sons Inc., 1981), hlm. 38.

⁶⁴ Malayu P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 69.

yaitu pengembangan kualitas SDM secara individual berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan tugasnya. Banyak cara yang dapat dilakukan SDM untuk meningkatkan kemampuannya, namun jenis pengembangan ini memerlukan motivasi intrinsik yang kuat dan kemampuan mengakses sumber-sumber informasi sebagai sumber belajar.⁶⁵

Terdapat lima domain penting dalam pengembangan SDM bidang pendidikan, yaitu: profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerjasama.⁶⁶ Dimilikinya kemampuan terhadap kelima domain tersebut merupakan modal utama bagi SDM dalam menghadapi masyarakat ilmu (*Knowledge Society*) yang dinamis. Asumsi yang mendasari pentingnya kelima domain tersebut adalah sebagai berikut.

1) Profesionalitas

Profesionalitas adalah tingkatan kualitas atau kemampuan yang dimiliki SDM dalam melaksanakan profesinya. Sedangkan profesionalisme adalah penyikapian terhadap profesi dan profesionalitas yang dimilikinya. SDM yang profesional adalah mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan melalui proses pendidikan dan latihan. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan teknik dan kemampuan konseptual dalam memberikan layanan formal sesuai dengan profesi dan keahliannya. Berdasarkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka masyarakat akan mengakui dan menghargainya. Dengan kata lain, penghargaan dan pengakuan masyarakat bergantung kepada keprofesionalan SDM.

Pengakuan masyarakat terhadap suatu profesi bersifat merit, sehingga menuntut SDM yang berkualitas. SDM bidang pendidikan, mereka bekerja dalam suatu masyarakat profesional (*profesional community*) yang menuntut kejujuran profesional agar dapat

⁶⁵ Malayu Hasibuan S. P, *Manajemen...*, hlm. 72-73.

⁶⁶ Malayu Hasibuan S. P, *Manajemen...*, hlm. 74-77.

memberikan layanan profesi sesuai dengan harapan masyarakat. Namun demikian, kejujuran profesional perlu disikapi dengan upaya meningkatkan profesionalitas. Untuk itu, pengembangan SDM ke arah profesional merupakan langkah strategis. SDM yang melaksanakan profesinya berlandaskan profesionalisme memiliki kemampuan untuk menyelaraskan kemampuan dirinya dengan visi dan misi lembaga. Artinya, SDM tersebut akan mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada dan mendayagunakannya dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan manfaat dan mengakui keberadaannya.

2) Daya Kompetitif

SDM yang memiliki daya kompetitif adalah mereka yang memiliki kemampuan ikut serta dalam persaingan. Apabila kita memandang bahwa melaksanakan tugas adalah suatu persaingan, maka SDM yang memiliki daya kompetitif adalah mereka yang dapat berfikir kreatif dan produktif. SDM yang berfikir kreatif dapat bersaing dan dapat memunculkan kreasi-kreasi baru. Berfikir kreatif dilandasi dengan kemampuan berfikir eksponensial dan mengeksplorasi berbagai komponen secara tekun dan ulet hingga menghasilkan suatu inovasi.

SDM yang inovatif tidak hanya terbatas pada kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, melainkan kemampuan mencari dan menggunakan cara baru dalam menyelesaikan tugasnya tersebut. Sikap tekun dan ulet dalam melaksanakan tugas hanya dapat menghasilkan prestasi temporer, sedangkan tekun dan ulet dalam berfikir kreatif akan menghasilkan prestasi berkelanjutan.

Salah satu sifat SDM yang inovatif adalah mereka yang tidak merasa puas dengan apa yang telah dikerjakan dan dihasilkannya, melainkan merasa penasaran atas kinerjanya. SDM yang inovatif hanya dapat dihasilkan melalui proses pengembangan kemampuan

berfikir kreatif. Artinya, SDM yang memiliki daya kompetitif harus memiliki kecerdasan intelektual agar dapat memiliki banyak alternatif dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat.

3) Kompetensi fungsional

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk melaksanakan profesinya. Sesungguhnya kompetensi tersebut merupakan suatu sistem pengetahuan yang terdiri atas pengetahuan konseptual, pengetahuan teknik, pengetahuan menyeleksi, dan pengetahuan memanfaatkan. Apabila seluruh pengetahuan tersebut diaktualisasikan secara simultan, maka manfaatnya dapat dirasakan baik oleh yang bersangkutan maupun oleh masyarakat.

Kompetensi pada tiga tataran pertama, yaitu kemampuan: konseptual, teknik, dan memutuskan merupakan kompetensi potensial. Kompetensi pada tataran aplikasi tepat waktu dan tepat sasaran, itulah kompetensi fungsional. Kompetensi fungsional akan menunjukkan efektivitasnya manakala SDM memiliki motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berkaitan erat dengan etos kerja, sedangkan motivasi ekstrinsik dapat berasal dari rekan kerja, lembaga, dan masyarakat.

SDM yang memiliki kompetensi fungsional adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam mendayagunakan potensi diri (kompetensi potensial) yang disumbangkan (kemampuan mengaplikasikan secara tepat) dalam melaksanakan tugas atau profesinya. Untuk itu, pengembangan SDM bidang pendidikan dengan memberikan motivasi merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih. Motivasi tersebut mungkin berupa posisi atau *salary*. Menurut Tilaar, pengembangan SDM selain meningkatkan kemampuan profesional juga meningkatkan posisi dan pendapatan.

4) Keunggulan partisipatif

SDM unggul adalah SDM berkualitas yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka dapat

mengembangkan potensi diri dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin. Dengan kemampuannya tersebut, SDM yang unggul dapat mencapai prestasi untuk kemajuan dirinya, lembaga, bangsa dan negara. Mereka yang memiliki keunggulan dapat *survive* dalam kehidupan yang kompetitif, karena mereka memiliki banyak pilihan dan kecerdasan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Terdapat dua jenis SDM unggul, yaitu: keunggulan individualistik dan keunggulan partisipatoris. SDM unggul secara individualistik adalah mereka yang memanfaatkan kemampuan dirinya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat berbahaya, karena SDM yang unggul individualistik dapat melahirkan manusia tipe *homo homini lupus*. Sedangkan SDM unggul secara partisipatoris adalah mereka yang memiliki keunggulan dalam mengembangkan potensi diri untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan, baik yang bersifat kompetitif maupun kooperatif dan solidaritas sosial. Dengan demikian, pengembangan SDM bidang pendidikan adalah upaya peningkatan kualitas SDM yang unggul partisipatoris. Untuk itu, sangat penting kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dikembangkan secara terintegratif, karena akan menjadi kekuatan sinergis dalam melaksanakan tugas.

5) Kerja Sama

Kemampuan kerja sama (*teamwork*) sangat penting di era globalisasi, karena dengan kemampuan tersebut akan menjadi kekuatan potensial bagi suatu organisasi atau institusi. Sesungguhnya, era globalisasi bersifat potensial yang menuntut kemampuan menyeleksi dan mendayagunakannya agar teraktualisasikan hingga bernilai guna. Salah satu upaya mengatualisasikan potensi tersebut adalah melalui kerja sama. Namun demikian, aspek penting dalam proses seleksi dan memanfaatkan potensi tersebut adalah kemampuan menyelaraskannya dengan nilai-nilai indigeneous. Pada tataran praktis operasional, SDM yang memiliki nilai-nilai indigeneous

tersebut adalah memahami visi dan misi lembaga, serta merefleksikannya dalam pelaksanaan tugas.

SDM yang memiliki kemampuan kerjasama harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerjasama (*network*). Pentingnya jaringan kerjasama dan kerjasama menjadi katalisator bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja. Kemampuan yang dibutuhkan dalam kerjasama adalah mengembangkan kemampuan untuk mengintegrasikan kemampuan diri dengan kemampuan mitra kerja terhadap orientasi kerjasama. Untuk itu, pengembangan pada aspek dedikasi, disiplin, dan kejujuran sangat mutlak dalam suatu kerjasama, termasuk jujur terhadap kemampuan diri.

Pengembangan SDM pada lima domain tersebut merupakan upaya mewujudkan SDM berkualitas untuk mempersiapkan masyarakat dan bangsa dalam menghadapi transformasi sosial yang kompetitif. Di mana pendidikan dan latihan menjadi wahana efektif bagi terwujudnya SDM berkualitas tersebut. Namun demikian, disinyalir banyak pihak bahwa pada tataran empiris, SDM yang telah melalui proses pendidikan dan latihan belum signifikan peningkatan kualitasnya. Untuk itu, terhadap pengembangan SDM pada kelima domain di atas, masih diperlukan upaya pengendalian mutu terpadu atau *total quality control* (TQC) dari pihak yang memiliki wewenang, pada lembaga di mana SDM bertugas. Selain itu, pendidikan dan latihan sebagai wahana pengembangan SDM diperlukan suatu program diklat terpadu agar tercapai efektivitasnya.

Pengembangan SDM bidang pendidikan hendaknya tidak hanya sebatas pada peningkatan kemampuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam mengikuti perubahan, melainkan lebih jauh ke depan adalah kemampuan mempersiapkan insan inovator bagi perubahan. SDM yang memiliki kemampuan tersebut menjadi aset strategis dalam merealisasikan peran pendidikan sebagai *agent of innovation* dan *agent of changes*. Selain itu, dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki daya

kompetitif yang tidak meninggalkan nilai-nilai *indigeneous*, sehingga mampu menunjukkan jati diri yang bermoral-etis dan identitas lembaga pada percaturan global.

f. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas dan media pengajaran. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman.⁶⁷ Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah. Manajemen perlengkapan sekolah dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien.⁶⁸

Berdasarkan pengertian sarana dan prasarana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana merupakan komponen dalam proses pembelajaran yang mendukung potensi masing-masing peserta didik di setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Pengertian sarana pendidikan itu sendiri adalah segala peralatan atau barang baik bergerak ataupun tidak yang digunakan secara langsung untuk proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah semua perangkat yang tidak secara langsung digunakan untuk proses pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan yang harus tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan serta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan lembaga pendidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu:

- 1) Prinsip pencapaian tujuan: Manajemen sarana dan prasarana dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan dapat dikatakan berhasil, apabila sarana dan prasarana/fasilitas itu selalu siap pakai setiap saat.

⁶⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis...*, hlm. 49.

⁶⁸ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. 2, hlm. 2.

- 2) Prinsip efisiensi: Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga memperoleh fasilitas yang baik dengan relatif murah, pemakaiannya dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaannya.
- 3) Prinsip administratif: Pengelolaan fasilitas pendidikan hendaknya memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah.
- 4) Prinsip kejelasan tanggungjawab: Pengelolaan fasilitas pendidikan perlu adanya pengorganisasian (pembagian) kerja, serta semua tugas dan tanggungjawab semua personel dideskripsikan dengan jelas.
- 5) Prinsip kekohesifan: Pengelolaan fasilitas harus direalisasikan dengan proses kerja lembaga yang kompak, serta adanya kerja sama antara personil yang satu dengan personil yang lainnya.⁶⁹

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi: tujuan, efisiensi, administratif, kekohesifan dan tanggungjawab.

B. Penelitian Terkait

Dalam hal ini, penulis juga mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian tesis ini, yaitu:

Pertama, Tesis Program Pascasarjana UIN Malang yang diteliti oleh Nur Jihad berjudul: “Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendidikan Islam (Studi Multisitus SMPN 1 Taliwang dan MTsN 1 Taliwang Sumbawa Barat)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen partisipasi masyarakat dalam program pendidikan Islam. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis multisitus, dengan hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah sangat tinggi dalam komponen tertentu, sehingga disimpulkan bahwa dukungan atau partisipasi masyarakat hanya berupa materi (iuran SPP) dan non materi (dukungan moril, pengawasan, komitmen bersama dan kerjasama) sudah

⁶⁹ Ibrahim Bafadal, *Manajemen...*, hlm. 5-6.

mendekati maksimal, sedangkan dukungan yang berupa sumbangan ide, saran dan pemikiran untuk pengembangan program pendidikan belum maksimal.⁷⁰

Kedua, Tesis Program Pascasarjana UIN Malang yang diteliti oleh Moh. Rifa'i berjudul: "Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus M.A T.M.I Al-Amien Prenduan Sumenep)". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dari temuannya adalah dalam meningkatkan mutu pendidikan lembaga MA T.M.I melakukan program pemberdayaan lewat humas pusat Yayasan Al-Amien Prenduan (YPA) dengan menggunakan pendekatan *educational* dan *missionary* serta tetap memperhatikan prinsip otoritas, kesederhanaan, kejujuran dan ketepatan terhadap masyarakat secara totalitas yang diwadahi dengan berbagai bentuk paguyuban yang diorganisir oleh masyarakat sendiri (pemberian wewenang, kepercayaan, dan pelibatan) dan fasilitas dengan berbagai program kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan.⁷¹

Ketiga, Tesis Program Pascasarjana UIN Malang yang diteliti oleh Moh. Ramli, berjudul: "Manajemen Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus MIN Malang I Jl. Bandung)". Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui manajemen partisipasi masyarakat di MIN Malang 1, upaya yang dilakukan madrasah dalam menggalang partisipasi masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasinya. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan perspektif emik dengan rancangan studi kasus. Temuan penelitiannya adalah dari hasil analisis data diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: (1) Manajemen yang dikembangkan oleh MIN Malang I sifatnya adalah manajemen terbuka (*Open Management*). Adapun manajemen yang dikembangkan dalam mengelola partisipasi masyarakat adalah manajemen partisipatif. (2) Upaya yang dilakukan

⁷⁰ Nur Jihad, "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendidikan Islam (Studi Multisitus SMPN 1 Taliwang dan MTsN 1 Taliwang Sumbawa Barat)" (*Tesis Program Pascasarjana UIN Malang*: tidak diterbitkan, 2010).

⁷¹ Moh. Rifa'i, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus M.A T.M.I Al-Amien Prenduan Sumenep)" (*Tesis Program Pascasarjana UIN Malang*: tidak diterbitkan, 2008).

oleh MIN Malang I dalam menggalang partisipasi masyarakat khususnya orang tua siswa adalah dengan cara: a) Pencitraan madrasah dari sisi kepegawaian, kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya; b) dengan cara silaturahmi, kegiatan yang ada di MIN Malang banyak yang dikemas dengan kegiatan silaturahmi. c). dengan cara menggunakan tokoh, d) dengan cara ajakan/himbauan. (3) Bentuk partisipasi masyarakat terhadap MIN Malang I ada yang berbentuk finansial/materi dan ada yang berbentuk ide-ide atau gagasan pemikiran serta terakhir adalah berbentuk do'a.⁷²

Keempat, Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, oleh Siti Aisyah, berjudul: “Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di MAN Pangkalan Balai Banyuasin”. Dalam tesis tersebut, menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan sekolahnya kurang terpelihara dengan baik dimana sekolah melaksanakan program pendidikannya sangat kurang melakukan komunikasi dengan masyarakatnya, sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu mengenai madrasah maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Permasalahan yang diteliti mengenai implementasi hubungan sekolah dengan masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya. Pada tesis penulis terdapat perbedaan yang terletak pada bentuk-bentuk partisipasi madrasah dan upaya apa saja yang dilakukan madrasah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan objek penelitiannya adalah di MAN 1 Palembang.⁷³

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian tesis ini, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Purwojati mulai dari bentuk-bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah, partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana,

⁷² Moh. Ramli, “Manajemen Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus MIN Malang I Jl. Bandung)” (Tesis Program Pascasarjana UIN Malang: tidak diterbitkan, 2008).

⁷³ Siti Aisyah, “Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di MAN Pangkalan Balai Banyuasin” (Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang: tidak diterbitkan, 2013).

SDM dan manajemen kelembagaannya. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga berarti memiliki kondisi dan perlakuan yang berbeda pula.

C. Kerangka Berpikir

Masyarakat diharapkan menggunakan potensi dan inisiatif mereka guna mencapai tingkat hidup lebih baik, maka masyarakat diberi kesempatan untuk mendapat pengalaman konkrit dan langsung dalam mengenali masalah sampai kepada penyusunan dan pengembangan program. Partisipasi dalam penelitian ini dijelaskan sebagai keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat, dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, membangun diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Karena itu partisipasi diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan pemerintah, *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan wirausaha secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahap pembangunan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* sampai kepada evaluasi serta perluasannya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi merupakan gerakan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Pembangunan yang partisipatif didasarkan pada kemitraan yang terbentuk melalui dialog di antara para pelaku (pemerintah, *stakeholder*, dan wirausaha) untuk menghasilkan agenda yang ditetapkan bersama. Secara sederhana partisipasi adalah merupakan alat untuk mewujudkan pengaruh individu/kelompok dalam bentuk inspirasi, atau pengetahuan yang mereka miliki, hendaknya diperhitungkan dan dihargai, dalam melahirkan rumusan atau penetapan kebijakan publik, sebagai upaya dalam pengembangan madrasah.

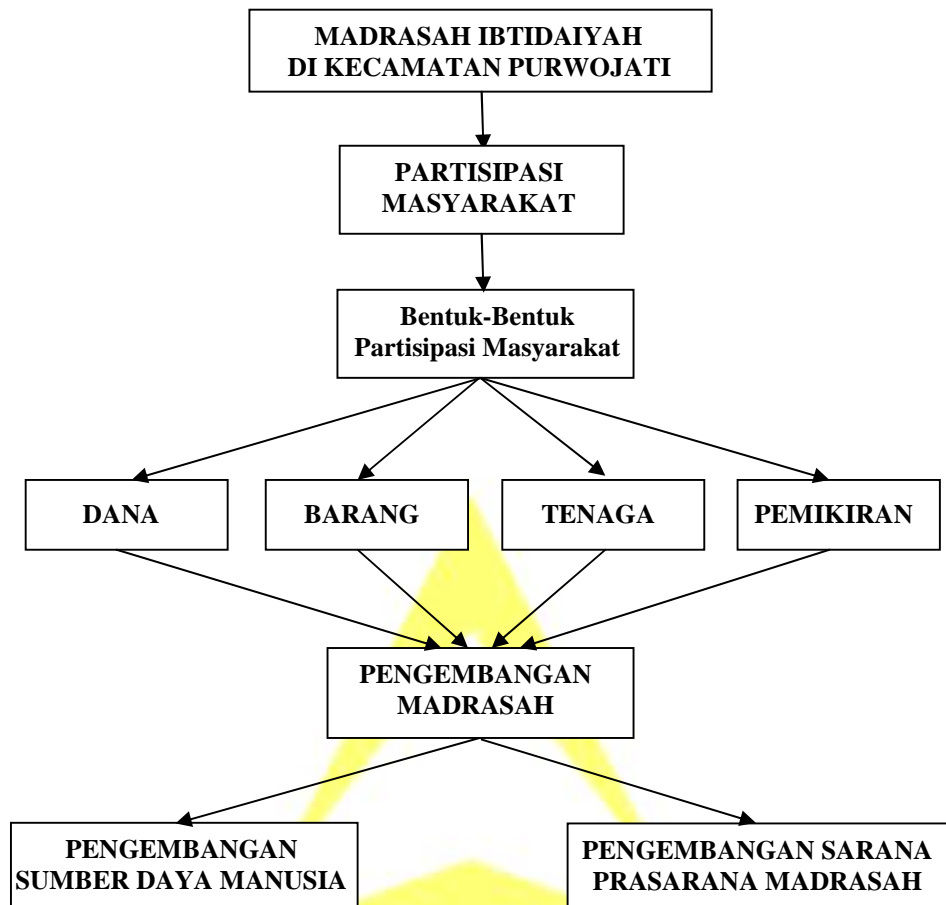
Dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat harus menjadi partner sekolah/madrasah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, kerjasama keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalam suasana yang demikian, sekolah/madrasah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja terdidik. Sebagai partner masyarakat, sekolah/madrasah akan dipengaruhi oleh corak pengalaman

seseorang di dalam lingkungan masyarakat, bahan bacaan, tontonan, dan kondisi sosial ekonomi. Madrasah juga harus bertanggung-jawab terhadap perubahan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, dan forum komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Di sisi lain, kesadaran peserta didik untuk mendayagunakan masyarakat sebagai sumber belajar dipengaruhi oleh kegiatan dan pengalaman belajar yang diikutinya di sekolah.

Hubungan dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program madrasah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan madrasah. Jadi, prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif.

Pengembangan madrasah sangat penting dilakukan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan madrasah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Agar pengembangan madrasah dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud yakni terdiri dari wali murid, masyarakat sekitar, pengusaha sekitar madrasah dan donatur madrasah, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan sebagainya. Wujud partisipasi masyarakat dapat berupa dana, barang, tenaga, dan pemikiran.

Untuk dapat melihat dan menggambarkan bagaimana kerangka berpikir serta mengetahui alur pemikiran dalam penelitian ini, maka kerangka berpikir yang mendasari penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Kerangka Berpikir

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, yang memiliki 3 (tiga) madrasah ibtidaiyah, yaitu MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul. MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi beralamat di Jalan Raya Purwojati-Ajibarang Desa Kaliwangi RT.04 RW. 02 Kecamatan Purwojati. MI Ma'arif NU 1 Kalitapen berada dekat dengan pusat pemerintahan desa dan terletak di jalan utama Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati. Sedangkan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul beralamat di RT. 04/RW.01 Desa Karangtalun Kecamatan Purwojati. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, tepatnya sejak bulan Februari 2017 sampai dengan Mei 2017.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, yang difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan sarana dan prasarana madrasah. Berdasarkan pada tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan melalui pengamatan yang intensif dan situasi yang wajar (*natural setting*). Pendekatan seperti ini selanjutnya dikenal dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Pendekatan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Karena data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Penelitian memberikan gambaran yang terperinci mengenai proses

atau urutan-urutan suatu kejadian.⁷⁴ Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) berlangsung dalam latar yang alamiah; (2) peneliti sendiri merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama; 3) analisis datanya dilakukan secara induktif.⁷⁵

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan landasan teori fenomenologi, yang bermakna bahwa terjadinya hubungan antara sekolah dengan masyarakat adalah merupakan suatu yang subyektif, dengan demikian sebuah lembaga pendidikan yang melaksanakan kebijakan untuk berhubungan dengan masyarakat merupakan kejadian disengaja oleh pihak sekolah untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya hubungan tersebut. Dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat merupakan bentuk kesadaran pihak sekolah yang merasakan kesulitan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tanpa bantuan dari masyarakat. Fenomena hubungan yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat merupakan fenomena sosial yang di dalamnya banyak terjadi interaksi-interaksi berbagai kepentingan yang saling berbenturan.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala alami. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berusaha menggambarkan situasi atau mengenai bidang tertentu.⁷⁶ Penelitian ini menggambarkan suatu kejadian atau penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, mulai dari bentuk-bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 140.

⁷⁶ Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu, dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian.⁷⁷

Subjek yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana madrasah.
2. Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana.
3. Wali siswa madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.
4. Tokoh masyarakat, dan pengusaha/donatur madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, yang difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 129.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang terjadi pada subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁸ Menginterview bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius, artinya bahwa interview dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi tidak kaku. Suasana ini penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara secara jujur. Oleh karena sulitnya pekerjaan ini, maka sebelum melaksanakan interview, pewawancara harus dilatih terlebih dahulu. Dengan latihan maka pewawancara mengetahui cara bagaimana dia harus memperkenalkan diri, bersikap, mengadakan langkah-langkah interview dan sebagainya.

Alasan dipilihnya metode interview ini, adalah karena dengan teknik ini, peneliti akan berhasil memperoleh data dari informan lebih banyak dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Untuk menjamin kelengkapan dan kebenaran data yang diperoleh melalui teknik ini, peneliti menggunakan alat perekam dan pencatat. Adapun isu pokok yang digali melalui wawancara adalah:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi responden terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 135.

Kecamatan Purwojati. Wawancara juga digunakan untuk mengecek data lain yang sudah lebih dahulu diperoleh. Wawancara secara mendalam memerlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur karena pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan sehingga kreatifitas peneliti sangat diperlukan karena hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih bergantung dari pewawancara.⁷⁹

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini kepala madrasah, waka madrasah, komite sekolah, orangtua siswa adalah orang yang paling esensial untuk dimintai keterangan atau informasi tentang permasalahan yang akan dikaji. Selain itu, informan lebih mengetahui berbagai informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah, karena terlibat secara langsung dalam proses pendidikan sehingga informasinya lebih akurat dan terpercaya.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung.⁸⁰ Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: (1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 22.

⁸⁰ Sutriano Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

instrumen pengamatan; dan (2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat.⁸¹

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat tujuan observasi dengan menentukan kesepakatan dengan sumber informasi tentang waktu, tempat, dan alat apa saja yang boleh digunakan dalam observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, dimulai dari:

- a. Observasi deskriptif secara luas dengan melukiskan secara umum situasi sosial yang terjadi pada madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.
- b. Observasi terfokus untuk menemukan kategori partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.
- c. Observasi selektif dengan memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.

Peneliti melaksanakan observasi untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah, sehingga memudahkan peneliti mengetahui secara langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk memperoleh informasi mengenai barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁸² Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh teori, konsep, preposisi, dan data lapangan. Data dimaksud kemudian dipilah dan dipilih, untuk kemudian diambil intisarinya dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesis yang dianjurkan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau badan

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 133.

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 131.

hukum yang diterima baik mendukung atau menolak hipotesis tersebut.⁸³ Adapun dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan kondisi lembaga sebagai lokasi penelitian, seperti profil madrasah, visi dan misi madrasah, data tenaga pendidik dan kependidikan, data siswa, data sarana dan prasarana, serta dokumen yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian. Data-data yang dihasilkan peneliti tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁸⁴ Analisis data pada penelitian ini dengan analisis data situs tunggal dan analisis lintas situs.

1. Analisis Data Situs Tunggal

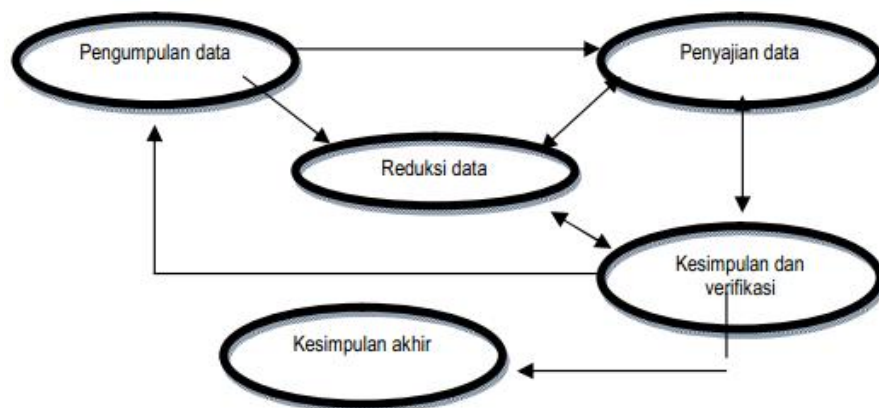
Analisis data situs tunggal dilakukan pada masing-masing objek penelitian, yaitu madrasah ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas sebanyak tiga madrasah, yaitu MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul. Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yang sudah terkumpul. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan teori analisis data dari Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama

⁸³ Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Semarang: IKIP Semarang, 1999). hlm. 96.

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 248.

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁸⁵

Analisis data berlangsung secara *stimulant* yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data model interaktif tersebut dapat dibayangkan sebagai berikut:



Gambar 3. Interaksi Data Kualitatif⁸⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi data, kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori.⁸⁷ Adapun kategori itu sebagai berikut: partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sarana prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo. Data yang sudah diperoleh disederhanakan dan diseleksi relevansinya dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang. Proses

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 247.

⁸⁶ Burhan Bungin (Eds), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 69.

⁸⁷ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 194.

ini berlanjut sampai proses pengumpulan data di lapangan berakhir, bahkan pada saat pembuatan laporan sehingga tersusun secara lengkap.

b. Penyajian Data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Adapun data yang akan disajikan adalah data yang menyajikan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sarana prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

c. Menarik Kesimpulan (verifikasi)

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat serta konsultasi dengan dosen pembimbing.

d. Kesimpulan Akhir

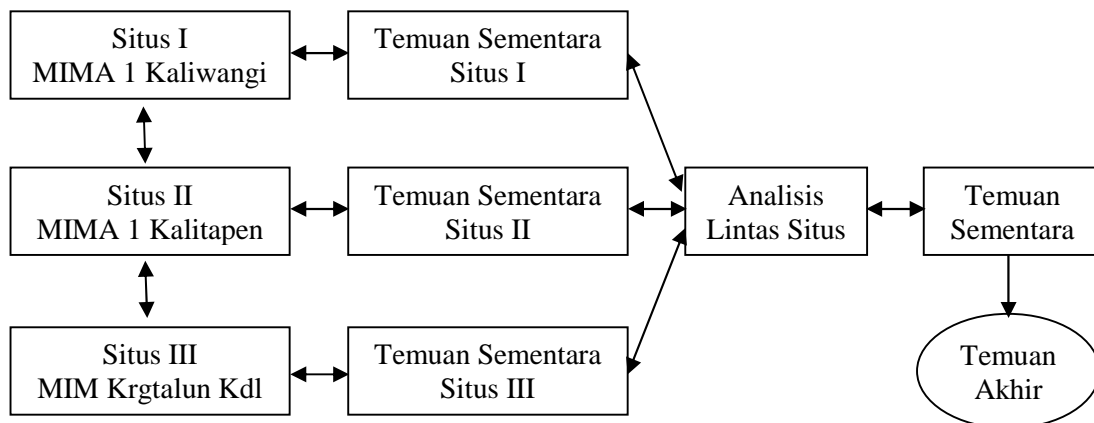
Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. Dan kesimpulan ini akan menjawab dari pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.

2. Analisis Data Lintas Situs

Analisis data lintas situs dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing situs, sekaligus sebagai

proses memadukan antar situs. Pada awalnya temuan yang diperoleh dari MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul disusun kategori dan tema, dianalisis secara induktif konseptual dan dibuat penjelasan naratif yang tersusun menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif I. Proposisi-proposisi dan teori substantif I selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan proposisi-proposisi dan teori substantif II (temuan dari MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul.). Perbandingan tersebut digunakan untuk menemukan perbedaan karakteristik dari masing-masing situs sebagai konsepsi teoritik berdasarkan perbedaan-perbedaan. Ketiga situs ini dijadikan temuan sementara. Pada tahap terakhir dilakukan analisis secara simultan untuk merekonstruksi dan menyusun konsepsi tentang persamaan situs I, situs II dan situs III secara sistematis. Pada proses inilah dilakukan analisis lintas situs antara situs I, situs II dan situs III dengan teknik yang sama. Analisis akhir ini dimaksudkan untuk menyusun konsepsi sistematis berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi teoritik yang bersifat naratif berupa proposisi-proposisi lintas situs yang selanjutnya dijadikan bahan untuk mengembangkan temuan teori substantif.

Secara umum proses analisis data lintas situs mencakup kegiatan sebagai berikut: (a) merumuskan proposisi berdasarkan temuan situs pertama dan kemudian dilanjutkan situs kedua dan ketiga; (b) membandingkan dan memadukan temuan teoritik sementara dari ketiga situs penelitian; (c) merumuskan simpulan teoritik berdasarkan analisis lintas situs sebagai temuan akhir dari ketiga situs penelitian. Kegiatan analisis data lintas situs dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 4. Kegiatan Analisis Data Lintas Situs

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Moleong menyebutkan ada empat kriteria, yaitu: (1) kredibilitas (validasi internal), (2) transferabilitas (validasi eksternal), (3) dependabilitas (reliabilitas), dan (4) konfirmabilitas (obyektivitas).⁸⁸

1. Kredibilitas (Validasi Internal)

Peneliti yang berperan sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif banyak berperan dalam menentukan dan menjustifikasikan data, sumber data, kesimpulan dan hal-hal penting lain yang memungkinkannya berprasangka atau membias. Untuk menghindari hal tersebut maka data yang diperoleh perlu diuji kredibilitasnya. Uji kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang diamati dan berhasil dikumpulkan sesuai fakta yang terjadi secara wajar di lapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria kebenaran yang bersifat *emic*, baik bagi pembaca maupun bagi subyek yang diteliti. Menurut Lincoln dan Guba bahwa untuk memperoleh data yang valid dapat

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 326.

ditempuh teknik pengecekan data melalui: (a) observasi yang dilakukan secara terus-menerus (*persistent observation*); (b) triangulasi (*triangulation*) sumber, metode dan peneliti lain; (c) pengecekan anggota (*number check*), diskusi teman sejawat (*peer reviewing*); dan (d) pengecekan kecukupan referensi (*referencial eduquacy check*) transferibilitas atau keterlibatan dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara “uraian rinci”.⁸⁹

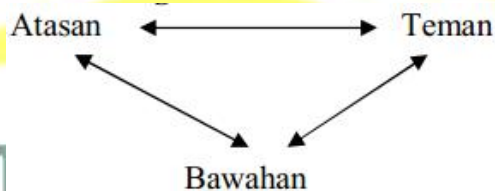
Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data dan pemanfaatan metode, serta *member check*. Dengan demikian dalam pengecekan keabsahan data mutlak diperlukan dalam penelitian kualitatif agar supaya data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap data. Verifikasi terhadap data tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Mengoreksi metode yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti telah melakukan cek ulang terhadap metode yang digunakan untuk menjaring data, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.
- b. Mengecek kembali hasil laporan penelitian yang berupa uraian data dan hasil interpretasi peneliti. Peneliti telah mengulang-ulang hasil laporan yang merupakan produk dari analisis data diteruskan dengan *cross check* terhadap subyek penelitian.
- c. Triangulasi untuk menjamin obyektifitas dalam memahami dan menerima informasi, sehingga hasil penelitian akan lebih obyektif dengan didukung *cross check* dengan demikian hasil dari penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

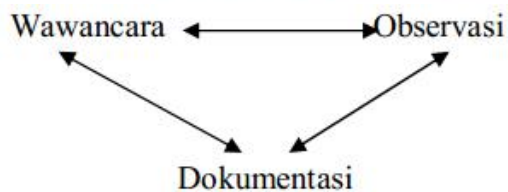
⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 289-331.

Dalam teknik triangulasi ada empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori.⁹⁰

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan untuk mencapai nilai kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat dan konsultasi dengan pembimbing. Adapun triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Misalnya dengan membandingkan kebenaran informasi tertentu yang diperoleh dari kepala sekolah dengan yang diperoleh wakil kepala sekolah, atau dari guru ke guru lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi. Misalnya dari metode observasi dibandingkan dengan *interview* kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan dengan informasi tersebut. Sedangkan diskusi teman dan pembimbing adalah mendiskusikan hasil temuan dengan teman sejawat dan pembimbing agar dapat dideskripsikan dan mudah dipahami oleh pembaca hasil penelitian ini. Perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 5. Triangulasi Sumber Data⁹¹



Gambar 6. Triangulasi Teknik/Metode Pengumpulan Data⁹²

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 324 & 330.

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 325.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 326.

2. Transferabilitas (Validasi Eksternal)

Standar *transferability* ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif sendiri, melainkan dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar *transferability* yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Dalam prakteknya peneliti meminta kepada beberapa rekan akademisi dan praktisi pendidikan mengenai arah hasil penelitian. Pada dasarnya penerapan keteralihan merupakan suatu upaya berupa uraian rinci, penggambaran konteks tempat penelitian, hasil yang ditemukan sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

3. Dependabilitas (Reliabilitas)

Pemeriksaan kualitas proses penelitian. Cara ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses penelitian yang dikerjakan oleh peneliti mulai dari mengkonseptualisasi penelitian, menjaring data penelitian, mengadakan interpretasi temuan-temuan penelitian hingga pada pelaporan hasil penelitian.

4. Konfirmabilitas (Obyektivitas)

Untuk menentukan kepastian data, peneliti mengkonfirmasi data dengan para informan dan/atau informan lain yang berkompeten. Konfirmabilitas ini dilakukan bersamaan dengan pengauditan dependabilitas. Perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil penelitian yang didukung oleh bahan-bahan yang tersedia, terutama berkaitan dengan deskripsi, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian. Mulai pengumpulan data sampai pada bentuk laporan yang sudah terstruktur dengan baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi

a. Sejarah Berdirinya

MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi berdiri pada tanggal 2 Januari 1969 di desa Kaliwangi kecamatan Purwojati kabupaten Banyumas, dan pada saat didirikan bernama Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan masa belajar 6 tahun. Sebelum didirikan, MI adalah sebuah Madrasah Diniyah (MADIN) yang berjalan mulai tahun 1950 sampai dengan 1968 yang bertempat di rumah bapak Hasan Umar. Adapun kegiatan belajar mengajar pada sore hari mulai jam 13.30 s/d 17.00 WIB. Setelah dihitung-hitung ternyata hal ini berjalan sampai 18 tahun, dengan tenaga pengajar seorang ulama besar dari desa Kalitapen yaitu Al Mukarom bapak Kyai H. Ali Mukhlas dengan di dampingi oleh penilik yaitu bapak Dahlan dari Ajibarang.

Pada akhir tahun 1968, tokoh masyarakat NU desa Kaliwangi bermusyawarah untuk mendirikan MWB (Madrasah Wajib Belajar) dan akhirnya pada tanggal 2 Januari 1969 berdirilah MWB di desa Kaliwangi yang berjalan kurang lebih 6 tahun dengan struktur kepengurusan adalah sebagai berikut :

Ketua	: H. Hasyim
Sekretaris	: Hadi Sumarto
Bendahara	: H. Abdul Hasan
Tenaga pendidik	: H. Abdul Fatah

Semenjak tahun 1969 sampai dengan sekarang, MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi mengalami perubahan nama yaitu pada tahun 1969 – 1974 dengan nama Madrasah Wajib Belajar (MWB), kemudian tahun 1974 – 1980 berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama

(MINU). Setelah itu, pada tahun 1980 sampai dengan sekarang bernama Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif (MIMA).⁹³

Status madrasah pada awal berdiri dengan Surat Pengesahan Perguruan Agama dengan nomor: K/340/IIIb/75 tertanggal 1 Januari 1975 yang diterbitkan di Semarang dan ditandatangani oleh Azinar Ismail kepala seksi Pendidikan Agama. Pada tanggal 8 Juni 1978 mendapat Piagam Izin Operasional dengan nomor: Lk/0.0/2002/B.MI/1978 yang ditandatangani oleh Kidjmal, BA kepala bidang Pendidikan Agama Islam. Setelah 5 tahun, madrasah menjadi berstatus DIAKUI dengan piagam nomor: MK.19/5.a/Pgm/MIS/043/1994 yang diterbitkan di Purwokerto pada tanggal 30 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Drs. Makmur selaku Kepala Seksi Perguruan Agama Islam. Dari status DIAKUI, pada tanggal 9 Juli 2002 madrasah mendapat Piagam DISAMAKAN yang ditandatangani oleh Drs. H. Mawardi Asy'ari Kepala Seksi Perguruan Islam pada masa itu. Beberapa Tahun kemudian, Madrasah dari berstatus DISAMAKAN menjadi TERAKREDITASI "B" pada tanggal 19 Mei 2006 dengan nomor piagam: Kw.11.4/PP.03.2/623.2.03/2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Choliq, MT, M.Ag selaku Kepala Bidang Mapenda Islam Kanwil provinsi Jawa Tengah. Dan Alhamdulillah pada tanggal 27 Oktober 2011, MI Ma'arif Nu 1 Kaliwangi dengan dukungan semua pihak yang terkait bisa mengikuti akreditasi dengan membawa hasil yang memuaskan dengan TERAKREDITASI "A" dengan nilai 92, dengan nomor Piagam Dd.042100 yang dikeluarkan di Semarang oleh Badan Akreditasi Provinsi Jawa Tengah Drs. H. Subarjo, MM.⁹⁴

Adapun luas tanah bangunan dan tanah kepemilikan MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi 1540 m2 dengan rincian,⁹⁵ sebagai berikut:

⁹³ Dokumentasi Profil Ma'arif NU 1 Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

⁹⁴ Dokumentasi Profil Ma'arif NU 1 Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

⁹⁵ Dokumentasi Profil Ma'arif NU 1 Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

Tabel 1
Wakaf Tanah

No.	Nama yang Mewakafkan	Jumlah	Keterangan
1.	H. Abdul Hasan	560 m ²	
2.	H. Abdul Mu'in	350 m ²	
3.	H. Madaswan	140 m ²	
4.	Madaris	210 m ²	
5.	Masyarakat	280 m ²	
Jumlah		1540 m ²	
6.	H. Abdul Hamid	700 m ² 2450 m ²	Sawah Tanah darat

Selama 46 tahun (1969 – 2015) sudah mengalami 3 pergantian kepala madrasah. Pertama, dari tahun 1969 – 2001 (32 tahun) dipimpin oleh Kyai H. Abdul Fatah. Kemudian yang kedua H. Iljas dari desa Karangtalun Lor dari tahun 2001 – 2005 (5 tahun). Dan ketiga semenjak tahun 2005 sampai sekarang (10 tahun) dipimpin oleh bapak Muhemin.

Keadaan madrasah mengacu pada awal pendidikan perkembangannya yang dapat dikatakan cukup berkembang adalah pada awal pembukaan tahun 1974 dengan jumlah siswa 6 siswa dengan kelulusan adalah lulus 2 siswa (1 putra dan 1 putri) dan yang tidak lulus berjumlah 4 (3 putra dan 1 putri). Pada tahun 1975 sampai dengan sekarang (2015) sudah menamatkan dan meluluskan sebanyak 41 angkatan dengan jumlah L = 381, P = 399, total = 781 siswa.⁹⁶

b. Letak Geografis

Secara geografis, lokasi gedung MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi sangat strategis karena dekat dengan jalan raya di Jalan Raya Purwojati-Ajibarang Desa Kaliwangi RT.04 RW.02. Hal ini bisa dilihat dari mudahnya para siswa, guru, dan juga karyawan ketika berangkat menuju MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, karena berada dijalur Purwojati menuju Ajibarang. MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi ini memiliki akreditasi A, yang beralamatkan di:⁹⁷

⁹⁶ Dokumentasi Profil Ma'arif NU 1 Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

⁹⁷ Dokumentasi Profil Ma'arif NU 1 Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

Jalan/ Kampung : Jalan Raya Purwojati-Ajibarang Desa Kaliwangi
RT.04 RW.02
Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten/ Kota : Banyumas
Kecamatan : Purwojati
Desa/ Kelurahan : Kaliwangi
Kode Pos : 53175
Latitude (Lintang) : -7472169
Longitude (Bujur) : 109112802

c. Visi dan Misi Madrasah

Visi MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi adalah “Terwujudnya Insan Yang Santun Dalam Berakhlak Unggul Dalam Prestasi”. Sedangkan Misi dari MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi adalah:

- 1) Mewujudkan insan sekolah berilmu pengetahuan dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Menumbuhkan insan sekolah berperilaku sesuai nilai-nilai agama dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.⁹⁸

d. Keadaan Guru dan Karyawan

Faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah adalah guru, karena tanpa adanya guru kegiatan yang ada di sekolah tidak akan berjalan lancar dan tidak akan mencapai tujuan. Guru mempunyai tugas yang sangat penting dalam mencapai sebagian besar tujuan dan harapan kemajuan siswa melalui kegiatan belajar mengajar dan kegiatan diluar kegiatan belajar mengajar.

Berikut di bawah ini daftar guru dan karyawan MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi:⁹⁹

Tabel 2
Keadaan Guru dan Karyawan

No	Nama/NIP	L/P	Tanggal Lahir	Pddkn	Jabatan	Mengajar Kelas
1	Muhemin, S.Pd.I 197102012007101001	L	01-02-1971	S 1	Kamad	III B
2	Sri Muliah, S.Pd.AUD 197511292007102004	P	29-11-1975	S 1	Guru	I A
3	Harsini, S.Pd.I	P	14-02-1966	S 1	Guru	I B

⁹⁸ Dokumentasi Profil Ma'arif NU 1 Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

⁹⁹ Dokumentasi Profil Ma'arif NU 1 Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

	196602142007012019					
4	Siti Nofi Safitri, S.Pd.SD 198411222009012011	P	22-11-1984	S 1	Guru	VI
5	Wiwit Safitri, S.Pd.I 198607122007102001	P	12-07-1986	S 1	Guru	V
6	Khusnul Khotimah, S.Pd.I 19770619200710 2 001	P	19-07-1977	S 1	Guru	II B
7	Soimah, S.Pd.I -	P	19-08-1979	S 1	Guru	III A
8	Yeni Prihatin A., S.Pd.I -	P	19-09-1985	S 1	Guru	II B
9	Akhbib, S.Pd.I -	L	05-04-1986	S 1	Guru	III C
10	Ulfatul Khoeroh, S.Pd.I -	P	13-08-1989	S 1	Guru	IV
11	Rakhmat -	L	15-09-1982	SMA	Guru & TU	I-VI TIK
12	Mulyati -	P	01-06-1979	SMEA	Guru	I-VI SBK
13	Siti Yuniati -	P	24-06-1989	SMK	Guru	I-VI B.Ingg
14	Khusnudin -	L	26-06-1994	SMK	Guru	1-VI PJOK

e. Keadaan Siswa

Keadaan siswa di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi berjumlah 261 siswa yang kemudian terbagi ke dalam 10 kelas. Untuk dapat mengetahui lebih jelas bisa dilihat pada tabel di bawah ini.¹⁰⁰

Tabel 3
Keadaan Siswa
MI Ma'arif NU I Kaliwangi Tahun Pelajaran 2012 – 2016

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Peserta Didik Per Kelas						Jumlah Total
		1	2	3	4	5	6	
1	2012 – 2013	36	34	32	26	28	22	179
2	2013 – 2014	61	34	34	36	28	23	216
3	2014 – 2015	47	59	34	36	35	28	240
4	2015 – 2016	58	41	61	34	36	35	265
5	2016 – 2017	53	54	39	59	32	35	272

¹⁰⁰ Dokumentasi Profil Ma'arif NU 1 Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

f. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi digunakan sebagai kontribusi pada proses pendidikan. Disisi lain sarana dan prasarana di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi dapat menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan mendukung untuk memenuhi kebutuhan untuk menjalankan aktifitas di sekolah. Para siswa juga dapat menggali potensi yang dimiliki dengan sarana dan prasarana sekolah yang ada. Untuk melihat sarana dan prasarana di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Luas MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi

No	Tanah dan Bangunan	Luas	Ket.
1.	Tanah Madrasah	1.621 m ²	Wakaf
2.	Bangunan	520 m ²	Wakaf
3.	Luas Halaman	1.101 m ²	Wakaf

Tabel 6
Keadaan Ruangan
MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi Tahun Pelajaran 2016

No.	Jenis Ruangan	Jumlah Ruangan	Kondisi			Ket
			Baik	RR	RB	
1.	R. Kelas	11		-	-	
2.	R. Perpustakaan	1		-	-	
3.	R. Tata Usaha	1		-	-	
4.	R. Kepala Madrasah	1		-	-	
5.	R. Guru	1		-	-	
6.	Ruang Waka – waka	1		-	-	
7.	R. Laboratorium IPA	1		-	-	
8.	R. Lab Komputer	1		-	-	
9.	R. BP	1		-	-	
10.	Masjid	1		-	-	
11.	Ruang UKS	1		-	-	
12.	Ruang Koperasi	1		-	-	

g. Deskripsi Masyarakat di sekitar Madrasah

Mayoritas penduduk Desa Kaliwangi beragama Islam, yang mana penduduknya sendiri terbagi dalam dua unsur organisasi masyarakat yaitu organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Mayoritas warga Desa Kaliwangi adalah warga Nahdiyyin (NU). Selanjutnya jumlah usia produktif mencapai 2000 dengan prosentasi pekerjaan pedagang 40%, petani 25%, sopir 5%, karyawan 20%, dan lain-lain 10%.¹⁰¹

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar madrasah, hasil yang didapatkan adalah Masyarakat sekitar Madrasah telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi. Misalnya dalam hal perencanaan, masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam pengadaan sumbangan sarana prasarana. Kemudian dalam hal pelaksanaan, masyarakat sekitar juga telah menyediakan Masjid atau mushola untuk sholat berjama'ah dan kegiatan PHBI, lapangan sepak bola dan voli untuk *class meeting* dan pelajaran pendidikan jasmani (olahraga), dan kantin untuk tempat makan para siswa.¹⁰²

Selanjutnya dalam hal evaluasi, masyarakat sekitar madrasah juga ikut berpartisipasi dalam hal penilaian terhadap penggunaan sarana prasarana yang telah disediakan melalui rapat komite madrasah. Dengan demikian kondisi umum partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi dapat dikatakan baik. Indikatornya yaitu masyarakat ikut berpartisipasi cukup tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap pengembangan MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi.

2. MI Ma'arif NU 1 Kalitapen

a. Sejarah Berdirinya

Madrasah Ibtida'iyah (MI) Ma'arif Nahdlatul Ulama 1 Kalitapen Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU)

¹⁰¹ Dokumentasi Data Demografi Desa Kaliwangi dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

¹⁰² Wawancara dengan Muhaemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 25 Maret 2017.

Kecamatan Purwojati pada tahun 1958. Sebelum bernama MI NU 1 Kalitapen, telah mengalami beberapa kali perubahan nama, antara lain:

- 1) Pada awal berdirinya bernama Diniyah dari tahun 1958 – 1965.
- 2) Setelah Diniyah diganti dengan nama MINU sekitar tahun 1965 – 1971.
- 3) Setelah MINU diganti dengan nama Madrasah Wajib Belajar (MWB) sekitar tahun 1971. Karena para ulama Desa Kalitapen menginginkan pendidikan Madrasah Wajib Belajar.
- 4) Setelah MWB berjalan beberapa tahun kemudian diganti dengan nama MI Ma'arif NU 1 Kalitapen Kecamatan Purwojati Banyumas sampai dengan sekarang.¹⁰³

Sekitar tahun 1975, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen telah terdaftar dengan nomor : K/341/111/b/75, tanggal 1 Januari 1975. Pada tahun 1993, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen telah ditetapkan dan diakui keberadaannya oleh Departemen Agama dan telah menerima Surat Keputusan dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: MK/19/5a/PP.01.1/2439/1993. Tanggal 1 Desember 1993, kemudian pada tahun 1997, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen telah disamakan keberadaannya oleh Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah menerima surat dengan Nomor: MK19/5a/PP.01.1/2547/1997 Tanggal 11 Desember 1997. Kemudian MI Ma'arif NU 1 Kalitapen terakreditasi pada tahun 2005 dengan Nomor: KW.11.4/4PP.03.2/623.2.13/2005.¹⁰⁴

Sedangkan para pendirinya adalah tokoh-tokoh ulama dan anggota Jam'iyah Nahdlatul 'Ulama Se-Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati Banyumas yang antara lain:

- 1) Ketua : K.H. Ali Mukhlas (Alm.)
- 2) Sekretaris : K. M. Ridwan (Alm.)
- 3) Bendahara : K. M. Nur.
- 4) Anggota : Syajadi (Alm.)

¹⁰³ Dokumentasi Profil MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

¹⁰⁴ Dokumentasi Profil MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

Muhdi (Alm.)

Suwito

- 5) para donator yang antara lain: K.H Abdul Fattah dan masyarakat Desa Kalitapen, dari hasil panen (zakat).¹⁰⁵

b. Letak Geografis

Secara geografis letak MI Ma'arif NU 1 Kalitapen sangat strategis karena berada dekat dengan pusat pemerintahan desa dan terletak di Jalan Utama Desa Kalitapen, sehingga mudah dijangkau oleh guru, siswa, dan masyarakat Desa Kalitapen. MI Ma'arif NU 1 Kalitapen telah mengalami 2 (dua) kali pindah karena belum memiliki tempat dan gedung permanen. MI Ma'arif NU 1 Kalitapen sebelumnya berada di Sebelah Selatan Balai Desa Kalitapen atau yang sekarang ditempati oleh SD Negeri 1 Kalitapen, kemudian MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dipindahkan ke Sebelah Barat Balai Desa Kalitapen sekitar 250 m, menempati tanah wakaf milik seorang dermawan yang bernama H. Ridwan. Tanah tersebut masih ditempati oleh MI Ma'arif NU 1 Kalitapen sampai sekarang. Di atas tanah tersebut didirikan gedung seluas 700 m², luas halaman madrasah 200 m², luas tanah 970 m². Adapun batas-batas MI Ma'arif NU 1 Kalitapen adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in
- 2) Sebelah Selatan : TK RA Diponegoro 143 Kalitapen
- 3) Sebelah Timur : Pemukiman Warga Desa Kalitapen.
- 4) Sebelah Barat : Jalan Raya Piyasa Desa Kalitapen.¹⁰⁶

c. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah

Visi : "Terbentuknya karakter generasi bangsa yang berilmu pengetahuan, berakhlakul karimah dan memiliki keterampilan".

Misi :

- 1) Memberikan ilmu pengetahuan baik umum maupun agama, melalui pembelajaran dengan baik;
- 2) Melaksanakan tuntunan ajaran Islam secara *Kaffah*/menyeluruh;
- 3) Mampu berinteraksi secara baik dengan masyarakat;

¹⁰⁵ Dokumentasi Profil MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

¹⁰⁶ Dokumentasi Profil MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

- 4) Mampu menerapkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁷

Tujuan Madrasah:

- 1) Lulusan memiliki aqidah yang kokoh dan tekun beribadah dengan baik;
- 2) Lulusan memiliki karakter jujur, santun dan bertanggungjawab;
- 3) Lulusan memiliki karakter toleran, menghargai perbedaan, memiliki jiwa persatuan, peduli dan berguna bagi sesama;
- 4) Lulusan memiliki budaya hidup bersih dan sehat;
- 5) Lulusan memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi;
- 6) Rata-rata ujian nasional mencapai 8,00;
- 7) Memiliki tim porseni minimal 3 cabang yang mampu bersaing di tingkat Kabupaten;
- 8) Kualifikasi tenaga pendidik 100% adalah strata 1 di bidangnya;
- 9) Melaksanakan sistem manajemen yang demokratis, transparan dengan mengutamakan kebersamaan;
- 10) Melakukan kerja sama yang harmonis antar komponen madrasah dan lembaga masyarakat menuju sekolah unggulan.¹⁰⁸

d. Keadaan Guru dan Karyawan

MI Ma'arif NU 1 Kalitapen memiliki tenaga pengajar berjumlah 12 orang yang terdiri atas guru PNS dan guru Non PNS. Latar belakang pendidikan ke 11 guru tersebut adalah S1, D2, D3, dan SMA, sedangkan penjaga SMP. Berikut ini keadaan guru MI Ma'arif NU 1 Kalitapen Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 7

**Daftar Guru dan Karyawan
MI Ma'arif NU 1 Kalitapen Tahun Pelajaran 2016/2017**

No	Nama/NIP/NUPTK	TTL	Jabatan	Mengajar
1	Indah Zubaidah, S.Pd.I. 19770515 200710 2 003	Banyumas 15/05/1977	Kepala Madrasah	Matematika
2	Endang Lestari B, S.Pd.I. 19781205 200701 2 020	Banyumas 05/12/1978	Guru Kelas I	Agama Umum
3	Tri Setiati A.,S.Pd.I 19831104 200710 2 001	Banyumas 04/11/1983	Guru Kelas II	Umum
4	Nur Afiah, S.Pd.I 19731113 200710 1 001	Banyumas 15/11/1973	Guru Kelas VB	Umum
5	Fauzan, S.Pd.I 19750703 200710 1 002	Banyumas 07/03/1975	Guru Kelas III	Agama Umum

¹⁰⁷ Dokumentasi Profil MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

¹⁰⁸ Dokumentasi Profil MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

6	Nur Kholifah, S.Pd.I.	Banyumas 26/06/1991	Guru Mapel VA	Umum
7	Islahudin, S.Pd.I 2959756658210062	Banyumas 27/06/1978	Guru Kelas VI	Agama Umum
8	Mudrikah, S.Pd.I. 2149758660210193	Banyumas 17/08/1980	Guru Kelas IV	Umum
9	Aprisikhan, S.Pd.I.	Banyumas 13/02/1993	Guru Mapel	Umum
10	Irma Isti'anah, S.Pd.I.	Banyumas 11/04/1987	Guru Mapel	Agama
11	Ana Rahmawati, S.Pd.I.	Banyumas 09/02/1992	Guru Mapel	Mulok

e. Keadaan Siswa

Siswa MI Ma'arif NU 1 Kalitapen sebanyak 213 anak terdiri dari 120 siswa perempuan dan 93 siswa laki-laki. Keadaan siswa MI Ma'arif NU 1 Kalitapen Tahun Pelajaran 2016/2017,¹⁰⁹ dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8
Keadaan Siswa
MI Ma'arif NU 1 Kalitapen Tahun Pelajaran 2016/2017

No	Kelas	Rombel	Jenis kelamin		Jumlah
			L	P	
1	I	1	16	19	35
2	II	1	20	18	38
3	III	1	24	13	37
4	IV	1	21	16	37
5	V	2	23	20	43
6	VI	1	16	7	23
	Jumlah	7	120	93	213

f. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki MI Ma'arif NU 1 Kalitapen,¹¹⁰ dapat penulis sajikan melalui tabel di bawah ini :

¹⁰⁹ Dokumentasi Profil MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

¹¹⁰ Dokumentasi Profil MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

Tabel 9
Keadaan Sarana Dan Prasarana
MI Ma'arif NU 1 Kalitapen Tahun Pelajaran 2016/2017

No	Keadaan Gedung & Sarana Prasarana Pendidikan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Jumlah
1	Ruang Kelas		3	2	2	7
2	Ruang Kamad			1		1
3	Ruang Guru		1			1
4	Ruang TU				1	1
5	Ruang Lab. IPA					0
6	Ruang Lab. Komputer				1	1
7	Ruang Perpustakaan	1				1
8	Ruang UKS		1			1
9	Ruang Perpustakaan		1			1
10	Mushola / T.Ibadah	1				1
11	WC		3			3
12	Kamar Mandi	3				3
13	Kantin		1			1
14	Pagar	1				1
15	Tempat Olahraga		1			1
16	Bangku utk 1 siswa				100	100
17	Bangku utk 2 siswa			30		30
18	Bangku utk 4 siswa					0
19	Kursi Siswa	150	10	30		190
20	Lemari				7	7
21	Rak Buku	4			2	6
22	Papan Tulis	7				7
23	Komputer Kantor				2	2
24	Rangka Manusia				1	1
25	Alat Peraga PKn				1	1
26	Alat Peraga Bahasa Indonesia				2	2
27	Alat Peraga IPA	1				1
28	Globe		1			1
29	Tape Recorder	1				1
30	Bola volly	1				1
31	Bola sepak	1				1
32	Tenis Meja		1			1
33	Raket	2			2	4
34	Matras				1	1
35	Kasur		1			1
36	Obat obat	1				1
37	Buku PKn	7				7
38	Buku B.Indonesia	6	1			7
39	Buku Matematika	6	1			7
40	Buku IPA	6	1			7
41	Buku IPS	7				7

g. Deskripsi Masyarakat sekitar Madrasah

Desa Kalitapen memiliki satu buah Sekolah Dasar (SD) berstatus Negeri (SD Negeri 1 Kalitapen) dan dua madrasah, yaitu MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MTs Ma'arif NU 1 Kalitapen berstatus swasta yang dimiliki oleh yayasan lembaga pendidikan al-Ma'arif Kecamatan Purwojati. Penduduk Desa Kalitapen rata-rata berpenghasilan sebagai pedagang dan petani. Karena di desa ini terdapat pasar yang cukup besar, dengan nama Pasar Kalitapen. Pasar Kalitapen merupakan ikon jalannya perekonomian di Kecamatan Purwojati, khususnya Desa Kalitapen. Selain itu, berpenghasilan sebagai petani, karena sebagian wilayah Desa Kalitapen di kelilingi oleh persawahan yang sekaligus menjadi batas antar desa.¹¹¹

Mayoritas penduduk Desa Kalitapen beragama Islam. Terbagi dalam dua unsur organisasi keagamaan yaitu organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dengan mayoritas adalah warga *Nahdiyin*. Hampir setiap hari ada kegiatan keagamaan, baik yang berskala besar maupun kecil, di Desa Kalitapen. Melihat kondisi yang seperti ini, yaitu masyarakat Desa Kalitapen merupakan masyarakat agamis, maka sudah seharusnya masyarakat peduli dan ikut melancarkan kemajuan pendidikan Islam, dengan cara meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan madrasah yang ada di Desa Kalitapen, baik fisik maupun non fisik terhadap pendidikan yang ada di Madrasah demi tercapainya kualitas pendidikan khususnya pendidikan agama Islam yang semakin baik dan bermutu.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar madrasah, hasil yang didapatkan adalah masyarakat sekitar madrasah telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen. Misalnya dalam hal perencanaan, masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam pengadaan sumbangan sarana prasarana. Kemudian dalam hal

¹¹¹ *Observasi* Penulis pada tanggal 27 Maret 2017.

pelaksanaan, masyarakat sekitar juga telah menyediakan Masjid untuk sholat berjama'ah dan kegiatan PHBI, lapangan sepak bola dan voly untuk *class meeting* dan pelajaran pendidikan jasmani (olahraga), dan kantin untuk tempat makan para siswa. Selanjutnya dalam hal evaluasi, masyarakat sekitar madrasah juga ikut berpartisipasi dalam hal penilaian terhadap penggunaan sarana prasarana yang telah disediakan melalui rapat komite madrasah.¹¹² Dengan demikian kondisi umum partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dapat dikatakan baik. Indikatornya yaitu masyarakat ikut berpartisipasi cukup tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap pengembangan MI Ma'arif NU 1 Kalitapen.

3. MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul

a. Sejarah dan Letak Geografis

MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul berdiri pada tanggal 07 Januari 1970 yang diprakarsai oleh warga Muhammadiyah desa Karangtalun Kidul dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana. Dengan dilandasi niat yang ikhlas serta kemauan yang kuat, madrasah terus berjalan. Dahulu pertama kali Madrasah tersebut berdiri diberi nama SD Muhammadiyah. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1975, berdasarkan keputusan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas nama SD Muhammadiyah berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM).¹¹³

MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul berada di barat kecamatan Purwojati dengan jarak orbitasi \pm 30 km dari ibu kota Kabupaten Banyumas. Fisik bangunan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul yang cukup megah dibanding sekolah-sekolah yang lain, maka MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul mudah sekali ditemukan dan orang tidak akan mengira bahwa itu adalah sebuah lembaga pendidikan agama. Gedung MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul berdiri diatas tanah seluas

¹¹² Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kalitapen pada tanggal 27 Maret 2017.

¹¹³ Dokumentasi Profil MIM Karangtalun Kidul dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

687 m² yang merupakan wakaf yayasan Muhammadiyah Karangtalun Kidul. Gedung MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul 7 lokal yang terdiri dari 6 lokal untuk ruang kelas dengan ukuran 7 x 7 m², satu lokal untuk kantor dengan ukuran 7 x 6 m².¹¹⁴

b. Visi dan Misi

Visi : “Mempersiapkan siswa berprestasi dalam mengembangkan kepribadian berbudi luhur, mandiri serta dapat menguasai IMTAQ dan IPTEK”

Misi MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul:

- 1) Disiplin waktu dan administrasi;
- 2) Meningkatkan KBM melalui pendekatan ketrampilan;
- 3) Mengembangkan motivasi dan rasa senang belajar;
- 4) Mengoptimalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler;
- 5) Memantapkan siswa dalam ketaqwaan terhadap Allah SWT.¹¹⁵

c. Keadaan Guru dan Karyawan

Tenaga pengajar di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 10 orang termasuk kepala madrasah dan tenaga penjaga perpustakaan dengan rincian 6 guru kelas, 1 guru olah raga, 1 guru bahasa Inggris, 1 perpustakawan dan 1 kepala madrasah.

Tabel 10
Data Keadaan Guru MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul
Tahun Pelajaran 2016/2017¹¹⁶

No	Nama / NIP	Ijazah	Gol	Jabatan
1	Syahidan, S.Pd.I. 197906262007011035	S1		Kepala Madrasah
2	Ida Ma'rifatul H, S.Pd.I 198101212007102002	S1		Guru Kelas VI
3	Cahyo Wibowo, S.Pd.I -	S1		Guru Kelas V
4	Ani Muamalah S.Pd.I. NIP. 198104202007102001	S1		Guru Kelas IV
5	Rokhmi Hidayati, S.Pd.I -	S1		Guru Kelas III
6	Nining Rofiqoh, S.Pd.I 198103052007102004	S1		Guru Kelas II

¹¹⁴ Dokumentasi Profil MIM Karangtalun Kidul dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

¹¹⁵ Dokumentasi Profil MIM Karangtalun Kidul dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

¹¹⁶ Dokumentasi Profil MIM Karangtalun Kidul dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

7	Khusnul K. S.Pd.I. 197706192007102001	S1		Guru Kelas I
8	Muhtar Yusuf, S.Pd.I -	S1		Guru Penjaskes
9	Raras Wuri M, S.Pd.I -	S1		Guru Bhs Inggris
10	Gayuh Tri S, A.Ma.Pust -	D2		Pustakawan

d. Keadaan Siswa

Keadaan siswa di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 135 siswa, yang terdiri atas 56 siswa perempuan dan 79 siswa laki-laki. Dari sejumlah tersebut di atas, terbagi dalam 6 kelas 8 rombel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Data Keadaan Siswa MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul
Tahun Pelajaran 2016/2017¹¹⁷

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah	Wali Kelas
		L	P		
1	Kelas IA	14	7	21	Nining Rofiqoh, S.Pd.I
2	Kelas IB	11	10	21	Windiarti, S.Pd
3	Kelas II	17	9	26	Ani Muamalah, S.Pd.I
4	Kelas III	16	19	35	Ani Muamalah, M.Pd
5	Kelas IV	15	8	23	Akhmad Fauzi, S.Pd.I
6	Kelas VA	13	7	20	Cahyo Wibowo, S.Pd.I
7	Kelas VA	10	6	16	Muhtar Yusuf, S.Pd.I
8	Kelas VI	10	10	20	Ida Ma`rifatul H., S.Pd.I
	Jumlah	120	93	213	

e. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini adalah segala benda atau alat yang ikut menunjang terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul Purwojati meliputi keadaan bangunan, keadaan mebelair dan buku-buku yang mendukung pembelajaran.

¹¹⁷ Dokumentasi Profil MIM Karangtalun Kidul dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

Tabel 12
Keadaan Bangunan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul ¹¹⁸

No	Penggunaan Tanah	Luas Tanah Menurut Status Sertifikat (m ²)		
		Bersertifikat	Belum Sertifikat	Total
1.	Bangunan	0	442	442
2.	Lapangan Olahraga	0	0	0
3.	Halaman	0	889	889

Tabel 12
Keadaan Sarana dan Prasarana
MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul ¹¹⁹

No	Jenis Bangunan	Jumlah Ruangan Menurut Kondisi				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1.	Ruang Kelas	5	2	0	0	7
2.	Ruang Kepala Madrasah	0	1	0	0	1
3.	Ruang Guru	1	0	0	0	1
4.	Ruang UKS	0	1	0	0	1
5.	Toilet Guru	1	0	0	0	1
6.	Toilet Siswa	0	2	0	0	2
7.	Kursi Siswa	182	8	0	0	190
8.	Meja Siswa	122	7	0	0	129
9.	Kursi Guru di Ruang Kelas	8	0	0	0	8
10.	Meja Guru di Ruang Kelas	8	0	0	0	8
11.	Papan Tulis	8	0	0	0	8
12.	Lemari di Ruang Kelas	8	0	0	0	8
13.	Alat Peraga IPA (Sains)	2	2	0	0	4
14.	Bola Sepak	2	2	0	0	4
15.	Bola Voli	2	2	0	0	4
16.	Meja Pingpong (Tenis Meja)	1	0	0	0	1
17.	Laptop	1	0	0	1	2
18.	Komputer	1	0	3	0	4
19.	Printer	1	0	2	0	3
20.	LCD Proyektor	1	0	0	1	2
21.	Layar (Screen)	2	0	0	0	2
22.	Meja Guru & Pegawai	14	0	0	0	14
23.	Kursi Guru & Pegawai	14	0	0	0	14

¹¹⁸ Dokumentasi Profil MIM Karangtalun Kidul dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

¹¹⁹ Dokumentasi Profil MIM Karangtalun Kidul dikutip pada tanggal 29 Maret 2017.

24.	Lemari Arsip	5	0	0	0	5
25.	Kotak Obat (P3K)	1	0	0	0	1
26.	Pengeras Suara	2	0	0	0	2
27.	Kendaraan Operasional (Mobil)	1	0	0	0	1

f. Deskripsi Masyarakat sekitar Madrasah

Mayoritas penduduk Desa Karangtalun Kidul beragama Islam, yang mana penduduknya sendiri terbagi dalam empat unsur organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), aliran salafi dan Nahdlatul Ulama (NU). Masyarakat Desa Karangtalun Kidul sebagian besar berasal dari etnis Jawa dan semua masyarakatnya memeluk agama Islam, dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan bahasa Jawa untuk sarana komunikasi. Namun, dalam berkomunikasi dengan para pendatang masyarakat masih cenderung malu-malu untuk menggunakan bahasa Indonesia, masih sedikit dari mereka yang bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara benar hanya masyarakat yang bekerja di luar kota dan tokoh masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi pemukiman di daerah ini belum begitu padat karena letaknya yang berada di pedesaan sehingga lahan kosong berupa kebun dan sawah masih banyak bisa kita lihat.¹²⁰

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar madrasah, hasil yang didapatkan adalah Masyarakat sekitar Madrasah telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MIM Karangtalun Kidul. Misalnya dalam hal perencanaan, masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam pengadaan sumbangan sarana prasarana. Kemudian dalam hal pelaksanaan, masyarakat sekitar juga telah menyediakan Masjid atau mushola untuk sholat berjama'ah dan kegiatan PHBI, lapangan sepak bola dan voli untuk *class meeting* dan pelajaran pendidikan jasmani

¹²⁰ *Observasi dan Wawancara* dengan Syahidan, Kepala MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 28 Maret 2017.

(olahraga), dan kantin untuk tempat makan para siswa. Selanjutnya dalam hal evaluasi, masyarakat sekitar madrasah juga ikut berpartisipasi dalam hal penilaian terhadap penggunaan sarana prasarana yang telah disediakan melalui rapat komite madrasah. Dengan demikian kondisi umum partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di MIM Karangtalun Kidul dapat dikatakan baik. Indikatornya yaitu masyarakat ikut berpartisipasi cukup tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap pengembangan MIM Karangtalun Kidul.¹²¹

B. Sajian Data Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi

MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi mengembangkan manajemen partisipasi masyarakat dengan menggunakan manajemen terbuka (*open management*). Meskipun latar belakang pendidikan dan pekerjaan orang tua siswa di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi bermacam-macam penggunaan manajemen terbuka berarti tidak menafikan kemampuan yang dimiliki orang tua/masyarakat, baik yang berasal dari kalangan pegawai dan lain sebagainya. MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi menggunakan manajemen terbuka dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, karena MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi hadir di tengah masyarakat umum, masyarakat di luar MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi dibutuhkan dan bahkan diharapkan walaupun secara moral ikut merasa memiliki sehingga tumbuh partisipasi dalam ikut mengsucceskan perkembangan pendidikan yang ada di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi. Keterlibatan masyarakat dalam hal manajemen ikut menentukan keputusan dan pelaksanaannya. Evaluasi program dilaksanakan dengan menerapkan manajemen partisipatif.¹²²

¹²¹ Wawancara dengan Nurrudin, Tokoh Masyarakat Desa Karangtalun Kidul pada tanggal 28 Maret 2017.

¹²² Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 25 Maret 2017.

Upaya yang dilakukan madrasah dalam menggalang partisipasi masyarakat terutama orang tua, menurut hasil penelitian adalah dengan membangun citra madrasah, karena dengan mencitrakan madrasah menjadi madrasah unggulan dengan sendirinya partisipasi masyarakat akan mengalir, baik dari orang tua atau instansi dinas atau non dinas. Penggunaan tokoh, dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh pemegang kebijakan, seluruh masyarakat bisa berpartisipasi terhadap MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi. Silaturahmi, MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi mengemas segala acaranya dengan bentuk silaturahmi untuk menarik partisipasi masyarakat karena seluruh orang tua siswa MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi adalah mayoritas Islam. Hibauan atau ajakan, MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi lewat kepala madrasah nya memaparkan seluruh program kerja dan segala keinginannya dalam setiap rapat dengan orang tua siswa sekaligus menghimbau dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program yang telah dipaparkan. Hal ini ditegaskan oleh Muhemin, kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi:

“Kami mengadakan pertemuan rutin dengan komite madrasah, pengurus madrasah, orangtua/wali murid, dan pemerintah desa kaliwangi setiap triwulan (tiga bulan), tepatnya pada minggu ke-3 Hari Sabtu Kliwon”.¹²³

Dalam mengelola partisipasi yang diberikan oleh masyarakat baik yang berupa dana dan pemikiran serta ide-ide dan lain sebagainya dikelola dengan menggunakan manajemen partisipatif, MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi menggunakan manajemen partisipatif dikarenakan MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi merasa bahwa tanggung jawab pendidikan bukan tanggung jawab MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi saja bahkan tanggung jawab bersama, maka yang dianggap paling cocok dalam mengelola partisipasi masyarakat menggunakan manajemen partisipatif, di samping orang tua ikut dalam menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan partisipasi, juga

¹²³ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 25 Maret 2017.

orang tua ikut bertanggung jawab serta mendapatkan manfaatnya baik secara tampak atau tidak tampak.

MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi menggunakan manajemen partisipatif, di samping alasan di atas, juga memfungsikan kumpulan-kumpulan orang tua, baik yang ada di komite sekolah/pengurus madrasah, maupun yang ada di paguyuban orang tua siswa. Dengan menggunakan manajemen partisipatif dalam mengelola partisipasi masyarakat, maka pihak komite sekolah dan POS sebagai kepanjangan tangan dari orang tua dan masyarakat bisa mengembangkan potensi mereka dari pada hanya sekedar menjalankan tugas. Baik dalam hal berbagi informasi, merencanakan kegiatan penyelesaian masalah, membuat keputusan, dan mengevaluasi hasil.

Berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara dengan kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, jelas bahwa partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi dalam pengembangan madrasah, secara garis besar adalah berbentuk: Partisipasi berbentuk finansial/material bagi masyarakat atau orang tua yang anaknya sekolah di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi. Partisipasi berbentuk ide-ide atau gagasan pemikiran bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan dan memegang kebijakan di Desa Kaliwangi. Partisipasi berbentuk do'a bagi masyarakat dan orang tua siswa MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi yang memiliki kepedulian secara moral terhadap MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi

Dari hasil pertemuan rutin antara madrasah dengan komite madrasah orang tua dan masyarakat dapat teridentifikasi beberapa hal, baik berupa harapan, keinginan, kebutuhan, maupun potensi-potensi bersama dan kesepakatan-kesepakatan antara madrasah dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung program madrasah dalam rangka MBS. Pada umumnya orang tua dan masyarakat memiliki pemahaman yang tinggi untuk memajukan dan meningkatkan program madrasah yang akan

dikembangkan. Hal tersebut dapat terlihat dengan berbagai bentuk partisipasi orang tua dan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing, baik partisipasi material maupun non-material.

Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan program madrasah dapat memberikan motivasi dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam mensukseskan program madrasah tersebut dengan baik. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas madrasah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan, dan aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah disampaikan dalam pertemuan rutin tersebut. Selain itu, pihak madrasah berusaha menjaga dan memelihara kondisi pembelajaran madrasah sesuai dengan tuntutan minimum. Dalam pertemuan rutin tersebut, juga membahas laporan pelaksanaan program madrasah yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan penting untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi madrasah disertai analisis faktor-faktor penyebabnya. Materi pengendalian dan evaluasi yang diselenggarakan mencakup kinerja manajemen madrasah, kepemimpinan kepala madrasah, mutu belajar mengajar, termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib madrasah, pemanfaatan sumber daya dan dana madrasah.

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite Madrasah sebagai sebuah organisasi perlu dikelola sebagai sebuah organisasi dengan menerapkan berbagai prinsip dan praktik-praktik manajemen yang tepat. Dengan demikian, Komite Madrasah mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana yang

diharapkan, yaitu dengan menciptakan forum dialog/diskusi untuk membahas program kerja Komite Madrasah, sebagai berikut:

"Sudah tercipta forum diskusi tentang program kerja Komite Madrasah, hal tersebut dirasa cukup efektif. Karena dengan terprogramnya kerja Komite Madrasah akan lebih mudah madrasah dalam melibatkan masyarakat di pendidikan. Yang dalam prakteknya Komite Madrasah dengan kami sudah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat".¹²⁴

Tujuan dari Komite Madrasah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Sehingga diperlukan kerjasama antara Komite Madrasah dan juga pihak sekolah.

Kemudian dalam pertanyaan selanjutnya penulis kepada Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi tentang suasana keterbukaan dalam menjalin kerjasama antara sekolah dengan komite madrasah, Kepala Madrasah bahwa:

"Dalam menjalin suasana keterbukaan baik sekolah dan Komite Madrasah bekerjasama dengan menciptakan suasana dan kondisi transparan seperti contohnya dalam penggunaan dana dari masyarakat, untuk apa dan bagaimana dana itu digunakan".¹²⁵

Pemberdayaan komite madrasah yaitu bagaimana sekolah dan komite bisa saling komunikasi dan juga sekolah harus selalu aktif memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah baik melalui lisan maupun tertulis pada saat berlangsung forum pertemuan dengan Komite Madrasah. Antara pihak sekolah dan komite harus terbuka untuk keadaan apapun yang berkaitan dengan madrasah.

¹²⁴ Wawancara dengan Imam Syafi'i, Sekretaris Komite MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 7 April 2017.

¹²⁵ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

Hal ini sejalan dengan penuturan yang disampaikan oleh Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, sebagai berikut:

“Untuk memperoleh dukungan adalah dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka sehingga satuan pendidikan sebagai sebuah organisasi tidak lagi berdiri sendiri artinya pihak sekolah baik itu kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan karyawannya maupun guru-gurunya saling berinteraksi baik yaitu dengan Komite Madrasah maupun dengan masyarakat juga harus berhubungan dengan baik”.¹²⁶

Komunikasi memang di butuhkan antara sekolah dan juga Komite Madrasah, karena dengan komunikasi yang baik akan terjalin hubungan yang harmonis. Tetapi tidak semuanya harus berkonsultasi dengan pihak Komite Madrasah, seperti apa yang telah dituturkan oleh Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, bahwa:

“Dalam hubungannya dengan program madrasah penyelenggara pendidikan tidak semuanya berkonsultasi dengan Komite Madrasah. Para penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi langsung dengan orang tua murid dan masyarakat untuk mendapat masukan dalam proses menetapkan kebijakannya, tetapi hal tersebut sudah diketahui oleh pihak Komite Madrasah”.¹²⁷

Dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan madrasah dengan pihak komite madrasah, selalu diupayakan atas dasar musyawarah secara mufakat. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua kebijakan dapat diputuskan secara musyawarah mufakat. Hal ini ditegaskan oleh kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, sebagai berikut:

“Tidak semua keputusan dan kebijakan yang diambil madrasah atas dasar musyawarah mufakat dengan dengan pihak Komite Madrasah. Karena selain peran dari Komite Madrasah masih ada peran-peran yang lain yaitu kepala madrasah, pengurus dan sesepuh yang ada di madrasah ini. Misalnya keputusan/kebijakan madrasah yang tidak bersifat diskusi dengan komite madrasah tersebut adalah keputusan/kebijakan yang bersifat harian, operasional, atau juga keputusan/kebijakan yang menyangkut hal-

¹²⁶ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

¹²⁷ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

hal yang menjadi otonomi pendidik misalnya penentuan nilai siswa atau kelulusan siswa”.¹²⁸

Dalam pemberian pelayanan di madrasah, masyarakat melalui komite madrasah tidak terlibat di dalamnya, karena Komite Madrasah lebih banyak berperan sebagai penasehat atau konsultan dalam kegiatan-kegiatan di madrasah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i, sekretaris komite MI Ma’arif NU 1 Kaliwangi, berikut:

“Pemberian pelayanan di madrasah tidak bergantung pada Komite Madrasah saja. Misalnya, sarana dan prasarana yang digunakan oleh madrasah tentunya berawal dari keluhan orang-orang yang berada di madrasah kemudian disalurkan ke pihak madrasah dan kiranya apa yang harus diperbaiki. Kalau dirasa orang yang berada dipendidikan itu sudah bisa menyelesaikan maka untuk pelibatan pihak yang lain tertunda dulu”.¹²⁹

Selama ini komite madrasah tidak terlibat secara langsung sebagai pelaksana kegiatan di madrasah, sebagaimana penjelasan komite madrasah, bahwa:

“Kalau untuk kegiatan di madrasah itu adalah sudah tugas dari wakil kepala yang bersangkutan. Misalnya tentang kegiatan kesiswaan sudah ada waka kesiswaan yang melaksanakan tugasnya dan kegiatan-kegiatan yang lain sudah ada yang menjalankan perannya masing-masing”.¹³⁰

Masyarakat, melalui komite madrasah dan pihak madrasah akan selalu berkomunikasi jika madrasah menghadapi suatu masalah, sesuai dengan penjelasan sekretaris komite madrasah, bahwa:

“Apabila madrasah menghadapi suatu masalah itu memang tidak hanya berhenti di madrasah saja. Karena madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan yang harus berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, madrasah mau tidak mau harus berhubungan dengan masyarakat. Bentuk hubungan tersebut baik dalam kapasitas hubungan dinas, maupun hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar kedinasan. Jadi, pelibatan

¹²⁸ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma’arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

¹²⁹ Wawancara dengan Imam Syafi’i, Sekretaris Komite MI Ma’arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 7 April 2017.

¹³⁰ Wawancara dengan Imam Syafi’i, Sekretaris Komite MI Ma’arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 7 April 2017.

masyarakat atau tokoh masyarakat tidak hanya sebatas pencarian sumber dana saja”.¹³¹

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut bahwa masyarakat dan orang tua hanya mengetahui peran Komite Madrasah sebagai wakil masyarakat adalah sekedar penggalang sumber dana saja dan penyalur keluhan dari masyarakat. Untuk tugas dan peran komite yang lain mereka belum mengetahuinya, hal ini karena sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, sehingga masyarakat belum mengetahui betul apa peran yang sesungguhnya dari Komite Madrasah itu.

Dari hasil wawancara dengan Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi bahwa: “Pemberdayaan komite madrasah, sebagai bukti partisipasi masyarakat di MI Kaliwangi sudah berjalan dengan baik”.¹³² Tetapi berdasarkan pada penelitian ini, untuk sementara kehadiran Komite Madrasah belum diketahui tugasnya secara menyeluruh oleh sebagian masyarakat maupun orang tua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam apa fungsi dan peran Komite Madrasah di setiap Satuan Pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Komite Madrasah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan komite madrasah, partisipasi masyarakat Desa Kaliwangi dilakukan dengan

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi

Berdasarkan wawancara, maupun observasi yang diperoleh di lapangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan merupakan suatu program yang dilaksanakan untuk membantu Madrasah dalam mengembangkan

¹³¹ Wawancara dengan Imam Syafi'i, Sekretaris Komite MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 7 April 2017.

¹³² Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

misinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan harapan masyarakat tersebut memberikan tantangan baru bagi dunia pendidikan, yaitu bagi pemerintah dan yayasan penyelenggara pendidikan, tidak bisa lagi hanya didasari asal sekolah itu berjalan apapun keadaannya, tetapi pendidikan itu harus bermutu dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Artinya, sekolah harus diurus atas dasar profesionalisme, bukan asal jadi.¹³³

Adapun yang dilakukan masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peningkatan Mutu Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan adalah Berpartisipasi dalam rapat Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) yang dihadiri juga oleh komite madrasah, guru dan wali murid, dalam rapat tersebut hal-hal yang dibahas, antara lain: (1) Merumuskan barang (sarana prasarana) yang diperlukan dan pembuatan rincian; dan (2) Membantu untuk memberikan masukan masukan terkait penyusunan RKAM juga sekaligus mengawasi jalannya penyusunan RKAM.¹³⁴

Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana madrasah, rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana madrasah dilakukan dengan menghadirkan komite madrasah sebagai wakil dari orang tua wali murid dan masyarakat. Bentuk pengawasan dalam proses perencanaan sarana dan prasarana madrasah adalah seperti ikut dalam penyusunan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah, mulai dari perumusan barang yang diperlukan sampai pada tahap membuat rincian biaya yang dibutuhkan untuk melakukan belanja madrasah. Semua hal tersebut dibahas dalam rapat RKAM bersama kepala madrasah dan guru. Dengan keikutsertaan pihak komite sekolah dalam penyusunan RKAM, selain bisa membantu untuk memberikan masukan-masukan terkait penyusunan RKAM juga sekaligus mengawasi jalannya penyusunan RKAM.¹³⁵

¹³³ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

¹³⁴ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

¹³⁵ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi yang diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan secara sukarela dan ikhlas. Hal ini dikarenakan madrasah ini berasal dari aspirasi masyarakat, aspirasi tersebut menjadi awal berdirinya yang kemudian mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat lain yang berupa pemberian tanah wakaf, bahan bangunan dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Kaliwangi sebagai *stakeholder*, dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan pada umumnya dan khususnya sarana prasarana sangat dibutuhkan partisipasinya. Sehingga dengan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan madrasah peningkatan mutu/kualitas pendidikan lebih mudah tercapai. Hal ini ditegaskan oleh kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, bahwa:

“Pada tahun 2013/2014 (tiga tahun lalu) orang tua/wali siswa MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi telah menyumbang rata-rata 50.000 rupiah setiap siswa, yang dipergunakan untuk pembelian kursi siswa, karena banyak kursi siswa yang tidak layak pakai. Dengan sumbangan tersebut siswa dapat duduk di kursi dengan nyaman. Setahun kemudian (2014/2015), orang tua siswa MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi berhasil mengumpulkan sumbangan untuk membuat 2 (dua) lokal ruang kelas baru karena jumlah siswa yang sangat banyak dan harus belajar di rumah warga, dengan iuran sukarela. Pada tahun ajaran 2015/2016 orangtua siswa beserta komite madrasah bersepakat untuk membeli kendaraan transportasi, berupa mobil minibus yang digunakan untuk antar jemput siswa MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi yang rumahnya jauh dari madrasah. Sumbangan dilakukan dengan cara setiap siswa menyisihkan uang jajan mereka sebanyak 500 rupiah setiap harinya atau sebanyak 3.000 rupiah setiap minggunya, yang sudah mendapat persetujuan dari orang tua siswa dan komite madrasah. Hanya dalam waktu setahun dapat membeli dua mobil minibus”.¹³⁶

Bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan sarana prasarana pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi dapat dilihat dari penggunaan beberapa sarana dan prasarana yang di dapat dari masyarakat untuk menunjang pendidikan di madrasah.

¹³⁶ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

Sarana dan prasaran dari meningkatkan kualitas sarana dan prasarana MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi adalah sebagai berikut:

1) Masjid untuk kegiatan PHBI:

Masjid Al-Istiqomah milik warga Desa Kaliwangi yang terletak di depan madrasah yang selama ini digunakan untuk tempat pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), misalnya untuk acara peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw. yang diadakan oleh MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, dengan izin dari masyarakat, Masjid al-Istiqomah tersebut dapat digunakan untuk kegiatan madrasah. Masjid tersebut juga dimanfaatkan oleh madrasah untuk tempat berjamaah siswa. Sholat berjamaah tersebut biasanya dilakukan setiap memasuki jam sholat dzuhur.¹³⁷ Hal tersebut terus berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti sejalan masyarakat memutuskan ikut berpartisipasi dalam pengadaan sarana untuk shalat berjamaah bagi guru dan siswa.

2) Lapangan Sepak Bola dan lapangan Voly untuk pelajaran pendidikan jasmani (olah raga) maupun *class meeting* pasca ujian akhir semester.

Sarana kedua adalah lapangan Desa Kaliwangi, setiap kegiatan madrasah yang berbasis kegiatan jasmani seperti pelajaran olah raga dan atau kegiatan *class meeting*, lapangan desa ini menjadi sarana utama. Mulai dari kelas satu hingga kelas enam untuk setiap jam pelajaran olah raga, lapangan desa ini menjadi tujuan utama. Hal ini berjalan secara harmoni tanpa ada rasa tidak terima dari masyarakat atau terjadi kesalah pahaman antara pihak madrasah dan masyarakat.

3) Rumah warga sekitar madrasah

Rumah warga sekitar MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi sering digunakan untuk fasilitas dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan madrasah. Sebagai contoh, saat MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi membutuhkan ruang kelas baru, karena banyaknya siswa

¹³⁷ Wawancara dengan Imam Syafi'i, Sekretaris Komite MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 7 April 2017.

baru yang mendaftar, madrasah menggunakan rumah-rumah warga sekitar madrasah untuk menunjang proses belajar mengajar, selama proses pembangunan ruang kelas, dan itu tanpa dipungut biaya kontrak (gratis). Kemudian pada tahun 2016, tepatnya tanggal 23 Februari, MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk kegiatan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) Tingkat Kabupaten, rumah-rumah warga menjadi transit para peserta kegiatan tersebut, menyediakan konsumsi dan membantu jalannya kegiatan tersebut.¹³⁸

4) Kantin untuk peristirahatan murid-murid.

Sarana ketiga adalah kantin, kantin ini merupakan milik warga sekitar madrasah yang menyediakan makanan ringan ataupun berat untuk siswa ketika jam istirahat tiba. Posisi kantin berada di dalam lingkungan madrasah, merupakan kantin resmi dari madrasah yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Dan banyak masyarakat yang menitipkan dagangannya ke kantin madrasah. Partisipasi semacam ini sangat membantu pihak sekolah mengingat kebutuhan pangan sangat penting bagi siswa.

Selain itu, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan adalah pengawasan yang diberikan oleh pihak komite madrasah dalam proses pengadaan yaitu pihak komite madrasah terlihat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana madrasah, dengan terlibatnya komite madrasah bersama dengan beberapa guru menjadi panitia pelaksana pengadaan sarana dan prasarana madrasah, maka masyarakat akan terlibat langsung dalam proses pengadaan sarana dan prasarana madrasah, seperti pembangunan gedung, pembelian peralatan, perbaikan keramik dan lain-lain.¹³⁹

¹³⁸ Wawancara dengan Muhemin, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 8 April 2017.

¹³⁹ Wawancara dengan Imam Syafi'i, Sekretaris Komite MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 7 April 2017.

Dari hal tersebutlah masyarakat dapat mengontrol jalannya proses pengadaan sarana dan prasarana dengan maksimal. Tentunya pula partisipasi masyarakat juga tetap berlanjut dalam pengadaan sumbangan sarana dan prasarana.

Keterlibatan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan sangat penting, di mana masyarakat merupakan salah satu komponen yang tak dapat dipisahkan dari pendidikan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi hasil dari hubungan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dengan Madrasah dalam bidang pendidikan. Hal tersebut menjadi tujuan untuk lebih meningkatkan solidaritas masyarakat terhadap pendidikan demi meningkatnya sebuah mutu pendidikan.

Hal-hal yang dilakukan masyarakat dalam evaluasi antara lain:

- 1) Evaluasi Fisik, masjid dan mushola ketika ada kerusakan warga ikut memperbaiki masyarakat dan warga madrasah bergotong royong merenovasi apabila terjadi kerusakan dalam sarana prasarana yang telah disediakan. Evaluasi peletakan lokasi kantin yang tadinya di luar lingkungan madrasah yaitu di serbang jalan madrasah sehingga membahayakan para siswa, bisa saja terjadi kecelakaan, untuk itu kantin di pindah ke dalam lingkungan madrasah agar lebih aman.
- 2) Evaluasi fungsional, masyarakat ikut menegur apabila ada peserta didik yang tidak memanfaatkan fasilitas sarana prasarana yang sudah disediakan dengan baik. Dalam penyampaian teguran, masyarakat memiliki dua cara, yaitu *pertama*, teguran langsung dari masyarakat kepada kepala madrasah dan yang *kedua*, teguran tersebut disampaikan pada saat rapat RKAS.¹⁴⁰

Hubungan antara Madrasah dengan masyarakat juga penting bagi penyelenggaraan pendidikan, untuk itu Madrasah selalu menjalin hubungan dengan pihak luar madrasah dengan baik, mulai dari orang tua siswa, komite sekolah, tokoh masyarakat, sampai dengan tokoh ulama

¹⁴⁰ Wawancara dengan Imam Syafi'i, Sekretaris Komite MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada tanggal 7 April 2017.

pondok pesantren, khususnya untuk wilayah desa penanggung juga berfungsi memperlancar arus komunikasi dari bentuk dan jenisnya. Akan tetapi tujuan akhir sebenarnya adalah untuk membangkitkan masyarakat untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan Madrasah.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen

Keberhasilan MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dalam mengelola partisipasi masyarakat, dikarenakan kepala madrasah dianggap memiliki kemampuan menanamkannya kepada seluruh *stakeholders* pendidikan di madrasah tersebut. Sejalan diimplementasikannya MBS di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen, menjadikan peluang madrasah ini mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dan itu sangat diperlukan dalam rangka menyempurnakan dan peningkatan *ownership*. Umpan balik dari berbagai pihak tersebut dinilai sangat penting, karena keberadaan masyarakat selaku orang tua/wali murid sebagai *resource center*, dianggap lebih mengetahui dan mengerti jalan panjang yang akan ditempuh, sehingga daripadanya akan muncul berbagai masukan yang cemerlang *notabene* belum terpikirkan oleh para perancang visi di madrasah tersebut, guna dijadikan milik bersama untuk merealisasikan untuk keberhasilannya.¹⁴¹

Umumnya masyarakat berpersepsi atau menaruh kepercayaan dan penilaian positif terhadap MI Ma'arif NU 1 Kalitapen. Hal ini sekiranya memberikan isyarat bahwa hubungan madrasah dengan masyarakat, khususnya orang tua/wali murid, lebih banyak menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan madrasah tersebut. Di sisi lain isyarat tersebut menggambarkan bahwa persepsi masyarakat tentang visi dan misi madrasah dalam pelaksanaan berhubungan dengan masyarakat, dan itu sifatnya tidak menunggu adanya permintaan masyarakat, tetapi madrasah berusaha secara aktif, serta mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga tercipta hubungan dan kerjasama harmonis.

¹⁴¹ Wawancara dengan Ketua Komite MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

Atas kepercayaan masyarakat tersebut, maka Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen mengaku, pihaknya akan terus membangun hubungan secara intensif dengan masyarakat untuk keberhasilan visi dan misi secara paripurna, baik dalam arti sasaran masyarakat yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, sehingga beberapa prinsip-prinsip penyelenggaraan madrasah terus menjadi pertimbangan dan perhatian.¹⁴²

Partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan MI Ma'arif NU 1 Kalitapen adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah dalam keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan kegiatan atau aktifitas yang menimbulkan suatu perubahan atau perbaikan guna mencapai suatu tujuan yang direncanakan, sehingga dapat menghasilkan bentuk lembaga pendidikan yang sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat. Peneliti menanyakan kepada Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen, tentang partisipasi masyarakat di Desa Kalitapen, bahwa:

”Saya rasa partisipasi masyarakat di sini itu bagus karena masyarakat sini itu tingkat kesadaran tentang pentingnya pendidikan itu sudah tinggi meskipun sini itu desa. Kami mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat, komite madrasah dan pengurus madrasah setiap tiga bulan sekali hari sabtu minggu terakhir”.¹⁴³

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen, di antaranya:

a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah dalam bentuk fisik banyak sekali, seperti pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan guru, dan tenaga. Kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakat, terutama masyarakat di sekitarnya. Sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara

¹⁴² Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁴³ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

lembaga pendidikan dan masyarakat. Ditegaskan lebih lanjut oleh kepala madrasah terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen, beliau mengatakan:

“Bentuk partisipasi masyarakat itu banyak di antaranya dalam bentuk dana masyarakat menyumbangkan dalam bentuk uang, dalam bentuk sarana menyumbangkan dalam bentuk bahan-bahan bangunan, pengadaan bangku-bangku, dalam bentuk tenaga masyarakat biasanya menyumbang dalam bentuk ikut gotong royong di madrasah sini, dan dalam bentuk pengadaan guru kami memilih guru dari anggota masyarakat Desa Kalitapen sini”.¹⁴⁴

Kemudian peneliti mengunjungi dari salah satu tokoh masyarakat dan juga wali murid, peneliti menanyakan terkait dengan sebagai wali murid partisipasi apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan madrasah. Beliau mengatakan: “Sebagai wali murid, saya hanya sebisa mungkin dapat membantu madrasah seperti menyumbang jariah untuk pembangunan gedung dan sarana lain”.¹⁴⁵

Di dalam partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan sarana prasarana yang dilakukan masyarakat adalah pengadaan gedung-gedung madrasah. Sama halnya yang diutarakan oleh kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen, bahwa:

“Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sini itu banyak sekali, awal pembangunan madrasah sini dulu juga hasil dari gotong royong masyarakat, fasilitas lain seperti bangku-bangku itu juga sebagian besar dari sumbangan masyarakat. Hal tersebut terbukti sudah berdirinya gedung sekolah yang megah sebanyak 4 lokal, yang bertingkat dan cukup luas, dan itu semua hasil dari gotong royong masyarakat Desa Kalitapen”.¹⁴⁶

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong secara aktif berbaur dengan warga sekolah yang bertujuan untuk memperkokoh rasa semangat kebersamaan dan kesatuan. Juga dalam

¹⁴⁴ Wawancara dengan Sahlan, Tokoh Masyarakat Desa Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Supiyah, Wali Murid MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

rangka meningkatkan mutu pendidikan, masyarakat di samping menyumbangkan dana dan tenaga juga menyumbangkan dalam bentuk barang yang terwujud pengadaan perlengkapan belajar dan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan oleh lembaga sekolah. Hal ini ditambahkan oleh Kepala Madrasah, bahwa:

“Masyarakat di sini banyak sekali membantu pengadaan fasilitas madrasah, seperti bangku, meja guru, almari buku, rak sepatu, dan tidak hanya itu mereka juga menyumbangkan bahan-bahan bangunan untuk membangun ruang kelas seperti semen, pasir, keramik dan lain sebagainya”.¹⁴⁷

Peneliti beranggapan seharusnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dalam bentuk fisik bisa meningkat jauh lebih baik ketika ada usaha sadar dari masyarakat dan tanggung jawab penuh dari keseluruhan aspek dan lapisan masyarakat secara menyeluruh, jadi tidak hanya beberapa masyarakat tertentu.

Dari hasil paparan dan analisa sebagaimana yang telah dilakukan peneliti di atas, selanjutnya peneliti uraikan hasil temuan peneliti sebagaimana berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dalam bentuk fisik di antaranya bentuk sarana prasarana, pengadaan guru dan tenaga.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sarana itu cukup baik, ini terbukti semua pengadaan gedung dari hasil gotong royong masyarakat. Dalam bentuk pengadaan guru baik, ini dapat dilihat pada jumlah guru dan karyawan yang sebagian besar dari masyarakat di sekitar MI Ma'arif NU 1 Kalitapen. Sedangkan dalam bentuk tenaga baik, ini terlihat terlihat ketika madrasah setiap mengadakan kerja bakti dan acara sosial selalu didukung dengan sepenuh hati serta aktif dalam kegiatan tersebut oleh masyarakat.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam bentuk non fisik merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat yang tidak dapat dilihat mata, namun nilai dan manfaatnya dapat dirasakan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dikarenakan sebegus dan selengkap apapun secara fisik suatu lembaga, tidak akan berhasil secara optimal tanpa adanya jasa pemikiran dan ide, konsep sekaligus manajemen yang baik dalam pengelolaan suatu lembaga. Seperti yang diungkapkan wakil kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen: "Tetapi bentuk partisipasi itu tidak harus barang atau uang, tapi ide-ide untuk memajukan madrasah itu juga sangat penting".¹⁴⁸ Partisipasi masyarakat yang non fisik dapat berupa pikiran dan kurikulum. Dimana hal tersebut merupakan ujung tombak suatu keberhasilan pendidikan. Sama halnya dengan yang diutarakan kepala madrasah: "Bentuk partisipasi masyarakat itu tidak hanya sumbangan-sumbangan, tetapi ide atau pikiran dari masyarakat itu juga merupakan salah satu dari bentuk partisipasi masyarakat".¹⁴⁹

Partisipasi masyarakat non fisik yang berbentuk pikiran dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berpendidikan dan berpengalaman, sehingga dalam mengusulkan suatu pendapat dan sebuah program pendidikan berdasarkan prinsip dan landasan yang kuat sehingga terbentuk suatu rencana yang baik dan manajemen yang terorganisir secara otomatis akan menunjang keberhasilan suatu lembaga. Dalam wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Kalitapen didapat keterangan yang sama yang diungkapkan oleh Sahlan, bahwa: "Ketika ada undangan di sekolah saya akan berusaha selalu hadir dan saya akan memberikan masukan ataupun saran sebisa dan sepaham saya".¹⁵⁰ Hal tersebut ditegaskan lebih lanjut oleh kepala madrasah,

¹⁴⁸ Wawancara dengan Nur Afiah, Wakil Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Sahlan, Tokoh Masyarakat Desa Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

beliau mengatakan: "Ketika ada rapat yang sekiranya membutuhkan masyarakat, kami selalu melibatkan masyarakat, dan hasilnya masyarakat juga antusias dan memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun".¹⁵¹

Partisipasi masyarakat dalam bentuk kurikulum dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi aktif dalam merencanakan setiap program kurikulum yang akan dilakukan. Menurut tokoh masyarakat Desa Kalitapen: "Saya itu tidak faham tentang kurikulum, saya hanya bisa minta kepada guru-guru suruh ngajari sholat dan wudhu".¹⁵²

Sedangkan dalam bentuk kurikulum peneliti beranggapan kurang baik dan masih perlu banyak peningkatan yang signifikan. Seperti yang diungkapkan Kepala Madrasah:

"Karena dalam bentuk kurikulum masyarakat hanya memberi saran kepada kepala Madrasah atau guru-guru untuk mengajarkan yang lebih spesifik beberapa materi pelajaran seperti tentang sholat, wudhu, puasa yang itu penting dan dilakukan untuk aktifitas sehari-hari".¹⁵³

Dari analisa peneliti bahwa partisipasi masyarakat yang non fisik di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen baik dalam bentuk pikiran dan kurikulum, dalam bentuk pikiran itu sudah baik. Itu terbukti setiap rapat, masyarakat hadir dan selalu memberikan ide-ide yang baik dan brilian. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat non fisik dalam bentuk kurikulum juga sangat penting sekali. Dimana program pendidikan sekolah ke depan akan tercermin dalam kurikulum, sekaligus kurikulum membutuhkan inovasi dan pembaruan dalam setiap tahap perkembangan yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) MI Ma'arif NU 1 Kalitapen

Peran dan fungsi partisipasi masyarakat, lebih khususnya melalui komite madrasah, sangat berpengaruh sekali terhadap kemajuan

¹⁵¹ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁵² Wawancara dengan Sahlan, Tokoh Masyarakat Desa Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁵³ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

pendidikan pada suatu lembaga, karena seolah-olah lembaga pendidikan tersebut diberi pengarahannya dan dikontrol secara terus menerus oleh tim komite tersebut, bahkan ada penyambung komunikasi antara si pengajar dengan orang tua peserta didik yang tentunya akan memudahkan dalam menyelesaikan suatu hambatan dalam masalah pendidikan atau akan lebih cepat menemukan titik temu baik itu dari orang tua murid, murid itu sendiri atau bahkan guru (pengajarnya).

Dalam wawancara dengan kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen menjelaskan bahwa:

“Kalau secara menyeluruh komite tidak pernah menjelaskan apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Tetapi, di dalam madrasah baik Komite Madrasah, pengurus maupun kepala madrasah apabila ada guru baru atau orang yang melamar di pendidikan terutama di madrasah ini, seorang yang baru saja diterima menjadi anggota atau bagian dari madrasah ini, baik itu melamar menjadi seorang guru ataupun melamar menjadi karyawan akan diberi wejangan khusus supaya orang yang baru diterima tersebut dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik dan juga dapat bersikap baik, tidak hanya dengan pihak madrasah atau orang yang berada di dalam madrasah tetapi juga orang yang berada di lingkungan dan masyarakat sekitar sekolah”.¹⁵⁴

Hal yang sama juga dituturkan oleh Sahlan, beliau mengatakan:

"Memang pernah Komite Madrasah memberikan masukan dan pertimbangan tentang bagaimana menjadi guru yang baik, yaitu ketika baru menjadi guru dan diterima di madrasah ini. Tetapi, untuk kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh guru tidak semuanya dijelaskan, karena komite di sini sifatnya memberikan pengarahannya dan juga nasehat".¹⁵⁵

Pernyataan yang disampaikan di atas tersebut memberikan penjelasan bahwa komite madrasah secara khusus kurang begitu berperan di dalam pengembangan kompetensi guru, karena masih adanya bantuan dari pihak yang tentunya masih bagian dari dalam sekolah. Hal ini memang semuanya bukan seluruhnya yang dibutuhkan adalah peran dari

¹⁵⁴ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Sahlan, Tokoh Masyarakat Desa Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

Komite Madrasah saja, karena kompetensi yang dimiliki oleh guru adalah berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal sehingga peranan dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru.

Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan manusia. Guru harus mempunyai kompetensi, karena guru adalah penceramah jaman. Kepala sekolah menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pengembangan guru, sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa seorang guru yang baru di terima menjadi bagian dari madrasah ini tidak hanya berperan sebagai seorang guru saja, tidak hanya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelajaran apa yang ia ajarkan kepada anak didiknya dan apa yang dia kuasai, tetapi juga bagaimana calon guru tersebut bisa beradaptasi baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah khususnya adalah pada masyarakat sekitar atau masyarakat yang terlibat dalam pendidikan”.¹⁵⁶

Wakil Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen juga menjelaskan:

“Dalam pengembangan kompetensi guru, komite madrasah memberikan arahan dan masukan ketika kami sebagai guru baru diterima di madrasah ini. Yaitu jangan sampai di sini kami hanya mengajar saja melainkan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, khususnya adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik”.¹⁵⁷

Seorang guru yang dimaksud bisa beradaptasi di atas memiliki kompetensi sosial yang lebih baik di masyarakat sekitar dengan kata lain memiliki derajat yang lebih tinggi di sekitarnya, hal ini memang realita kehidupan di masyarakat, tetapi tak jarang juga seorang guru di pandang

¹⁵⁶ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Nur Afiah, Wakil Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

sebelah mata karena hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran tanpa memiliki kompetensi, baik di lingkungan madrasah atau masyarakat.

Kompetensi sosial guru yang terjalin harmonis diperlukan kesadaran pribadi guru agar tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan kebutuhan madrasah dan kebaikan-kebaikan yang sudah ada dapat dipertahankan sehingga baik siswa dan masyarakat sekitar merasa nyaman melihat para guru memiliki dedikasi sosial yang baik dan merasa malu atau canggung bila tidak memiliki sikap sosial yang baik pula, karena itu juga sebagai contoh sikap yang harus dimiliki baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Di antara kompetensi sosial guru yang dimaksud: interaksi guru dengan siswa, sesama guru, kepala madrasah, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar. Mengenai hal tersebut komite madrasah juga dapat berperan di dalamnya, sejalan dengan hal tersebut seperti apa yang telah disampaikan komite madrasah, tentang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap guru, bahwa:

"Sebenarnya dalam madrasah ini, tidak hanya komite madrasah saja tetapi bagi calon guru yang baru diterima tersebut diberi masukan baik oleh pengurus, kepala madrasah ataupun sepele yang ada dalam madrasah ini. Calon guru tersebut dalam madrasah harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya yaitu dengan menjadi pribadi yang baik dan bisa menjaga diri maupun nama madrasah yang ditempati. Karena seorang guru adalah sebagai panutan bagi peserta didik dan tidak hanya sebatas itu saja. Karena masyarakat juga akan menilai apa saja yang dilakukan oleh guru tersebut".¹⁵⁸

Ketua Komite Madrasah MI Ma'arif NU 1 Kalitapen menjelaskan:

"Untuk pertemuan secara berkala pihak komite madrasah dan pihak madrasah yang terlibat atau ikut andil di dalamnya selalu melakukan pertemuan rutin. Dalam pertemuan tersebut membahas segala hal yang ada pada madrasah. Contohnya adalah kegiatan istighosah yang dilaksanakan rutin setiap sebulan sekali. Di dalam istighosah tersebut tidak hanya berdo'a saja melainkan ada sesuatu hal atau pokok masalah yang dibahas bersama dengan pihak

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ketua Komite MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 14 April 2017.

komite madrasah dan madrasah juga dengan masyarakat yang terlibat di dalamnya”.¹⁵⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen, bahwa:

“Ya, memang komite madrasah mengadakan pertemuan secara berkala, antara lain adalah kegiatan istighosah yang dihadiri oleh bapak-bapak guru, anggota komite madrasah dan juga tokoh masyarakat setempat, kemudian rapat terbuka seluruh guru dan karyawan MI Ma’arif NU 1 Kalitapen ini dan anggota komite madrasah”.¹⁶⁰

Dari penjelasan ketua komite madrasah dan kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat, melalui komite madrasah sudah menjalankan perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), tetapi tidak semua hal harus di pertimbangkan melalui komite madrasah karena perannya di sini adalah sebagai penasehat.

Semakin jelas bahwa komite madrasah bukan lembaga yang selalu berhubungan dengan membayar, uang, dana, anggaran dan semacamnya. Seperti tentang membayar BP3 atau uang gedung. Melainkan lembaga yang memang dibentuk untuk mewakili suara masyarakat (wali murid) agar pihak madrasah senantiasa memenuhi kebutuhan finansial dan materiil pendidikan yang kemudian menggunakannya sebagai pendukung berbagai kegiatan di satuan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya peran komite madrasah ini, maka diharapkan satuan pendidikan dapat mengembangkan diri lebih maju. Sehingga berbagai peran komite madrasah dapat membuahkan hasil yang berarti. Hal sejalan juga sudah diutarakan oleh wakil kepala madrasah tentang komite madrasah mencari penyebab tentang ketidakberhasilan guru dalam bersosialisasi dengan siswanya, yang jawabannya adalah:

¹⁵⁹ Wawancara dengan Ketua Komite MI Ma’arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 14 April 2017.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

“Apabila ada seorang guru yang tidak berhasil dalam bersosialisasi dengan siswanya itu, akan dicari penyebabnya oleh pihak-pihak yang ada di madrasah ini dan guru tersebut akan dimintai penjelasan kenapa sampai terjadi hal demikian. Nah dari sini maka akan disampaikan kepada pengurus dan Komite Madrasah untuk memberitahu apa saja kekurangan yang dimiliki oleh seorang guru tersebut, sehingga nantinya akan di temukan solusi yang terbaik”.¹⁶¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran dari komite madrasah itu tidak hanya sebatas pencari sumber dana saja. Meskipun begitu, akan tetapi tidak dapat dipastikan bahwa peran komite madrasah dapat berjalan dengan baik. Dalam prosesnya pun sering madrasah menemukan hambatan. Misal, adanya berbagai kasus siswa yang terjadi pada satuan pendidikan dimana komite madrasah tersebut bernaung. Dengan adanya sejumlah kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan akan muncul beberapa kritik dari masyarakat (wali murid) yang memojokkan pada pihak komite. Itulah salah satu hal yang mengganggu kinerja komite madrasah sebagai salah satu badan pembantu pelaksanaan pendidikan dalam satuan pendidikan.

Kemudian ditanya apakah masyarakat pernah memberikan saran tentang proses belajar mengajar di kelas, misalnya menyarankan agar guru lebih melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran di kelas atau menyarankan untuk memperbanyak tugas di rumah, kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen menjelaskan:

“Untuk sementara tidak ada saran yang diberikan masyarakat terkait dengan proses belajar mengajar di kelas. Karena di dalam pelaksanaannya belum ditemukan adanya ketidakberhasilan guru dalam mencapai hasil pembelajaran siswa, maka belum bisa dicari sebabnya dan belum ada masalah yang harus diselesaikan oleh pihak komite madrasah tentunya”.¹⁶²

Jawaban yang sama dari wakil kepala madrasah, menjelaskan:

¹⁶¹ Wawancara dengan Nur Afiah, Wakil Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁶² Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

"Saya rasa belum pernah masyarakat memberikan saran tentang proses pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan belum ditemukannya suatu masalah tentang ketidakberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran siswanya".¹⁶³

Kepala madrasah menjelaskan cara masyarakat melalui komite madrasah dalam menyarankan seorang guru untuk berkomunikasi baik dengan teman sejawat, komunitas maupun peserta didiknya, beliau menjelaskan:

"Hal yang terpenting bagi seorang guru itu harus dapat beradaptasi. Dalam hal ini baik pengurus, komite madrasah, kepala madrasah dan pihak yang terkait akan menyarankan bagi calon guru bagaimana caranya dia itu harus dapat berkomunikasi. Yaitu berkomunikasi dengan cara yang santun dan baik. Karena kemampuan berkomunikasi akan menentukan keberhasilan individu dan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik maka tujuan organisasi akan mudah dan cepat tercapai. Demikian pula dengan sebuah organisasi sekolah. Apabila guru-guru, tenaga kependidikan dan peserta didiknya dapat berkomunikasi dengan santun dan efektif maka harapan untuk menjadi sekolah yang berkualitas akan mudah dicapai".¹⁶⁴

Seperti juga yang dikatakan oleh ketua komite madrasah:

"Cara komite madrasah dalam menyarankan seorang guru adalah dengan berkomunikasi secara lisan. Ketika berlangsung acara kumpul bersama dalam rapat atau ketika waktu luang dan ada kesempatan untuk saling mengobrol, baik itu suasana formal maupun suasana informal".¹⁶⁵

Beberapa penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua hal itu harus berkoordinasi dengan komite madrasah karena di dalamnya masih ada bantuan dari pihak yang tentunya masih dalam lingkup sekolah. Di dalam madrasah tersebut yaitu MI Ma'arif NU 1 Kalitapen kerjasama yang dibangun adalah dari pihak komite madrasah, pengurus madrasah, kepala madrasah dan juga orang-

¹⁶³ Wawancara dengan Nur Afiah, Wakil Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ketua Komite MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 14 April 2017.

orang yang berada di lingkup madrasah tersebut. Dalam hal ini adalah kaitan komite madrasah dengan pemberi pertimbangan yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Karena peranan guru di sekolah tidak lagi terbatas untuk memberikan pembelajaran, tetapi harus memikul tanggungjawab yang lebih banyak, yaitu bekerjasama dengan mengelola pendidikan lainnya dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu, guru harus mempunyai kesempatan lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan di luar madrasah.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengadaan guru sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan, karena mampu mendidik anak-anak sesuai dengan kultur atau budaya dan nilai-nilai luhur didalam masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh ketua komite madrasah, mengenai pengadaan guru "Kami dari komite madrasah dalam pengadaan guru lebih mengutamakan dari warga Desa Kalitapen yang mempunyai kemampuan untuk mengajar".¹⁶⁶ Hal ini dapat dilihat pada jumlah guru dan karyawan yang sebagian besar dari masyarakat di sekitar MI Ma'arif NU 1 Kalitapen. Dan memang sudah berkompeten dan memiliki kualifikasi sebagai guru. Seperti yang ditegaskan kepala Madrasah, bahwa:

"Di Madrasah sini guru-guru dan karyawannya sebagian besar diambil dari warga Desa Kalitapen karena kami mengutamakan warga desa sini yang punya kemampuan untuk mengajar dan memang sudah berkompeten. Warga sini juga sudah banyak yang berijazah S1".¹⁶⁷

Dalam partisipasi masyarakat khususnya dalam bentuk tenaga juga sangat berpengaruh. Hal ini sangat terlihat ketika sekolah setiap mengadakan kerja bakti dan acara sosial selalu didukung dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan kepala madrasah: "Warga desa sini itu mudah sekali kalau diajak gotong royong di madrasah

¹⁶⁶ Wawancara dengan Ketua Komite MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 14 April 2017.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

sini”.¹⁶⁸ Dengan adanya kepedulian masyarakat yang mau membantu dengan tenaga mereka, maka sangatlah berperan penting dalam pengembangan madrasah yang ada di MI Ma’arif NU 1 Kalitapen. Karena tanpa adanya tenaga dari masyarakat maka kegiatan belajar mengajar tidak berjalan dengan lancar. Hal ini terbukti dengan adanya gedung-gedung yang dibangun dari jerih payah masyarakat. Suatu lembaga pendidikan yang bagus itu tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat sekitar lembaga tersebut.

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam pendidikan harus ada kerjasama antara sekolah dan masyarakat demi kelangsungan suatu lembaga. Pentingnya kerjasama atau hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat, maka penting pula direalisasikannya dalam berbagai bentuk dan cara pelaksanaannya. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh wakil kepala madrasah: “Kami berusaha kerja sama yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat di sini itu merasa diikutsertakan dalam pengembangan lembaga ini”.¹⁶⁹ Untuk itu, dalam hal ini masyarakat dapat mewujudkan mutu pendidikan, yang meliputi pendanaan, pengadaan barang atau sarana prasarana, tenaga dapat diwujudkan dalam bentuk gotong royong, pemikiran dari tokoh masyarakat, serta kurikulum dan guru. Dijelaskan lebih lanjut oleh tokoh masyarakat Desa Kalitapen, yaitu:

“Untuk mencapai suatu cita-cita yang luhur di suatu pendidikan harus ada tanggung jawab yang besar dan kerjasama yang baik antara madrasah, masyarakat, dan lembaga pemerintah, karena apabila ketiga komponen ini tidak seimbang otomatis kualitas pendidikan akan pincang. Dan bentuk fisiknya atau secara materi kami selaku masyarakat hanya bisa menyumbangkan semampu kami kalo ada dana ya kami beri dana ya kalau ada barang ya kami beri barang”.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Nur Afiah, Wakil Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Sahlan, Tokoh Masyarakat Desa Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

Masyarakat menyumbangkan dana dalam rangka pembangunan sebuah lembaga pendidikan sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk dana ini para pemimpin cenderung mengambil kebijakan untuk tidak membatasi, agar penduduk yang ekonomisnya pas-pasan tidak merasa keberatan jika dimintai sumbangan. Seperti yang diutarakan oleh kepala Madrasah, bahwa: “Untuk urusan sumbangan kami tidak memberi patokan berapa yang harus disumbangkan”.¹⁷¹ Dalam arti berapa besar dana yang harus disumbangkan adalah tergantung kemampuan ekonomi seseorang, karena keadaan ekonomi tiap-tiap penduduk tidak sama. Dalam tataran operasional masyarakat dapat mewujudkan dana melalui forum-forum formal maupun non formal, seperti pengadaan kotak amal pada forum musyawarah warga, forum majlis ta’lim dan lain sebagainya yang bersifat suka rela.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana MI Ma’arif NU 1 Kalitapen

Berdasarkan wawancara, maupun observasi yang diperoleh di lapangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan merupakan suatu program yang dilaksanakan untuk membantu Madrasah dalam mengembangkan misinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan harapan masyarakat tersebut memberikan tantangan baru bagi dunia pendidikan, yaitu bagi pemerintah dan yayasan penyelenggara pendidikan, tidak bisa lagi hanya didasari asal sekolah itu berjalan apapun keadaannya, tetapi pendidikan itu harus bermutu dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Artinya, madrasah harus diurus atas dasar profesionalisme, bukan asal jadi.

Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana madrasah, rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana madrasah dilakukan dengan menghadirkan komite madrasah sebagai wakil dari orang tua wali murid

¹⁷¹ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma’arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

dan masyarakat. Bentuk pengawasan dalam proses perencanaan sarana dan prasarana madrasah adalah seperti ikut dalam penyusunan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah, mulai dari perumusan barang yang diperlukan sampai pada tahap membuat rincian biaya yang dibutuhkan untuk melakukan belanja madrasah. Semua hal tersebut dibahas dalam rapat bersama kepala madrasah dan guru. Dengan keikutsertaan pihak komite madrasah dalam penyusunan RKAM, selain bisa membantu untuk memberikan masukan-masukan terkait penyusunan RKAM juga sekaligus mengawasi jalannya penyusunan RKAM.¹⁷²

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen yang diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan secara sukarela dan ikhlas. Hal ini dikarenakan madrasah ini berasal dari aspirasi masyarakat, aspirasi tersebut menjadi awal berdirinya yang kemudian mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat lain yang berupa pemberian tanah wakaf, bahan bangunan dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Kalitapen sebagai *stakeholder*, dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan pada umumnya dan khususnya sarana prasarana sangat dibutuhkan partisipasinya. Sehingga dengan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan madrasah peningkatan mutu/kualitas pendidikan lebih mudah tercapai.

Bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan sarana prasarana pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dapat dilihat dari penggunaan beberapa sarana dan prasarana yang di dapat dari masyarakat untuk menunjang pendidikan di madrasah. Sarana dan prasaran dari meningkatkan kualitas sarana dan prasarana MI Ma'arif NU 1 Kalitapen adalah sebagai berikut:

- 1) Masjid untuk kegiatan PHBI:

¹⁷² Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

Masjid Barokah milik warga Desa Kalitapen yang terletak di depan madrasah yang selama ini digunakan untuk tempat pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), misalnya untuk acara peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw. yang diadakan oleh MI Ma'arif NU 1 Kalitapen, dengan izin dari masyarakat, Masjid Barokah tersebut dapat digunakan untuk kegiatan madrasah. Masjid tersebut juga dimanfaatkan oleh madrasah untuk tempat berjamaah siswa. Sholat berjamaah tersebut biasanya dilakukan setiap memasuki jam sholat dzuhur.¹⁷³ Hal tersebut terus berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti sejalan masyarakat memutuskan ikut berpartisipasi dalam pengadaan sarana untuk shalat berjamaah bagi guru dan siswa.

2) Lapangan Sepak Bola

Sarana kedua adalah lapangan Desa Kalitapen, setiap kegiatan madrasah yang berbasis kegiatan jasmani seperti pelajaran olah raga, lapangan desa ini menjadi sarana utama. Mulai dari kelas satu hingga kelas enam untuk setiap jam pelajaran olah raga, lapangan desa ini menjadi tujuan utama. Hal ini berjalan secara harmoni tanpa ada rasa tidak terima dari masyarakat atau terjadi kesalahpahaman antara pihak madrasah dan masyarakat.

3) Rumah Warga Sekitar Madrasah

Rumah warga sekitar MI Ma'arif NU 1 Kalitapen sering digunakan untuk fasilitas dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan madrasah. Sebagai contoh, saat MI Ma'arif NU 1 Kalitapen membutuhkan ruang kelas baru, karena banyaknya siswa baru yang mendaftar, madrasah menggunakan rumah-rumah warga sekitar madrasah untuk menunjang proses belajar mengajar, selama proses pembangunan ruang kelas, dan itu tanpa dipungut biaya

¹⁷³ Wawancara dengan Sahlan, Tokoh Masyarakat Desa Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

kontrak (gratis), bahkan warga secara sukarela menyediakan konsumsi kepada pekerja yang membangun gedung madrasah tersebut.¹⁷⁴

4) Kantin untuk peristirahatan murid-murid.

Sarana ketiga adalah kantin, kantin ini merupakan milik warga sekitar madrasah yang menyediakan makanan ringan ataupun berat untuk siswa ketika jam istirahat tiba. Posisi kantin-kantin pun tidak berada di dalam lingkungan madrasah melainkan di luar lingkungan madrasah (bersebrangan jalan dengan madrasah). Di dalam madrasah tidak ada kantin resmi dari madrasah sehingga partisipasi semacam ini sangat membantu pihak sekolah mengingat kebutuhan pangan sangat penting bagi siswa.

Selain itu, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan adalah pengawasan yang diberikan oleh pihak komite madrasah dalam proses pengadaan yaitu pihak komite madrasah terlihat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana madrasah, dengan terlibatnya komite madrasah bersama dengan beberapa guru menjadi panitia pelaksana pengadaan sarana dan prasarana madrasah, maka masyarakat akan terlibat langsung dalam proses pengadaan sarana dan prasarana madrasah, seperti pembangunan gedung, pembelian peralatan, perbaikan keramik dan lain-lain.¹⁷⁵

Dari hal tersebutlah masyarakat dapat mengontrol jalannya proses pengadaan sarana dan prasarana dengan maksimal. Tentunya pula partisipasi masyarakat juga tetap berlanjut dalam pengadaan sumbangan sarana dan prasarana. Hubungan antara Madrasah dengan masyarakat juga penting bagi penyelenggaraan pendidikan, untuk itu Madrasah selalu menjalin hubungan dengan pihak luar madrasah dengan baik, mulai dari orang tua siswa, komite sekolah, tokoh masyarakat, sampai dengan tokoh ulama pondok pesantren, khususnya untuk wilayah desa penanggulangan

¹⁷⁴ Wawancara dengan Indah Zubaedah, Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Sahlan, Tokoh Masyarakat Desa Kalitapen pada tanggal 12 April 2017.

juga berfungsi memperlancar arus komunikasi dari bentuk dan jenisnya. Akan tetapi tujuan akhir sebenarnya adalah untuk membangkitkan masyarakat untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan Madrasah.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul

Bentuk peran yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah berupa, dana, tenaga, ikut serta dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, memberikan ide/pemikiran, pengawasan kepada anak masing-masing bagi wali murid, mengisi acara di beberapa kegiatan sekolah dan bantuan dalam hal pelaksanaan kegiatan. Menurut hasil wawancara dan observasi, masyarakat melakukan peran dengan cara mengikuti jadwal dari madrasah yang ditetapkan secara rutin, sedangkan pelaksanaan peran yang dilakukan dengan jadwal yang tidak rutin atau dilakukan ketika masyarakat menginginkan yaitu peran yang berupa tenaga, dana, memberikan materi keagamaan. Selain peran yang telah disebutkan di atas masyarakat juga memberikan perannya ketika ada kegiatan di madrasah seperti perpindahan madrasah, peringatan 17 agustus dan Peringatan Hari Besar Islam.

Pembentukan dan pengangkatan pengurus komite madrasah pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen warga madrasah (*stakeholder*) mulai dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat umum lainnya yang mempunyai komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan khususnya pendidikan Muhammadiyah. Peran yang telah dijalankan Komite Madrasah bersama MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Cabang Purwojati adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul;

- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul; dan
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul.

Dalam proses penentuan kebijakan yang dilakukan kepala MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Agama RI ditambah dengan ketentuan khusus lainnya pada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Misalnya pada aspek kurikulum, selain mengacu pada kurikulum yang dicanangkan pemerintah juga diperkaya dengan kurikulum khusus pada aspek keIslaman dan ke-muhammadiyah-an.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mengoptimalkan layanan kepada masyarakat serta menumbuh-kembangkan budaya demokrasi pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul ini, yakni upaya kepala madrasah untuk melibatkan semua komponen dalam forum komite madrasah baik guru, orang tua, maupun masyarakat lainnya dalam beberapa kebijakan yang diambil. Di samping itu, kepala madrasah senantiasa menjalin komunikasi yang kondusif dan harmonisasi antar unsur-unsur pendidikan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas madrasah.

Keterlibatan semua komponen madrasah dalam penentuan kebijakan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul dapat dilihat dalam penentuan kebijakan masalah keuangan. Sebelum menentukan kebijakan masalah keuangan, pihak pengurus madrasah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Banyumas serta komite madrasah terlebih dahulu mendiskusikannya dengan berbagai komponen lainnya. Di samping itu, pelibatan komponen madrasah dalam menentukan kebijakan juga dapat

dilihat dari keterlibatan mereka dalam merencanakan pengembangan minat siswa. Begitu juga halnya dengan pengadaan fasilitas atau sarana pendidikan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul semua komponen sekolah dilibatkan, sebelum sarana atau fasilitas itu diadakan terlebih dahulu dibicarakan (didiskusikan) dengan berbagai komponen yang ada. Pelibatan semua komponen madrasah pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul juga dapat dilihat dari pelaksanaan evaluasi madrasah. Pihak madrasah senantiasa melibatkan mereka agar dapat menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan dapat memberikan alternatif pemecahan. Hal ini ditegaskan oleh kepala MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul:

“Kami mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh *stakeholder* madrasah dua kali dalam setahun, di awal dan akhir tahun pelajaran. Yang hadir seperti orangtua siswa, tokoh masyarakat, perangkat Desa Karangtalun Kidul. Biasanya dalam pertemuan tersebut madrasah mendengarkan keluhan, kritik, saran dan ide dalam pengembangan madrasah”.¹⁷⁶

Walaupun demikian, tidak semua kebijakan yang diambil pihak MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul melibatkan semua komponen madrasah. Terutama dalam hal rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan pengurus yayasan bersama kepala MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin agar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang direkrut nantinya memiliki kesamaan visi dan misi dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Terutama tenaga pendidik yang akan mengajar mata pelajaran ke-Islaman harus sesuai dengan pemahaman yang diyakini Muhammadiyah. Walaupun dalam kenyataannya, juga terdapat beberapa guru yang diperbantukan pemerintah (guru PNS) pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan paham Muhammadiyah, tetapi tidak sampai menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa. Untuk menyamakan persepsi tersebut, pihak yayasan dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Cabang Purwojati senantiasa melakukan pendekatan dengan guru yang bersangkutan agar dapat

¹⁷⁶ Wawancara dengan Syahidan, Kepala MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 28 Maret 2017.

menyesuaikan diri agar sejalan dengan visi dan misi lembaga pendidikan Muhammadiyah, lewat berbagai pengajian keIslaman dan Kemuhammadiyah baik yang disampaikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah maupun Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

Terhadap partisipasi masyarakat dengan berbagai bentuknya, MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul mempunyai cara dan bentuk yang berbeda dalam merespon partisipasi mereka sesuai dengan bentuk dan partisipasinya. Kaitannya dengan partisipasi masyarakat, MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul menjadi fasilitator bagi pertemuan orang tua siswa dengan pengurus komite madrasah dan Yayasan Muhammadiyah. Di samping itu, MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul juga memberikan kebebasan kepada anggota masyarakat untuk mengeluarkan gagasan, ide, dan harapan-harapan mereka.

Desentralisasi pendidikan menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas atau pertanggung jawaban madrasah terhadap kegiatan dan hasil pendidikan yang telah dicapai. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa manajemen madrasah khususnya yang berkaitan dengan perencanaan penggunaan biaya pendidikan amat tertutup. Hanya kepala madrasah dan bendaharawan saja yang mengetahui berapa besar dana yang dihimpun, dan hanya mereka juga yang mengetahui untuk apa dana tersebut dibelanjakan dan dipertanggung jawabkan.

Transparansi dan akuntabilitas yang selama ini telah dilakukan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul diketahui berbentuk laporan perkembangan madrasah yang disampaikan dalam forum rapat komite madrasah, Yayasan Muhammadiyah serta Majelis Dikdasemen Muhammadiyah Cabang Purwojati. Laporan tersebut memuat informasi keadaan madrasah, prestasi yang telah dicapai dan faktor pendukung program lainnya. Kesadaran akan tuntutan transparansi dan akuntabilitas bagi MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul didasari sebagai hak seluruh warga madrasah untuk mengetahui kinerja dan hasil kerja madrasah. Hal tersebut

dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan sikap orang tua siswa agar senantiasa melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja sekolah. Dengan demikian, setiap warga sekolah dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul.

Keikutsertaan masyarakat lainnya dalam kegiatan pendidikan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan. Dalam kegiatan tersebut masyarakat sekitarnya baik secara institusional maupun individual senantiasa dilibatkan baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai pendukung dalam kegiatan tersebut. Untuk mendukung ketertiban, keamanan dan disiplin siswa, MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul senantiasa mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif bagi terlaksananya proses pembelajaran, serta memberikan kontrol sosial agar para siswa tidak melakukan tindakan asusila. Masyarakat ikut terlibat melakukan pengawasan terhadap para siswa MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul terutama pada saat jam belajar berlangsung, sehingga dapat mengantisipasi adanya siswa yang membolos serta melakukan tindakan asusila lainnya di luar madrasah.

Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu pihak MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul juga senantiasa menggalang dukungan dari masyarakat luas pada umumnya dan orang tua siswa pada khususnya baik dalam bentuk material maupun non material. Dukungan dalam bentuk material berupa dana (*financial*) yang diberikan masyarakat untuk menyukseskan suatu kegiatan tertentu, sementara dukungan dalam bentuk non material berupa saran, ide, dan masukan yang konstruktif bagi terlaksananya suatu kegiatan tertentu.

MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul juga bekerjasama dengan pihak kepolisian khususnya Polsek Purwojati untuk memberikan pemahaman tentang ketertiban berlalu lintas dan pencegahan tindakan kriminal. Hal itu dilakukan terkait banyaknya siswa MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul yang diantar jemput menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) berangkat ke sekolah karena jarak rumah mereka yang relatif jauh dari lokasi madrasah. Kerjasama tersebut dimaksudkan pihak MI Muhammadiyah

Karangtalun Kidul untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas, perilaku ugal-ugalan di jalanan serta tindakan negatif lainnya. Dalam merespons partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul, melalui pemanfaatan terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan, maka pihak MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul senantiasa berupaya lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada semua warga madrasah, MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul membuka kebebasan akademis bagi seluruh warga sekolah. Hal ini diakui beberapa guru, bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan pada guru dan karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan, pendidikan serta pengembangan bakat sesuai dengan kebutuhan individualnya masing-masing. MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul sebagai lembaga pendidikan yang keberadaannya tidak terlepas dari dukungan dan upaya masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai induk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua proses penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat bagi MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat dan bermakna bagi proses belajar mengajar.

Pandangan masyarakat terhadap guru adalah sebagai seorang yang dapat menjadi panutan. Dalam pandangan masyarakat guru memiliki tempat tersendiri karena fakta menunjukkan bahwa ketika seorang guru berbuat senonoh, menyimpang dari ketentuan atau kaidah-kaidah masyarakat dan menyimpang dari apa yang diharamkan masyarakat, langsung saja masyarakat memberikan suara sumbang kepada guru itu. Kenakalan anak yang kini menggenjala di berbagai tempat, sering pula tanggungjawabnya ditudingkan kepada guru sepenuhnya dan sering pula dilupakan apa yang dilihat, didengar anak serta pergaulan anak dalam

kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari hal yang dianggap kecil terlebih dahulu yaitu komunikasi yang terjadi antara guru dan peserta didik.

Komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh guru selama mengajar diharapkan tidak hanya terfokus pada pelajaran semata, tetapi juga berpengaruh pada pengembangan *soft skill* mereka. Para guru harus bisa memahami siswa/siswinya, terutama mereka yang memasuki usia remaja yang rentan dengan berbagai macam pengaruh dari lingkungan. Dengan adanya komunikasi antarpribadi guru dengan siswa diharapkan dapat membentuk konsep diri yang telah ada sebelumnya menjadi lebih baik. Selain itu, proses komunikasi seperti ini juga dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, karena dalam komunikasi harus ada timbal balik (*feedback*) antara komunikator dengan komunikan. Begitu juga dengan pendidikan membutuhkan komunikasi yang baik, sehingga apa yang disampaikan, dalam hal ini materi pelajaran, oleh komunikator (guru) kepada komunikan (siswa) bisa dicerna oleh siswa dengan optimal, sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai bisa terwujud. Tidak mungkin bila komunikasi dilakukan tidak baik maka hasilnya akan bagus. Tentunya tidak hanya dengan siswa saja, komunikasi yang terjalin dengan baik adalah antara guru dan juga orang tua atau wali murid, hal ini sejalan dengan jawaban Wakil Kepala Hubungan Masyarakat, tentang cara seorang guru berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik, sebagai berikut:

“Cara seorang guru berkomunikasi dengan orang tua peserta didik adalah dengan berbicara langsung kepada orang tua atau wali murid peserta didik ketika pengambilan raport. Di situ nanti akan dijelaskan apa saja kesulitan yang dialami oleh peserta didik sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar yang menurun dan apa saja hal yang menyebabkan semua itu dapat terjadi. Sehingga dari situ orang tua atau wali murid akan mencari tahu penyebabnya dan akan dikonfirmasi kepada guru agar di peroleh solusi yang terbaik bagi siswa tersebut. Selain melalui pembagian raport juga melalui sosialisasi oleh kepala madrasah secara menyeluruh kepada orang tua atau wali murid yaitu dengan mengadakan rapat antara pihak madrasah dengan orang tua atau wali murid. Di dalam rapat tersebut orang tua atau wali murid

akan diberi arahan supaya mendorong anaknya dalam belajar harus bersungguh-sungguh dan juga bisa memberikan pengawasan kegiatan apa saja yang diikuti oleh anaknya tersebut selain kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini, antara guru, pihak madrasah dan orang tua atau wali murid bisa saling mengawasi dan menjalin kerjasama untuk kebaikan peserta didik”.¹⁷⁷

Pernyataan yang sama juga dari kepala MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul, menjelaskan:

“Dalam berkomunikasi dengan orang tua peserta didik tentang kesulitan belajar peserta didik yaitu dengan disampaikan kepada wali kelas dan dari wali kelas akan disampaikan langsung kepada orang tua peserta didik yang sedang mengalami penurunan prestasi belajar tersebut ketika pengambilan raport”.¹⁷⁸

Dari keterangan beliau dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya tentang kesulitan belajar peserta didik, guru dalam menyampaikannya adalah dengan melalui rapat sosialisasi dan juga ketika pembagian raport peserta didik.

Seperti diketahui, dalam setiap sekolah terdapat seorang kepala madrasah dan beberapa orang guru ditambah dengan beberapa orang personal madrasah lainnya sesuai dengan kebutuhan madrasah tersebut. Berhasil tidaknya madrasah membawakan misinya akan banyak bergantung kepada semua manusia yang terlibat di dalamnya. Agar setiap personel madrasah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik di antara sesama personel yaitu hubungan baik antara kepala madrasah dengan guru, guru dengan guru, dan kepala madrasah ataupun guru dengan semua personel madrasah lainnya. Semua personel madrasah ini harus dapat menciptakan hubungan baik dengan anak didik di madrasah tersebut.

Profesi sebagai seorang guru harus diakui dengan jujur bahwa sejauh ini profesi sebagai guru masih memerlukan pembinaan yang

¹⁷⁷ Wawancara dengan Ani Muamalah, guru MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 20 April 2017.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Syahidan, Kepala MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 28 Maret 2017.

sungguh-sungguh. Karena yang berada di sebuah lembaga madrasah itu tidak hanya orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama tetapi banyak sekali pemikiran yang ada dalam benak masing-masing pribadi. Ada yang bersikap kurang sungguh-sungguh dan kurang bijaksana, sehingga hal ini menimbulkan keretakan di antara sesama pengajar. Hal ini tidak boleh terjadi karena kalau diketahui murid ataupun orang tua murid, apalagi masyarakat luas, mereka akan resah dan tidak percaya kepada madrasah. Hal ini juga dapat mendatangkan pengaruh yang negatif kepada anak didik. Oleh sebab itu, agar jangan terjadi keadaan yang berlarut-larut, kita perlu saling maaf memaafkan dan memupuk suasana kekeluargaan yang akrab antara sesama guru dan aparatur di madrasah. Hal lain yang dilakukan adalah bagaimana seorang guru itu dapat menjalankan perannya dengan baik yaitu seorang guru harus melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tempat guru bekerja. Sejalan dengan hal tersebut seperti apa yang telah disampaikan komite madrasah, yaitu:

“Guru harus melaksanakan berbagai program agar apa yang dilakukan tersebut nantinya akan bermanfaat, tidak hanya dengan madrasah atau tempat bekerja tetapi juga bermanfaat untuk diri dan lingkungan sekitarnya. Karena sesuatu yang terprogram itu akan dapat dilaksanakan dengan baik”.¹⁷⁹

Penjelasan yang serupa dari Ani Muamalah:

“Sebagai guru harus melaksanakan berbagai program adalah untuk mendukung tempat bekerja agar terjaga dan semakin meningkatkan kualitas pendidikan tempat guru bernaung tersebut. Tentunya, apa yang diprogramkan tersebut mengandung manfaat yang tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan sekitar tempat bekerja”.¹⁸⁰

Hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan bentuk hubungan komunikasi ekstern yang dilaksanakan atas dasar kesamaan

¹⁷⁹ Wawancara dengan Nurudin, Komite MIM Karangtalun kidul pada tanggal 20 April 2017.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ani Muamalah, guru MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 20 April 2017.

tanggung jawab dan tujuan. Hubungan dengan masyarakat tersebut adalah suatu proses komunikasi antara madrasah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan guna mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan madrasah. Untuk itu, diperlukan adanya suatu badan penghubung atau penyalur antara sekolah dan juga masyarakat, badan penghubung itulah yang disebut dengan Komite Madrasah. Komite Madrasah tidak hanya sebatas pencari sumber dana saja, dalam kaitannya dengan ini Komite Madrasah harus bisa menjalankan perannya yaitu sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Tentunya tidak semua masyarakat menerima semua keadaan yang ada di madrasah, sebagian dari masyarakat yang sangat peduli dengan pendidikan akan melihat suatu kejadian yang mungkin tidak baik untuk nama madrasah, maka hal tersebut pasti masyarakat akan membicarakannya, dan bisa tersalur melalui pihak komite madrasah. Dimana komite madrasah dapat mengkomunikasikan atau menyampaikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap madrasah, salah satunya adalah tentang guru yang kurang bersosialisasi di masyarakat. Cara komite madrasah untuk menegur guru yang kurang sosialisasi tersebut tidak langsung menuduh guru yang memang kurang bergaul tetapi dikatakan secara menyeluruh. Dalam kaitannya dengan hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Nurudin, komite MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul, menjelaskan:

"Cara komite madrasah dalam mengkomunikasikan dan menyampaikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap madrasah terutama bagi guru yang kurang bersosialisasi di masyarakat adalah ketika ada rapat terbuka antara komite madrasah dan juga pihak madrasah yang di dalamnya ada kepala madrasah, wakil kepala, guru dan juga karyawan. Dari rapat tersebut, tidak dikatakan siapa yang kurang bergaul di masyarakat tetapi disosialisasikan secara menyeluruh kepada orang yang menghadiri rapat tersebut. Jadi, tidak menyudutkan seorang saja, sehingga berlaku untuk semuanya. Selain itu jika di rasa terlalu menyimpang maka akan disampaikan secara tertutup, yang hanya

diketahui oleh komite madrasah, pengurus dan juga kepala madrasah”.¹⁸¹

Ungkapan yang serupa dari Syahidan, kepala MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul:

“Ketika ada rapat terbuka antara pihak madrasah, anggota komite madrasah yang didalamnya ada bapak/ibu guru, karyawan dan wakil-wakil kepala madrasah. Dari rapat itu akan disampaikan apa saja keluhan dan pengaduan dari masyarakat, sehingga semua yang ada mengetahui sesuatu yang diinginkan dan menjadi uneg-uneg dari masyarakat. Karena masyarakat akan selalu menilai dan memberikan masukan untuk kemajuan madrasah dan hal ini disampaikan melalui Komite Madrasah”.¹⁸²

Dalam meningkatkan hubungan guru atau pihak madrasah dengan masyarakat terjalin baik dan berlangsung secara terus menerus, maka diperlukan peningkatan profesi guru dalam hal berhubungan dengan masyarakat. Guru di samping mampu melakukan tugasnya masing-masing di madrasah, mereka juga diharapkan dapat dan mampu melakukan tugas-tugas hubungan dengan masyarakat. Mereka bisa mengetahui aktivitas masyarakatnya, paham akan adat istiadat, mengerti aspirasinya, mampu membawa diri di tengah masyarakat, bisa berkomunikasi dan mewujudkan cita-cita mereka. Kemampuan guru membawa diri baik di tengah masyarakat dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap guru. Guru harus bersikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, responsif dan komunikatif terhadap masyarakat, toleran dan menghargai pendapat mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul adalah dengan melakukan kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Munazah Ajibarang. Pondok pesantren tersebut sering membantu madrasah dalam pelatihan kepada siswa terkait dengan masalah pendidikan agama Islam, dengan mengirimkan santri-santrinya untuk membantu madrasah tersebut.

¹⁸¹ Wawancara dengan Nurudin, Komite MIM Karangtalun kidul pada tanggal 20 April 2017.

¹⁸² Wawancara dengan Syahidan, Kepala MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 20 April 2017.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul memiliki berbagai bentuk partisipasi, baik berupa tenaga, uang, ide dan gagasan. Dalam pengadaan sarana prasarana, MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul mengadakan rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana madrasah dilakukan dengan menghadirkan komite madrasah sebagai wakil dari orang tua wali murid dan masyarakat. Bentuk pengawasan dalam proses perencanaan sarana dan prasarana madrasah adalah seperti ikut dalam penyusunan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah, mulai dari perumusan barang yang diperlukan sampai pada tahap membuat rincian biaya yang dibutuhkan untuk melakukan belanja madrasah. Semua hal tersebut dibahas dalam rapat bersama kepala madrasah dan guru.¹⁸³

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul yang diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan secara sukarela dan ikhlas. Hal ini dikarenakan madrasah ini berasal dari aspirasi masyarakat, aspirasi tersebut menjadi awal berdirinya yang kemudian mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat lain yang berupa pemberian tanah wakaf, bahan bangunan dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Karangtalun Kidul sebagai *stakeholder*, dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan pada umumnya dan khususnya sarana prasarana sangat dibutuhkan partisipasinya. Sehingga dengan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan madrasah peningkatan mutu/kualitas pendidikan lebih mudah tercapai.

Bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan sarana prasarana pendidikan di MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul dapat dilihat dari penggunaan beberapa sarana dan prasarana yang di dapat dari masyarakat untuk menunjang pendidikan di

¹⁸³ Wawancara dengan Syahidan, Kepala MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 20 April 2017.

madrasah. Sarana dan prasaran dari meningkatkan kualitas sarana dan prasarana MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul adalah sebagai berikut:

1) Masjid Darussalam

Masjid Darussalam adalah masjid yang berada tepat di depan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul dan merupakan masjid warga Desa Karangtalun Kidul. Masjid tersebut sering sekali difungsikan oleh madrasah sebagai tempat dalam kegiatan-kegiatan yang berskala besar dan membutuhkan ruang yang luas. Masjid tersebut juga dimanfaatkan oleh madrasah untuk tempat berjama'ah sholat dzuhur dan shalat jum'at, pembelajaran fiqih pada praktek ibadah.¹⁸⁴ Hal tersebut ditegaskan oleh kepala MIM Karangtalun Kidul:

*“Alhamdulillah mba dengan adanya masjid di depan madrasah, kami jadi tidak kesulitan jika menyelenggarakan kegiatan yang berskala besar dan nda perlu sewa gedung. Madrasah juga tidak perlu membangun mushola, jadi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sarana lain”.*¹⁸⁵

2) Lapangan Sepak Bola

Dalam pembelajaran pendidikan olahraga di MIM Karangtalun Kidul, guru sering memanfaatkan lapangan Desa Karangtalun Kidul untuk praktek materi olahraga. Hal ini berjalan secara harmoni tanpa ada rasa tidak terima dari masyarakat atau terjadi kesalahpahaman antara pihak madrasah dan masyarakat.

3) Rumah Warga

Rumah warga sekitar MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul sering digunakan untuk fasilitas dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan madrasah. Sebagai contoh, saat MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul menjadi tuan rumah acara “Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) Tingkat Kecamatan Purwojati”, masyarakat dengan sukarela mengizinkan rumahnya untuk transit peserta AKSIOMA, bahkan dengan ikhlas

¹⁸⁴ Wawancara dengan Nurudin, Komite MIM Karangtalun kidul pada tanggal 20 April 2017.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Syahidan, Kepala MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 20 April 2017.

membantu konsumsinya. Selain itu, rumah warga sekitar madrasah juga pernah digunakan sebagai ruang kelas, karena madrasah kekurangan ruang kelas, selama proses pembangunan ruang kelas baru, dan itu tanpa dipungut biaya kontrak (gratis), bahkan warga secara sukarela menyediakan konsumsi kepada pekerja yang membangun gedung madrasah tersebut.¹⁸⁶

Selain itu, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan adalah pengawasan yang diberikan oleh pihak komite madrasah dalam proses pengadaan yaitu pihak komite madrasah terlihat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana madrasah, dengan terlibatnya komite madrasah bersama dengan beberapa guru menjadi panitia pelaksana pengadaan sarana dan prasarana madrasah, maka masyarakat akan terlibat langsung dalam proses pengadaan sarana dan prasarana madrasah, seperti pembangunan gedung, pembelian peralatan, perbaikan keramik dan lain-lain.¹⁸⁷ Selain itu, menurut kepala MIM Karangtalun Kidul, bahwa:

“Banyak bantuan dan sumbangan masyarakat dalam perbaikan dan pengembangan sarana prasarana. Baru-baru ini, masyarakat secara urunan berhasil membeli mobil untuk alat transportasi antar jemput siswa. Karena siswa yang bersekolah di sini tidak hanya warga sekitar, tapi dari desa tetangga juga banyak, yang jaraknya cukup jauh dari madrasah. Maka dengan adanya mobil tersebut, bisa membantu siswa untuk bisa data tepat waktu. Mobil tersebut juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan di masyarakat jika diperlukan”.¹⁸⁸

Dari hal tersebutlah masyarakat dapat mengontrol jalannya proses pengadaan sarana dan prasarana dengan maksimal. Tentunya pula partisipasi masyarakat juga tetap berlanjut dalam pengadaan sumbangan sarana dan prasarana. Keterlibatan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan sangat penting, di mana masyarakat merupakan salah satu komponen yang tak dapat dipisahkan dari pendidikan, sehingga

¹⁸⁶ Wawancara dengan Syahidan, Kepala MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 20 April 2017.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Nurudin, Komite MIM Karangtalun kidul pada tanggal 20 April 2017.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Syahidan, Kepala MIM Karangtalun Kidul pada tanggal 20 April 2017.

partisipasi masyarakat menjadi hasil dari hubungan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dengan madrasah. Hal tersebut menjadi tujuan untuk lebih meningkatkan solidaritas masyarakat terhadap pendidikan demi meningkatnya sebuah mutu pendidikan.

C. Analisis Data

Di dalam masyarakat yang demokratis, madrasah seyogyanya dapat dijadikan sebagai pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan-perubahan masyarakat di dalam bidang-bidang kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi. Madrasah hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat sekitarnya dalam memberikan pelayanan atas pendidikan yang berkualitas, dan berarti pula menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendidikan pada umumnya. Madrasah diharapkan mampu menggali dan mengelola semua jenis partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program madrasah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik berupa partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan maupun partisipasi sosial. Upaya meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat, maka diperlukan hubungan dan kerjasama yang harmonis antara madrasah dan masyarakat serta mempunyai kemampuan manajerial dan tenaga yang profesional untuk menciptakan program-program madrasah yang berkualitas.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, partisipasi masyarakat sangat penting, sebagai salah satu elemen pendukung terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat, sehingga manfaat kehadiran pendidikan benar-benar di masyarakat. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan, dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak melaksanakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan

dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Adapun pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber lainnya. Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan memerlukan kesadaran masyarakat akan arti penting peran mereka dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk menghasilkan kerjasama dan tingkat partisipasi yang tinggi, pertama kali madrasah harus menyadarkan masyarakat akan peran mereka dalam pembangunan pendidikan. Setelah kesadaran itu tercapai, madrasah mesti melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan masyarakat agar kesadaran masyarakat berbuah dukungan. Untuk itu, manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat perlu dikelola dengan lebih baik. Elemen masyarakat yang perlu didekati untuk melakukan kerjasama dan berpartisipasi dalam pengembangan madrasah adalah komite madrasah. Komite madrasah adalah representasi dari warga madrasah yang terdiri dari perwakilan guru, kepala madrasah, orang tua siswa, dan warga masyarakat. Sebagai representasi dari warga madrasah, komite madrasah mempunyai kepentingan terhadap pengembangan madrasah, karena itu sangatlah wajar bila mereka diajak untuk bekerjasama membangun madrasah.

Pembahasan utama penelitian ini adalah tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, yaitu di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen, dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul. Permasalahan khusus dari penelitian ini menguraikan dan menganalisis tentang perbedaan dan persamaan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas tersebut.

1. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

Berdasarkan pada hasil penelitian pada bab sebelumnya, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dinyatakan sebagai berikut:

Proses partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dibangun baik oleh kepala madrasah, komite madrasah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati adalah menggunakan strategi pengorganisasian madrasah dalam penyusunan perencanaan program madrasah, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam komite madrasah melakukan posisi tawar dan terus menerus berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan lebih disukai daripada mobilisasi oleh madrasah sebelum mengupayakan masyarakat untuk terlibat di dalam perencanaan program kerja di madrasah kemudian mengharapkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya walaupun dalam derajat yang paling rendah (baca : pasif), dengan satu penekanan utama, tidak boleh menentang program yang sudah dirancang oleh madrasah serta lebih disukai daripada strategi pemberdayaan yang dilakukan madrasah, dengan mencoba melakukan penyadaran kepada masyarakat agar menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang terkait dengan mereka.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati yang dibangun, baik oleh kepala madrasah, komite madrasah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat secara umum adalah memperhatikan/menyerap dan memberikan tanggapan informasi, baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya, lebih disukai daripada bentuk partisipasi masyarakat melalui

kontak dengan pihak lain dalam hal ini dengan sekolah dan *stakeholder* yang lain dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan sekolah demikian juga untuk bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan sekolah termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana), perasaan terlibat dalam pembangunan madrasah termasuk keputusan menyangkut nasib mereka dan partisipasi dalam hal bersifat teknis.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati tersebut, telah sesuai dengan pendapat Suryosubroto, bahwa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan atau proses pembangunan dalam hal ini pendidikan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dibangun baik oleh kepala madrasah, Komite madrasah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati adalah tingkatan partisipasi masyarakat secara umum berturut-turut, sebagaimana pendapat Effendi dalam Siti Irene A.D., dari yang paling tinggi/atas *citizen controle* kemudian diikuti keterlibatannya pada level *manipulation*, kemudian *consultation* dan keterlibatannya pada level *joint planning*.

Fungsi partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati yang dibangun baik oleh kepala madrasah, komite madrasah maupun tokoh masyarakat/tokoh agama pada madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati adalah secara umum berurutan dari fungsi menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan fungsi mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan serta fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidiah di Kecamatan Purwojati secara umum adalah adanya hambatan pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan hambatan pada saat mengorganisir dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, dan melaksanakan manajemen pendidikan yang bermutu serta pada saat mengawasi penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu. Hambatan pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, misalnya saja peran komite madrasah yang hanya sekedar menyerahkan sepenuhnya kepada kepala madrasah dalam membuat kebijakan penyusunan RAPBM, artinya ada komite madrasah yang hanya tinggal tanda tangan saja tanpa mau berpikir panjang tentang bagaimana merencanakan manajemen pendidikan yang bermutu.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidiah di Kecamatan Purwojati secara umum pada saat merencanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu dan pada saat mengawasi penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu, antara lain dengan dibuatnya Website madrasah yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat terutama oleh komite madrasah. Website ini merupakan wujud konkret dari *e-government* dalam bidang pendidikan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan faktor pendukung pada saat mengorganisir dan faktor pendukung pada saat melaksanakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan yang bermutu. Di samping itu, dengan dikeluarkannya kebijakan BOS dan BOSDA (guru swasta), maka membuat orangtua dan siswa terbantu dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidiah di Kecamatan Purwojati. Salah satu alasan rendahnya partisipasi masyarakat atau partisipasi pendidikan, khususnya pada kelompok

masyarakat miskin, adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi yang tinggi dari orang tua murid dalam pendidikan di madrasah atau sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauh mana masyarakat dapat diberdayakan dalam proses pendidikan di madrasah atau sekolah adalah indikator terhadap manajemen madrasah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan suatu yang esensial bagi penyelenggaraan madrasah atau sekolah yang baik. Kemudian peran serta atau dukungan masyarakat itu sendiri dari segi pelaku sangat variatif mulai dari yang bersifat individual hingga kolektif. Adapun dari segi bentuknya, partisipasi masyarakat itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan.

Partisipasi masyarakat, sebagaimana menurut E. Mulyasa, memberi kontribusi antara lain berupa tenaga, pikiran, keahlian, barang, dana, dan lainnya yang dapat diberikan kepada madrasah. Setelah madrasah menjalin kerjasama dengan pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, maka madrasah dapat memperoleh kontribusi tunai yang bisa diberikan dalam bentuk dana hibah, pemberian beasiswa, dan lainnya. Bagi madrasah yang tidak mungkin lagi untuk meminta bantuan dari pihak orang tua peserta didik karena kondisi ekonomi mereka yang sangat sulit, sedangkan alokasi dana yang diterima dari pemerintah tidak mampu memenuhi operasional madrasah. Dalam keadaan yang demikian, maka kepala madrasah, guru, dan komite madrasah duduk bersama untuk memikirkan alternatif apa yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan pengembangan madrasah. Salah satu alternatif madrasah dapat memilih untuk melakukan pendekatan kepada pengusaha terdekat dengan madrasah, perusahaan yang bekerjasama dengan madrasah atau lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtdaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas melalui komite madrasah sudah cukup aktif, walaupun apa yang diberikan komite madrasah belumlah dapat memenuhi seluruh kebutuhan madrasah. Pengurus komite madrasah

diharapkan memantau perkembangan madrasah dan terlibat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan. Kemudian komite madrasah juga dilibatkan dalam kegiatan apapun, kecuali dalam hal ujian dan penentuan nilai. Kebijakan madrasah melalui komite madrasah menjadi terbuka sehingga sebagai pengurus komite madrasah secara aktif berusaha sekuat tenaga memberikan bantuan kepada madrasah. Pelibatan masyarakat melalui komite madrasah merupakan salah satu aspek yang terus dipelihara madrasah-madrasah. Dengan adanya keterlibatan ini, beban sekolah diharapkan akan semakin ringan sehingga memungkinkan sekolah lebih konsentrasi dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, adalah merupakan bentuk partisipasi yang ekstensif. Partisipasi masyarakat sudah mulai meningkat. Meski demikian meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu madrasah masih didominasi dengan bantuan pada aspek fisik/gedung dan peralatan lainnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan, partisipasi masyarakat selayaknya tidak hanya dalam bentuk bantuan fisik dan keuangan, tetapi juga dalam proses kebijakannya, seperti dalam hal perencanaan program madrasah, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses belajar mengajar dan dalam melaksanakan evaluasi program madrasah. Peran serta masyarakat pada kegiatan-kegiatan tersebut dan pada kegiatan yang bersifat mendukung pengelolaan madrasah dan belajar anak, masih relatif rendah dan masih belum optimal. Jika mengacu pada pendapat Graham dan Phillips, mengenai bentuk partisipasi maka masih belum optimalnya partisipasi masyarakat terutama dalam proses kebijakan, menurut peneliti disebabkan karena bentuk partisipasinya adalah ekstensif.

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan salah satu wujud dan

kunci keberhasilan setiap usaha dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu pendekatan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif masyarakat perlu dikembangkan dan dibina secara terus menerus dengan upaya yang sungguh-sungguh. Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Graham dan Phillips, mengemukakan bahwa dengan partisipasi yang bertujuan untuk menyebarkan atau membagi informasi, akuntabilitas dan legitimasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan pembagian kekuasaan, maka warga negara atau masyarakat percaya bahwa mereka terlibat dalam pembagian kekuasaan (*power-sharing*) dan akan berpengaruh terhadap agenda dan hasil pelaksanaan kebijakan, sementara itu pemerintah juga dapat mengumpulkan informasi dari masyarakat sehingga dapat menyusun agenda kebijakan yang sesuai.

2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Madrasah

Dalam pelaksanaan pengembangan madrasah, sumber daya manusia sangatlah diperlukan dan bahkan menempati posisi strategis sebagai pelaku utama dalam menjalankan berbagai program pengembangan mutu madrasah. Demikian juga sebaliknya tanpa adanya dukungan SDM yang handal, nampaknya keberadaan madrasah sangat sulit untuk bisa berkembang dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di madrasah merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar, terarah, terprogram dan terpadu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (pengelola madrasah) agar dapat mengelola lembaga pendidikan Islam tersebut secara baik, sehingga madrasah tersebut menjadi bermutu dan unggul. Pengembangan sumber daya manusia di madrasah ternyata bisa dilakukan oleh berbagai pihak, seperti dilakukan oleh diri sendiri, dilakukan oleh pihak madrasah yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan perencanaan organisasi yang

disusun bersama, maupun dilakukan oleh pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah tersebut.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, dalam upaya pengembangan sumber daya manusia madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, Komite Madrasah sebagai wakil masyarakat juga memberikan pertimbangan untuk guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Sebagai Badan pendukung komite dituntut berupaya untuk meningkatkan pembelajaran dan juga pembiayaan untuk guru-guru agar meningkatkan kompetensi untuk mengikuti *workshop* dan pelatihan. Sedangkan sebagai badan pengontrol, Komite Madrasah tiap bulan selalu memantau anggaran dana yang digunakan untuk alokasi dana pendidikan dan juga memantau hasil belajar siswa. Akan tetapi untuk proses kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan oleh Komite Madrasah karena itu bukan wewenang dari Komite Madrasah. Sebagai badan mediator, Komite Madrasah masih kurang optimal dalam menjalankan perannya. Dikatakan demikian karena belum mampu melakukan kerjasama dengan dunia usaha maupun dunia industri, sehingga sumber dana yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan cara menarik uang komite sekolah atau iuran rutin orang tua siswa. Selain itu, masyarakat kebanyakan belum berperan secara aktif dalam pengembangan sumber daya manusia di madrasah. Sebagian besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari Komite Madrasah. Masyarakat hanya dapat memberi dukungan secara materi dan belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril artinya masyarakat masih belum menunjukkan rasa memiliki yang tinggi terhadap madrasah sehingga tanggungjawab dari orang tua siswa hanya sekedar membantu dana, bukan sumbangan pemikiran yang kiranya dapat membantu madrasah.

Menurut pengamatan berdasarkan pada penelitian yang telah penulis laksanakan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Purwojati sudah berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya Komite

Madrasah berada di tengah-tengah antara orang tua murid atau wali murid, murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak madrasah sebagai instansi, kepala madrasah, dan dinas pendidikan wilayahnya dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Walaupun sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi hal tersebut tidak terlepas dari bantuan pihak yang saling terkait dalam lembaga tersebut. Antara lain dalam bersosialisasi dengan masyarakat tidak hanya Komite Madrasah saja tetapi dibantu oleh kepala madrasah, beberapa guru yang memang ikut andil dalam merangkul masyarakat untuk mau berkecimpung di dunia pendidikan.

Kompetensi guru menuntut pendidik untuk harus menguasai metode mengajar, menguasai materi yang akan diajarkan dan ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan ilmu yang akan diajarkan kepada siswa. Mempunyai kepribadian yang baik untuk agar menjadi teladan bagi siswa. Menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab. Juga mengetahui kondisi psikologis siswa dan psikologis pendidikan agar dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan siswa dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan siswa. Oleh karena itu, perlunya guru senantiasa mengembangkan wawasan keilmuan yang berhubungan langsung dengan materi pelajaran, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dan dapat membantu pemahaman siswa.

Menurut Malaya Hasibuan, pengakuan masyarakat terhadap suatu profesi bersifat merit, sehingga menuntut SDM yang berkualitas. SDM bidang pendidikan, mereka bekerja dalam suatu masyarakat profesional (*professional community*) yang menuntut kejujuran profesional agar dapat memberikan layanan profesi sesuai dengan harapan masyarakat. Namun demikian, kejujuran profesional perlu disikapi dengan upaya meningkatkan profesionalitas. Untuk itu, pengembangan SDM ke arah profesional merupakan langkah strategis. SDM yang melaksanakan profesinya berlandaskan profesionalisme memiliki kemampuan untuk menyelaraskan kemampuan dirinya dengan visi dan misi lembaga. Artinya, SDM tersebut akan mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada dan mendayagunakannya

dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan manfaat dan mengakui keberadaannya.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi keterbukaan dan adanya sikap saling percaya antara madrasah dengan masyarakat. Untuk menumbuhkan kondisi keterbukaan dan sikap saling percaya, madrasah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan program, serta evaluasi program madrasah difasilitasi dan dijumpai oleh madrasah yang berfungsi mewartakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggalang dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemampuan komite madrasah melakukan peran dan fungsinya tergantung dari kemampuan komite madrasah dalam memberikan kesempatan kepada komite madrasah untuk melakukan peran dan fungsinya melalui hubungan kemitraan yang seajar.

3. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan. Sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan tidak dapat berjalan secara maksimal. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 22 Tahun 2003, dikatakan bahwa sarana prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah maupun masyarakat. Demikian juga dalam pendanaannya merupakan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian di lapangan, masyarakat sekitar madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati telah ikut dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam proses pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, perencanaannya disusun dengan kerjasama antara madrasah dengan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh E. Mulyasa, bahwa madrasah harus mengikutsertakan

masyarakat sejak proses perencanaan pengembangan madrasah dirumuskan dan disusun. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan upaya melalui rapat komite madrasah dan tokoh masyarakat serta dewan guru. Rapat tersebut membahas tentang kemajuan sarana prasarana madrasah, seperti halnya perencanaan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam madrasah, dan pertimbangan pengelolaan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RABM) serta upaya partisipasi masyarakat berbasis bimbingan dan konseling terhadap sarana prasarana yang telah disediakan oleh masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat madrasah kurang memiliki sarana dan prasarana berbasis infrastruktur dalam menunjang proses pembelajaran peserta didik, agar kemudian dapat ditemukan sebuah solusi bersama untuk setidaknya membangun beberapa fasilitas madrasah yang memadai.

Pelaksanaan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana madrasah merupakan hal wajib yang perlu ditilik keberlangsungannya. Karena penyediaan sarana pendidikan di suatu madrasah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa-masa mendatang. Berdasarkan data mdrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati yang tidak memiliki sarana prasarana infrastruktur yang lengkap dan independen, memunculkan beberapa perspektif khususnya terkait dengan kualitas pelaksanaan sarana dan prasarana. Namun bukan tidak mungkin pelaksanaan ini semuanya memiliki nilai absolut. Seperti fasilitas mushola dan masjid yang terawat serta peran aktif masyarakat dalam membina dan membimbing peserta didik khususnya ketika menjalankan rutinitas ibadah dan peringatan hari-hari besar Islam, menjadikan masjid memiliki kualitas yang cukup baik sebagai sarana pengembangan nilai spiritual dan sosial peserta didik. Begitu juga fasilitas lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh madrasah sebagai sarana olah raga ataupun kegiatan lain. Namun, keberadaan lapangan secara fisik yang bukan milik madrasah, menjadi kekurangan tersendiri terutama bagi siswa yang akan memanfaatkan fasilitas lapangan. Karena sesekali lapangan yang tersebut digunakan juga oleh sebagian masyarakat untuk

keperluan pribadi maupun kelompok. Seperti untuk menjemur hasil-hasil pertanian dan perkebunan, seperti padi, kacang hijau, dan jagung. Hal ini jelas sangat mengganggu proses pembelajaran peserta didik, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan maksimal. Seharusnya pihak madrasah dan tokoh masyarakat dapat mengontrol penggunaan lapangan secara pribadi maupun kelompok oleh masyarakat sekitar, misal dengan memberi surat edaran penggunaan lapangan secara pribadi maupun kelompok dapat dilakukan setelah pembelajaran di madrasah selesai, sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, fasilitas kantin juga harus mendapat perhatian khusus, baik dari pihak madrasah maupun masyarakat, mengingat madrasah yang tidak memiliki kantin sendiri serta kantin yang digunakan siswa terletak di seberang jalan raya atau berada di luar lingkungan madrasah. Tentu hal ini memiliki kekurangan dan resiko yang tinggi, baik dari segi pengawasan dari pihak madrasah maupun dari segi keselamatan peserta didik di tengah-tengah lalu lalang kendaraan. Seharusnya pihak sekolah menyediakan tempat untuk kantin di dalam lingkungan madrasah, sehingga masyarakat yang berjualan bisa berjualan di kantin tersebut dan resiko kecelakaan terhadap siswa madrasah juga berkurang.

Fasilitas rumah warga sekitar madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati, menjadi keuntungan yang lebih bagi madrasah dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan yang berskala besar. Pemanfaatan rumah warga sekitar madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati sangat membantu kelancaran dan suksesnya program/kegiatan yang sedang diselenggarakan madrasah, sebagaimana yang terjadi di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi pada saat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Seni Ma'arif NU Tingkat Kabupaten Banyumas; MI Ma'arif NU 1 Kalitapen memanfaatkan rumah warga sebagai ruang kelas; dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul memanfaatkan rumah warga sebagai transit pada saat menjadi tuan rumah Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah Tingkat Kecamatan Purwojati dan Tingkat Kabupaten Banyumas. Fasilitas sarana prasarana

tersebut merupakan kekuatan madrasah yang kemudian menjadi peluang bagi siswa siswi dalam kegiatan madrasah, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya tetap masih memiliki kelemahan bahkan ancaman.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diasumsikan bahwa partisipasi masyarakat sebagai penyedia sarana prasarana penunjang kegiatan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa partisipasi masyarakat yang kurang menunjang proses perkembangan dan pembelajaran peserta didik, seperti fasilitas lapangan yang masih digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok pada jam pembelajaran, dan kantin madrasah yang terletak di luar madrasah yang dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

Fungsi dari evaluasi adalah untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, dilaksanakan agar berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Bentuk evaluasi sarana prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati terbagi menjadi dua, yakni bentuk secara fisik dan secara fungsional. Secara fisik, sarana prasarana dapat dinilai dan dievaluasi berdasarkan bentuk fisik. Bentuk fisik infrastruktur yang dimiliki masyarakat tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari foto dokumentasi peneliti, selain itu bentuk evaluasi dari masyarakatnya sendiri yaitu dengan ikut serta merawat dan merenovasi apabila terjadi kerusakan dengan fasilitas tersebut. Sementara dilihat dari segi fungsionalisasi, sarana dan prasarana yang dipakai oleh peserta didik seperti mushola, masjid, lapangan, rumah warga tergolong cukup baik, melihat sudah baiknya pengelolaan dan perawatan secara berkala oleh pihak yang berwenang. Sedangkan untuk kantin, memang harus ada semacam tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pihak madrasah dan masyarakat, mengingat kantin kerap kali dijadikan sebagai tempat untuk melakukan hal-hal negatif, terutama pada sekumpulan siswa yang notabene termasuk kelompok nakal.

Dalam hal ini, kepala madrasah dan pihak pengelola kantin sudah seyogyanya duduk bersama untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti membuat tata tertib atau surat edaran yang berisikan

larangan dan sanksi untuk ditempel di kantin, dan sebagainya. Selain itu juga letaknya yang berseberangan dengan madrasah serta tidak adanya rambu-rambu lalu lintas yang tersedia di depan madrasah membuat ancaman keselamatan peserta didik semakin tinggi. Sudah seharusnya pihak madrasah dan masyarakat sadar akan hal ini dan memberikan rambu-rambu lalu lintas agar nantinya angka kecelakaan yang kerap terjadi dapat diminimalisir.

Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya mengenai standar sarana prasarana setiap jenjang pendidikan dapat dilihat dari Satuan Pendidikan, lahan, luas bangunan dan kelengkapan sarana prasarana berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu Permendiknas No. 24 tahun 2007 dan Permendiknas No. 33 tahun 2008.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati diperlukan guna mengupayakan tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah. Program tersebut memang telah diatur dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, namun untuk dapat melaksanakan program tersebut diperlukan kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Masyarakat sekitar madrasah di Kecamatan Purwojati melalui komite madrasah ternyata telah melaksanakan tugas dan perannya dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Selain itu, komite madrasah juga telah melaksanakan partisipasinya dalam program tersebut. Satu hal yang penting digarisbawahi dalam kaitannya dengan partisipasi adalah bahwa masyarakat diperlukan guna menjamin terciptanya akuntabilitas dari suatu program. Karena dengan adanya akuntabilitas ini maka diharapkan dana-dana yang masuk ke madrasah dapat diawasi penggunaannya. Sehingga akan terhindar terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab. Dengan demikian dana tersebut akan dapat berguna secara maksimal. Selain itu, dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan juga akan memunculkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat terhadap madrasah ini. Dengan adanya rasa memiliki tersebut maka pada gilirannya akan memunculkan partisipasi aktif dari Komite Madrasah, sehingga keberlangsungan madrasah ini akan selalu terjaga.

Beberapa prinsip yang diakui terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan hubungan madrasah dengan masyarakat, meliputi: (1) Semua kegiatan hubungan madrasah dengan masyarakat perlu semakin dilaksanakan secara integral atau terpadu; (2) Pelaksanaan hubungan madrasah dengan masyarakat perlu ditingkatkan dan selayaknya dilakukan secara terus menerus; (3) Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, *remedial teaching* dan lain-lain kegiatan; (4) Agar dalam proses hubungan madrasah dengan masyarakat terjalin baik maka perlu dilakukan intensivitas komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, dimana pihak pemberi informasi (madrasah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat; (5) Program hubungan madrasah dengan masyarakat akan terus diupayakan sekonstruktif mungkin, bahwa dalam pengertian madrasah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat; dan (6) Program hubungan madrasah dengan masyarakat selalu diupayakan disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat/orang tua murid.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, dengan lokasi penelitian di tiga madrasah, yaitu MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul, memiliki perbedaan dan persamaan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sarana dan prasarana di madrasah. Perbedaannya meliputi rincian dalam bentuk partisipasi masyarakat dan mekanismenya. Simpulan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi keterbukaan dan adanya sikap saling percaya antara madrasah dengan masyarakat. Untuk menumbuhkan kondisi keterbukaan dan sikap saling percaya, madrasah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SDM, khususnya tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Purwojati sudah berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya Komite Madrasah berada di tengah-tengah antara orang tua murid atau wali murid, murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak madrasah sebagai instansi, kepala madrasah, dan dinas pendidikan wilayahnya dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Walaupun sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi hal tersebut tidak terlepas dari bantuan pihak yang saling terkait dalam lembaga tersebut. Antara lain dalam bersosialisasi dengan masyarakat tidak hanya Komite Madrasah saja tetapi dibantu oleh kepala madrasah, beberapa guru yang memang ikut andil dalam merangkul masyarakat untuk mau berkecimpung di dunia pendidikan. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk pengambilan keputusan,

pelaksanaan program, pemanfaatan program serta evaluasi program madrasah difasilitasi dan dijembatani oleh madrasah yang berfungsi mewedahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggalang dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemampuan komite madrasah melakukan peran dan fungsinya tergantung dari kemampuan komite madrasah dalam memberikan kesempatan kepada komite madrasah untuk melakukan peran dan fungsinya melalui hubungan kemitraan yang sejajar.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtdaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran dengan merencanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan madrasah, dan mengusulkan untuk pertimbangan pengelolaan rencana anggaran belanja madrasah (RABM). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah di MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, MI Ma'arif NU 1 Kalitapen dan MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul dapat dilihat dari beberapa sarana dan prasarana penunjang pendidikan, seperti masjid, lapangan sepakbola dan rumah warga. Fasilitas mushola dan masjid yang digunakan peserta didik dalam rangka pemenuhan nilai spiritual sekaligus sosial, terlihat dari aktif dan antusiasnya masyarakat terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pihak sekolah di mushola atau di masjid. Di samping itu, arahan dan bimbingan juga kerap kali ditunjukkan oleh masyarakat terhadap perilaku peserta didik ketika di mushola maupun di masjid. Berbeda dengan fasilitas lapangan dan kantin, yang memiliki kualitas partisipasi yang relatif kurang. Lapangan sering kali dipakai oleh sebagian masyarakat ketika akan digunakan sebagai sarana olahraga peserta didik. Namun, secara kualitas infrastruktur fisik, lapangan memiliki kualitas yang cukup baik dan terawat. Selain itu, tempat jajan dan makan peserta didik (kantin) bersifat umum dan terletak di luar madrasah. Hal ini tentu menjadi kekurangan tersendiri, mengingat kantin kerap dijadikan sebagai tempat untuk melakukan hal-hal negatif. Selain itu, letak kantin yang berada di

seberang jalan raya memiliki resiko yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan peserta didik.

B. Rekomendasi

Berangkat dari pemahaman bahwa madrasah swasta sebagai wadah pembinaan anak bangsa yang mengkhususkan diri dalam pendidikan agama Islam adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, sudah sepantasnya implementasi kebijakan pemerintah tidak memperlakukan secara diskriminatif dalam berbagai hal yang menyangkut kegiatan kependidikan pada madrasah, baik pada pengalokasian anggaran dan pemberian fasilitas pendukung maupun pada pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang terkait secara teknis dengan peningkatan mutu pendidikan. Perlakuan diskriminatif antara madrasah negeri dengan madrasah swasta akan semakin membuat jarak dan dikotomi yang lebih besar. Ini berarti terjadi ancaman bagi pendidikan agama Islam, khususnya yang dikelola swasta di masa datang.

Dalam upaya meningkatkan kualitas madrasah swasta, tentu tidak terlepas dari dukungan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, peran para pembina, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan pada umumnya, serta wirausaha, dibutuhkan untuk menggalang serta membangun partisipasi tersebut. Peran yang dimaksud bukan hanya sekedar mengajak untuk memberikan sumbangan dan memasukkan anak dan keluarganya ke madrasah, melainkan masyarakat ikut serta mengambil peran secara positif dengan bentuk kemitraan dan kesukarelaan bersama memikirkan peningkatan mutu pembinaan pendidikan dan masa depan generasi melalui pendidikan madrasah pada khususnya.

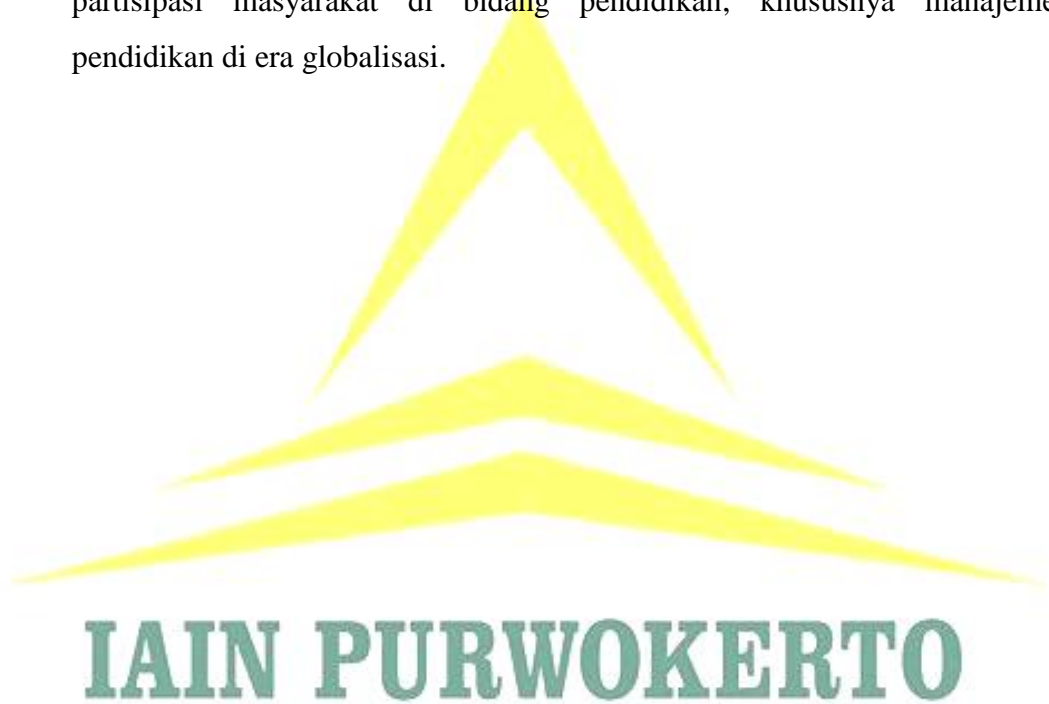
Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan suatu yang akan diintrodusir sebagai pendekatan baru dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan madrasah yang memerlukan penanganan yang tepat, jelas, transparan, efektif, efisien dan memerlukan sebuah wadah yang memenuhi akuntabilitas publik. Dalam rangka meningkatkan modal sosial, perlu ada aturan main yang jelas, sehingga memudahkan untuk menetapkan tolak ukur

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati dinyatakan, sebagai berikut:

1. Diperlukan reposisi peran komite madrasah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas;
2. Melakukan pembudayaan prinsip demokratisasi di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati dalam menggali partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan;
3. Melakukan peningkatan transparansi, akuntabilitas dan *responsivness* dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati dengan memanfaatkan perkembangan ICT secara baik;
4. Kerjasama dengan lembaga pendidikan baik yang sejenis ataupun dengan Perguruan Tinggi dalam upaya menggali potensi masyarakat sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan;
5. Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya memberikan kemudahan rekomendasi bagi Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati dalam menggali partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk mencari dana di perusahaan baik perusahaan negara maupun perusahaan daerah serta perusahaan swasta sebagai mitra kerja pendidikan terutama sekali melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) Perusahaan yang sudah ada baik di wilayah Kabupaten Banyumas maupun daerah kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Tengah terutama sekali untuk pembuatan dan pengembangan Website Lembaga Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dan terobosan-terobosan lain sebagai upaya terobosan global dalam menggali partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6. Upaya Komite madrasah dalam menggali partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen

pendidikan, baik guru, kepala madrasah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

7. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan TIK dalam peningkatan mutu manajemen pendidikan, mengingat kecenderungan penggunaan TIK melalui dunia maya menjadi dominan sebagai wahana partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, khususnya manajemen pendidikan di era globalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di MAN Pangkalan Balai Banyuasin". *Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang*: tidak diterbitkan, 2013.
- Anggoro, Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Bungin, Burhan (Eds). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Cutlip, S. M., A. H. Center & G .M. Broom, *Effective Public Relations*. 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
- Depdiknas RI. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Program Guru Bantu - Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Effendy, Onong Uchjana. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Fajar, Malik. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1998.
- Fatah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Goldhaber, Gerald M. *Organizational Communication*, 5th. Ed. Dubuque: Wm.C. Brown Publishers, 1990.
- Hadi, Sutrinno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

- Hasibuan, Malayu P. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Jihad, Nur. "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendidikan Islam (Studi Multisitus SMPN 1 Taliwang dan MTsN 1 Taliwang Sumbawa Barat)". *Tesis Program Pascasarjana UIN Malang*: tidak diterbitkan, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1986.
- Miarso, Yusufhadi. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mukhtar dan Iskandar. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Mulyasa, E. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Bandung: Departemen Pendidikan Agama RI, 2003.
- _____. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rodakarya, 2006.
- _____. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- _____. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Panjastuti, Sri Renani dkk. *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Pidarta, Made. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Malang: Erlangga, 2007.
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang, 1999.

- Ramli, Moh. "Manajemen Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus MIN Malang I Jl. Bandung)". *Tesis* Program Pascasarjana UIN Malang: tidak diterbitkan, 2008.
- Rifa'i, Moh. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus M.A T.M.I Al-Amien Prenduan Sumenep)". *Tesis* Program Pascasarjana UIN Malang: tidak diterbitkan, 2008.
- Ruslan, Rosady. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo, 2003.
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2000.
- _____. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sengupta, Sailesh. *Management of Public Relations and Communication*. New Delhi: Vikas, 2001.
- Shaleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa 2000.
- Siahaan, Amiruddin dkk. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Ciputat: Quantum Teaching, 2006.
- Sikula, Andrew F. *Personnel Administration and Human Resources Management*. New York: A. Wiley Trans Ed. By John Wiley & Sons Inc., 1981.
- Soekanto, Sarjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soetjipto & Kosasi, Raflis. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suparlan. *Membangun Sekolah Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suryasubroto, B. *Humas Dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001.
- Syafiie, Inu Kencana. *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Tilaar, HAR. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- _____. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: FIP UPI, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahjosumijdo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Zainuddin. *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Zuhairi. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.





LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

FORM IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :
NIP :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan/Pekerjaan :
Lama Kerja :
Hari dan Tanggal Wawancara :

Dengan ini saya BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA menjadi informan untuk penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”.

Purwojati, Maret 2017
Informan

.....
NIP.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Nama Informan :
NIP :
Jabatan :
Usia :
Jenis Kelamin :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

PETUNJUK UMUM

1. Sampaikan ucapan terima kasih kepada informan atas kesediaannya dan waktu yang telah diluangkan untuk diwawancarai.
2. Jelaskan tentang maksud dan tujuan wawancara.

PETUNJUK WAWANCARA MENDALAM

1. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan apabila memungkinkan dibantu oleh seorang pencatat.
2. Informan bebas untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, saran dan komentar.
3. Pendapat, pengalaman, saran dan komentar informan sangat bernilai.
4. Jawaban tidak ada yang benar atau salah, karena wawancara ini untuk kepentingan penelitian.
5. Semua pendapat, pengalaman, saran dan komentar akan dijamin kerahasiaannya.
6. Sampaikan kepada informan bahwa wawancara ini akan direkam pada *tape recorder* untuk membantu ingatan pewawancara.

PELAKSANAAN WAWANCARA

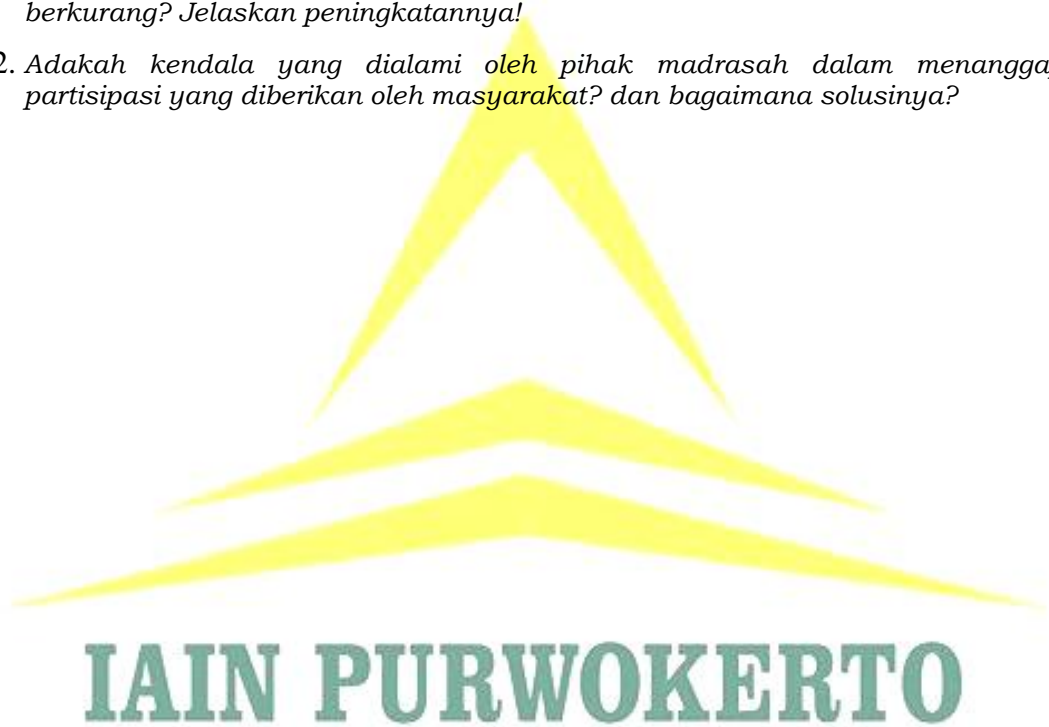
PERKENALAN

1. Perkenalkan diri pewawancara
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara kepada informan
3. Meminta kesediaan informan untuk diwawancarai

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH
DAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DI KECAMATAN PURWOJATI**

1. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan madrasah?
2. Apa Visi Misi dan tujuan madrasah?
3. Bagaimana keadaan guru, karyawan dan siswa madrasah?
4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana madrasah?
5. Bagaimana upaya anda dalam pengembangan madrasah anda?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan madrasah anda?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah anda?
8. Bagaimana mekanisme yang diberikan madrasah dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat di madrasah anda?
9. Apa saja bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat di sekitar madrasah anda?
10. Bagaimana strategi yang ada terapkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di madrasah anda?
11. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) madrasah anda? Dalam bentuk apa saja?
12. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah anda? Dalam bentuk apa saja?
13. *Partisipasi apa yang diberikan masyarakat kepada madrasah?*
14. *Berapa besar wali murid yang hadir di setiap undangan rapat?*
15. *Setiap kegiatan madrasah seperti pramuka, study tour, PHBI, agustusan, adakah partisipasi dari masyarakat?*
16. *Pembangunan madrasah mendapat bantuan dari masyarakat baik dari segi tenaga maupun biaya? (iya/tidak) bagaimana pelaksanaannya?*
17. *Selain partisipasi di atas adakah partisipasi lain yang diberikan masyarakat kepada madrasah?*
18. *Dalam menanggapi keputusan dari madrasah, bagaimana respon dari masyarakat?*
19. *Adakah peran dari tokoh masyarakat di lingkungan madrasah baik berupa dana, jasa, tenaga dan pemikiran? dalam hal apa dan bagaimana pelaksanaannya?*
20. *Bagaimana cara pihak madrasah dalam mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan madrasah?*
21. *Pernahkah berkunjung ke rumah wali murid baik dalam hal menjenguk siswa yang sakit, karena membolos secara terus menerus dan sebagainya?*
22. *Atau dengan cara mengundang dalam pertemuan rutin untuk membahas masalah tertentu? Bagaimana pelaksanaan partisipasi tersebut?*
23. *Dilakukan secara langsung tatap muka antara guru dan wali murid atau tidak?*

24. Adakah kendala yang dihadapi dalam menjalankan partisipasi itu?
25. Dalam pelaksanaannya apakah ada jadwal tetap dari madrasah?
26. Partisipasi apa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terhadap pengembangan madrasah?
27. Kapan masyarakat mulai sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dan mulai memberikan partisipasinya kepada madrasah?
28. Dari mulai partisipasi diberikan sampai sekarang kemajuan apa yang dapat dicapai? Apakah mengalami jumlah peningkatan siswa di setiap tahunnya? Sampai berapa persenkah peningkatan tersebut?
29. Dari segi bangunan adakah kemajuan? di bagian apa!
30. Kualitas pendidikan meningkat atau tidak? jelaskan!
31. Hubungan antara madrasah dengan masyarakat semakin erat atau malah berkurang? Jelaskan peningkatannya!
32. Adakah kendala yang dialami oleh pihak madrasah dalam menanggapi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat? dan bagaimana solusinya?



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KOMITE MADRASAH IBTIDAIYAH DI KECAMATAN PURWOJATI

1. *Dalam kaitannya dengan peran, apakah komite madrasah ikut berperan dalam pengembangan madrasah?*
2. *Peran apa yang diberikan kepada pihak madrasah?*
3. *Apakah dalam setiap pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan madrasah dilakukan atas persetujuan dari komite madrasah?*
4. *Bagaimana jika terjadi tidak keselarasan antara komite dengan pihak madrasah?*
5. *Peran apa yang banyak dilakukan oleh komite kepada madrasah?*
6. *Dalam kaitan peran komite madrasah sebagai penghubung antara madrasah dengan masyarakat (wali murid), sudahkah dilakukan?*
7. *Bagaimana pelaksanaan peran tersebut?*
8. *Adakah masyarakat yang memberikan partisipasinya melalui komite madrasah?*
9. *Bagaimana tanggapan komite madrasah terhadap pemberian partisipasi tersebut?*
10. *Bagaimana cara komite madrasah dalam menyalurkan partisipasi tersebut kepada madrasah?*
11. *Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut?*
12. *Kendala internal/eksternal? Bagaimana cara untuk menyelesaikannya?*
13. *Kemajuan apa yang dapat dilihat di madrasah berkaitan dengan adanya partisipasi dari masyarakat?*
14. *Harapan apa yang diinginkan dari komite madrasah terhadap partisipasi dari masyarakat tersebut?*
15. *Dari setiap tahunnya apakah partisipasi masyarakat mengalami kestabilan atau tidak?*

IAIN PURWOKERTO

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT
DI SEKITAR MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN PURWOJATI**

1. *Sejauh mana pengertian anda tentang pentingnya pendidikan untuk anak anda?*
2. *Upaya apa yang anda lakukan demi kemajuan pada anak anda di bidang pendidikan khususnya?*
3. *Apa yang anda harapkan dari anak anda dengan menyekolahkan anda di madrasah tersebut?*
4. *Bagaimana partisipasi anda kepada madrasah tersebut, agar madrasah tersebut bisa mengalami kemajuan?*
5. *Apakah anda pernah membantu kegiatan di madrasah? Kegiatan apa yang anda ikuti?*
6. *Adakah kegiatan yang wajib dari madrasah bagi wali murid?*
7. *Pernahkah anda memberikan bantuan kepada madrasah secara sukarela? Bantuan untuk kegiatan apa?*
8. *Adakah dari masyarakat Desa yang tidak mempunyai anak di madrasah tersebut yang ikut berperan? Apa pendidikan mereka?*
9. *Pernahkan anda memberikan masukan berupa ide kepada pihak madrasah? Dalam hal apa, dan bagaimana tanggapan dari pihak madrasah?*
10. *Faktor apa yang membuat anda berkeinginan pengembangan madrasah?*
11. *Menurut anda apakah madrasah tersebut mengalami kemajuan?*
12. *Adakah tokoh masyarakat yang ikut berupaya dalam pengembangan madrasah? Bagaimana bentuk upaya tersebut?*
13. *Pengembangan madrasah yang seperti apa yang anda harapkan dari madrasah tersebut?*
14. *Bagaimana bentuk dari partisipasi dalam pengembangan madrasah tersebut?*
15. *Apakah anda sering mendatangi undangan rapat dari madrasah? Membahas apa dan kapan pelaksanaannya?*
16. *Selain kehadiran rapat, apakah anda pernah datang ke madrasah? Untuk kepentingan apa?*
17. *Jika terjadi masalah pada anak anda apakah anda pernah berkonsultasi kepada guru? Apa masalahnya? dan Bagaimana saran yang diperoleh?*
18. *Dari segi biaya apakah wali murid pernah dimintai bantuan, bagaimana anda menanggapinya?*
19. *Selain bantuan dana, pernahkan anda memberikan bantuan tenaga kepada madrasah? Kapan dan bagaimana pelaksanaannya?*
20. *Dalam kegiatan madrasah seperti pramuka/tujuh belasan pernahkah anda membantu? Bagaimana bentuk bantuan yang anda berikan?*
21. *Selain beberapa peran yang tadi saya tanyakan adakah partisipasi lain yang anda berikan kepada madrasah? Misalnya dalam pengembangan sumber daya manusia, pernahkah anda berperan menjadi pengajar/ guru pengganti seperti*

dalam kegiatan keagamaan, kesehatan dan sebagainya? Kapan pelaksanaannya dan materi apa yang diberikan?

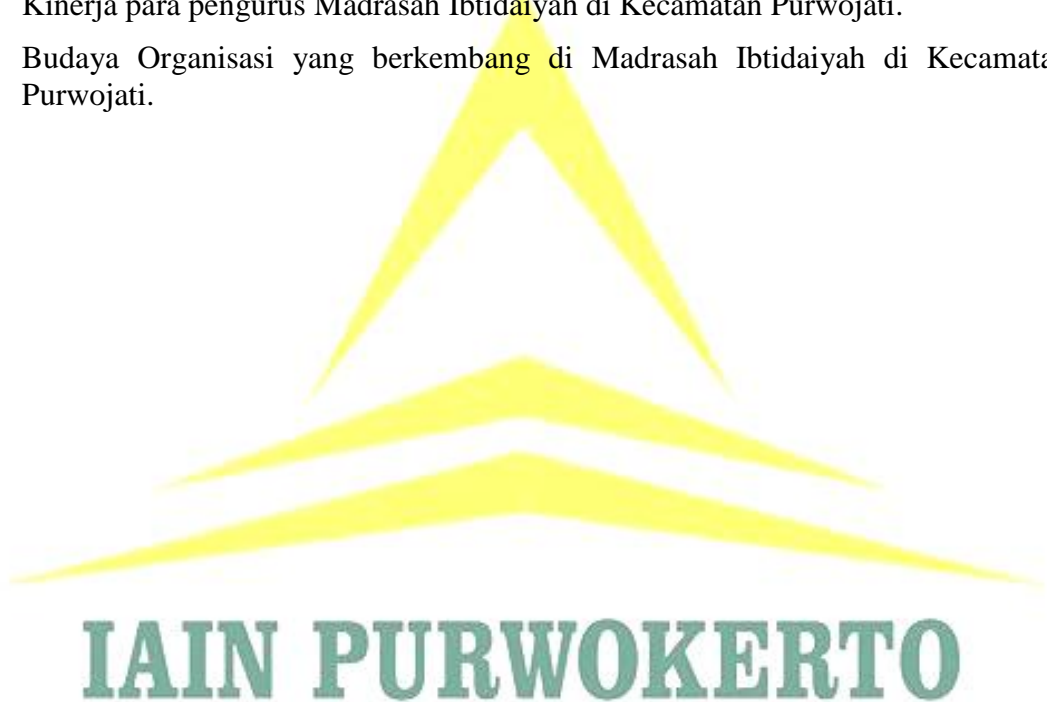
- 22. Selain peran berupa pemikiran, barang dan jasa, apakah anda sudah memberikan peran moral berupa pendidikan kepada anak ketika di rumah?*
- 23. Bagaimana cara anda sebagai wali murid dalam menerima setiap keputusan yang diberikan madrasah kepada siswanya?*
- 24. Apakah anda pernah mengkritik pihak sekolah ketika terjadi suatu ketidak tepatan terhadap pelaksanaan pendidikan di madrasah?*
- 25. Pernahkan anda memberikan peran berupa menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan di madrasah?*
- 26. Melalui siapa partisipasi tersebut diberikan jika berupa dana kepada kepala madrasah, komite atau dengan guru yang ada di madrasah?*
- 27. Apakah ada jadwal tetap untuk pelaksanaan peran tersebut dari madrasah? Jika iya, partisipasi yang seperti apa?*
- 28. Bagaimana respon dari madrasah berkaitan dengan adanya partisipasi dari masyarakat?*
- 29. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi tersebut dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya?*



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN OBSERVASI

1. Lokasi Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.
2. Situasi dan kondisi Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.
3. Situasi dan kondisi masyarakat di sekitar Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati
4. Kegiatan partisipasi masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.
5. Kegiatan rapat yang diselenggarakan madrasah maupun komite Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.
6. Sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.
7. Kinerja para pengurus Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.
8. Budaya Organisasi yang berkembang di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati.



PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati
2. Keadaan guru, dan karyawan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati
3. Keadaan siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati
4. Struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati
5. Sarana dan fasilitas Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati
6. Dokumentasi Hasil Rapat Komite Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati
7. Kurikulum Pengembangan Diri Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati
8. Dokumentasi terkait dengan Partisipasi Masyarakat di sekitar Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Purwojati.



DOKUMENTASI PENELITIAN

1. MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi



Wawancara dengan Kepala MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi



Wawancara dengan Waka Humas MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi



Struktur Komite MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi



Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sarana Prasarana



Rapat Komite Madrasah dengan Guru MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi

No	Nama Donatur	Jumlah	Total
1	Wahid dan Supri	200.000	200.000
2	Edi	200.000	400.000
3	Dr. Ben	2.000.000	2.400.000
4	Pak Mubtadin	1.000.000	3.400.000
5	Wahid Muli	1.000.000	4.400.000
6	Sapari Purni	100.000	4.500.000
7	Hambur Arah	100.000	4.600.000
8	Rotman (ZK)	200.000	4.800.000
9	Sabim	100.000	4.900.000
10	Khoendin	100.000	5.000.000
11	Hari Payato Teluk	1.000.000	6.000.000
12	Kasno Belanda	500.000	6.500.000
13	Beli Kayu Kamper		3.006.800
			7.043.200

Dokumentasi Daftar Donatur Pembangun MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi

2. MI Ma'arif NU 1 Kalitapen



Wawancara dengan Kepala MI Ma'arif NU 1 Kalitapen



Wawancara dengan Waka Humas MI Ma'arif NU 1 Kalitapen



**Rapat dengan Wali Siswa MI Ma'arif NU 1 Kalitapen
Membahas Anggaran Belanja Madrasah**



**Silaturahmi dan Sosialisasi Rencana Kerja
MI Ma'arif NU 1 Kalitapen**

3. MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul



Wawancara dengan Kepala MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul



Wawancara dengan Guru MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul

BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

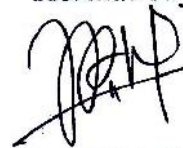
1. Nama : Siti Samroh
2. Tempat / Tgl Lahir : Banyumas, 27 Juli 1982
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Guru
7. Alamat : Jatisaba RT 03 RW V Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas Kode Pos 53162
8. Email : abdul.majidsamroh78@gmail.com
9. No. HP. : 085 289 307 548

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Ma'arif NU Jatisaba lulus tahun 1995.
2. SMP Karya Bakti Purwojati lulus tahun 1998.
3. SMK al-Hikmah 2 Benda lulus tahun 2001.
4. D2 STAIN Purwokerto lulus tahun 2003.
5. S1 STAIN Purwokerto, lulus tahun 2011.
6. Program Pascasarjana IAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2016.

Demikian biodata penulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berani disumpah jika diperlukan. Semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



SITI SAMROH
NIM. 1423402123